

#BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**#bangga
melayani
bangsa**



**DINAS PERUMAHAN
KAWASAN PERMUKIMAN & PERTANAHAN
KABUPATEN TAPIN**

IKIP 2022
**APORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH**

JL. JENDRAL SUDIRMAN (BY PASS) RANTAU (71111)
KALIMANTAN SELATAN (0511) 31291

2023



EXECUTIVE SUMMARY

CAPAIAN KINERJA

	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase luas wilayah permukiman bebas kumuh	99,91%	97,69%	97,78%
Persentase perumahan yang berkualitas	2,63%	2,13%	80,99%
Persentase rumah layak huni	83,52%	89,02%	106,59%
Persentase penanganan konflik-konflik pertanahan	100,00%	100,00%	100,00%
Persentase tanah pemerintah kabupaten yang bersertifikat	100,00%	24,31%	24,31%

Uraian	Anggaran		Realisasi	%
	DPA	DPPA		
BELANJA OPERASI	17.956.743.181,00	21.441.610.215,00	17.784.148.879,00	82,94
Belanja Pegawai	2.895.416.584,00	2.953.922.377,00	2.784.238.053,00	94,26
Belanja Barang dan Jasa	15.061.326.597,00	15.478.687.838,00	11.990.910.826,00	77,47
Belanja Bantuan Sosial	-	3.009.000.000,00	3.009.000.000,00	100,00
BELANJA MODAL	64.237.318.295,00	14.460.695.662,00	12.651.347.490,00	87,49
Belanja Modal Tanah	57.936.274.843,00	3.897.470.000,00	3.450.800.000,00	88,54
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	169.955.200,00	278.575.000,00	253.826.900,00	91,12
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2.253.000.400,00	292.000.000,00	273.359.750,00	93,62
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	3.878.087.852,00	9.592.650.662,00	8.673.360.840,00	90,42
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	-	400.000.000,00	0,00	0,00
Jumlah	82.194.061.476,00	35.902.305.877,00	30.435.496.369,00	84,77

Capaian Kinerja tergambar diatas didukung dengan alokasi dana sebesar Rp. 35.902.305.877,00 dan terealisasi sebesar Rp. 30.435.496.369,00 (84,77%) yang terdiri dari kegiatan Sekretariat Rp. 5.799.620.876,00 realisasi Rp. 5.275.665.239,00 (90,97%) Kegiatan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Rp. 6.286.595.000,00 realisasi Rp. 5.522.293.000,00 (87,84%) Kegiatan bidang PSU Rp. 18.853.535.001,00 realisasi Rp. 15.496.623.130,00 (82,19%) dan kegiatan bidang Pertanahan Rp. 4.962.555.000,00 realisasi Rp.4.140.915.000,00 (83,44%).

Adanya capaian 24,31% adalah pada Indikator Kinerja Utama "Persentase Tahan Pemerintah Kabupaten yang Bersertifikat" dengan permasalahan pada pengelolaan arsip kepemilikan tanah (aset) di masing-masing SKPD atau instansi di lingkungan Pemda Tapin belum maksimal, sehingga proses pensertifikasian tanah terhambat dari segi kelengkapan administrasi dan batas tanah.

KATA PENGANTAR

Laporan ini disusun mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan dimaksud memuat pencapaian kinerja pelaksanaan program sesuai dengan tugas dan fungsi Disperkimtan. Program serta kegiatan yang telah dilaksanakan dimaksudkan sebagai bentuk peran serta aktif Disperkimtan dalam rangka mewujudkan *good governance*. Program-program dimaksud yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Pengembangan Perumahan
3. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh
4. Program Kawasan Permukiman
5. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)
6. Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan
7. Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan
8. Program Penatagunaan Tanah

Diharapkan apa yang telah dicapai Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Tapin dalam kurun waktu tersebut dapat memberikan kontribusi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Tapin.

Rantau, Maret 2023

Kepala Dinas,



YUMANTO, AP., M.AP.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19750328 199311 1 002

DAFTAR ISI

EXECUTIVE SUMMARY	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR LAMPIRAN	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Gambaran Umum, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD	2
1.3. Dukungan Sumber Daya.....	5
1.3.1 Sumber Daya Manusia.....	5
1.3.2 Sumber Daya Sarana Prasarana	7
1.4. Aspek Strategis Organisasi.....	9
1.5. Identifikasi Permasalahan dan Isu Strategis berdasarkan Tugas dan Fungsi	9
1.5.1 Isu Strategis	9
1.5.2 Permasalahan	10
1.6. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Sakip Tahun 2020	10
BAB II PERENCANAAN KINERJA	12
2.1. Perencanaan Strategis.....	12
2.2. Indikator Kinerja Utama (IKU)	12
2.3. Perjanjian Kinerja.....	17
2.4. Program Kegiatan dan Alokasi Anggaran	21
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	23
3.1. Capaian Kinerja Organisasi	23
3.1.1 Capaian Indikator Kinerja Utama	23
3.1.2 Perbandingan antara realisasi kinerja tahun ini dan tahun lalu.....	41
3.1.3 Membandingkan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah	44

3.1.4 Perbandingan antara realisasi kinerja dengan target SPM.....	45
3.1.5 Analisa penyebab keberhasilan / kegagalan serta alternatif solusi yang telah dilakukan.....	47
3.1.6 Analisa atas efisiensi penggunaan sumberdaya	54
3.1.7 Analisa program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan / kegagalan pencapaian pernyataan kinerja...	60
3.2. Realisasi Anggaran.....	72
BAB IV PENUTUP	79

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Rekapitulasi Pegawai Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Tapin Tahun 2022.....	5
Tabel 1.2	Rekapitulasi Tingkat Pendidikan Aparatur Sipil Negara Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Tapin Akhir Tahun 2022	5
Tabel 1.3	Daftar Pangkat dan Golongan PNS Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan per 31 Desember 2022	6
Tabel 1.4	Daftar Sarana Prasarana Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan per 31 Desember 2022	8
Tabel 1.5	Progres Nilai SAKIP Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Tapin.....	10
Tabel 2.1	Indikator Kinerja Utama Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.....	14
Tabel 2.2	Ringkasan Perjanjian Kinerja Tahun 2022	17
Tabel 2.3	Program dan Kegiatan Pendukung Kinerja Utama TA 2022	20
Tabel 2.4	Daftar Kegiatan Berdasarkan Renja (Murni dan Perubahan) TA 2022	21
Tabel 3.1	Realisasi dan Capaian Target Kinerja Utama Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Tapin Tahun 2022	23
Tabel 3.2	Realisasi dan Capaian Sasaran Pertama Meningkatnya Kualitas Lingkungan Perumahan dan Kawasan Permukiman.....	24
Tabel 3.3	Realisasi dan Capaian Sasaran Kedua Meningkatnya Kualitas Manajemen Pertanahan	26
Tabel 3.4	Capaian Realisasi Kinerja dan Keuangan Indikator Kinerja Utama (IKU).....	29
Tabel 3.5	Capaian Realisasi Perjanjian Kinerja Eselon III.....	31
Tabel 3.6	Capaian Realisasi Perjanjian Kinerja Eselon IV	32
Tabel 3.7	Capaian Realisasi Perjanjian Kinerja Staf (Pelaksana)	34
Tabel 3.8	Capaian Realisasi Kinerja dan Keuangan Program Kawasan Permukiman	35

Tabel 3.9	Capaian Program Pengembangan Perumahan.....	36
Tabel 3.10	Capaian Program Perumahan dan Kawasan Permukiman	37
Tabel 3.11	Capaian Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU).....	38
Tabel 3.12	Capaian Program Penatagunaan Tanah	40
Tabel 3.13	Capaian Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan.....	40
Tabel 3.14	Capaian Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan.....	41
Tabel 3.15	Perbandingan Capaian Kinerja Disperkimtan Tapin TA 2018 sd 2022	42
Tabel 3.16	Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah	44
Tabel 3.17	Target dan Realisasi SPM Tahun 2022.....	45
Tabel 3.18	Analisis Efisiensi Sumber Daya dan Realisasi Kinerja Disperkimtan TA 2022.....	55
Tabel 3.19	Program dan Kegiatan Pendukung Target Kinerja Disperkimtan TA 2022	61
Tabel 3.20	Program dan Kegiatan Pendukung Meningkatnya Kualitas Lingkungan Perumahan dan Kawasan Permukiman.....	63
Tabel 3.21	Pembangunan PJU Kabupaten Tapin TA 2022	68
Tabel 3.22	Program dan Kegiatan Pendukung Meningkatnya Kualitas Manajemen Pertanahan	69
Tabel 3.23	Realisasi Anggaran Belanja TA 2022.....	72
Tabel 3.24	Realisasi Anggaran Program Kegiatan Pendukung Kinerja TA 2022	73
Tabel 3.25	Realisasi Anggaran Program Kegiatan Disperkimtan TA 2022	75

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Disperkimtan Tapin	4
---	---

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Perjanjian Kinerja	
--------------------------------	--

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik adalah amanat reformasi birokrasi yang harus diwujudkan dan dilaksanakan oleh seluruh instansi pemerintahan. Oleh karena itu, salah satu langkah yang ditempuh pemerintah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik adalah diharuskannya setiap instansi pemerintah menyusun laporan akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah tersebut atas penggunaan anggaran yang telah digunakan selama satu tahun. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2006 perihal Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenpanRB) Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Berdasarkan peraturan tersebut di atas, maka setiap instansi pemerintah berkewajiban menyusun Laporan Kinerja (LKj) yang merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban instansi pemerintah dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan berdasarkan Rencana Strategis maupun Rencana Kerja tahunan yang dibuat sebelumnya.

Proses penyelarasan dilakukan melalui penyusunan Rencana Strategi (RENSTRA) dalam jangka menengah (5 tahunan), Rencana Kerja (RENJA) tahunan atau Perjanjian Kinerja yang merupakan kontrak kinerja, serta Laporan Pertanggungjawaban Kinerja tiap tahunnya.

Dari laporan ini diharapkan dapat diperoleh suatu simpulan pencapaian pelaksanaan tugas dan fungsi serta dapat digunakan sebagai titik tolak dan bahan analisis dalam rangka meningkatkan kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tapin di tahun-tahun berikutnya. Hal ini berkaitan erat dengan tujuan dan fungsi utama LKIP yaitu sebagai media pertanggungjawaban dan sebagai alat untuk meningkatkan kinerja suatu organisasi.

1.2. Gambaran Umum, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 06 Tahun 2016. Lingkup pelayanan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan terfokus kepada perumahan dan permukiman, prasarana, sarana dan utilitas umum baik yang ada diperumahan maupun permukiman, penataan kota, Ruang Terbuka Hijau (RTH) , pertamanan dan penerangan jalan umum (PJU). Namun dilain pihak sarana penunjang, teknologi, serta Sumber Daya Manusia yang tersedia belum memadai seperti yang dibutuhkan.

Berdasarkan Perbub No.26 Tahun 2017 Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Organisasi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Tapin adalah meliputi :

- (1) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan di bidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan.
- (2) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis Perumahan, Permukiman dan Pertanahan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang perumahan dan kawasan permukiman, prasarana, sarana dan utilitas perumahan.;
 - c. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang perizinan pertanahan, penggunaan tanah, tanah ulayat dan tanah kosong;
 - d. Penyelesaian sengketa tanah garapan dalam daerah dan masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh Pemerintah Daerah;
 - e. Pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan teknis bidang perumahan, permukiman, prasarana, sarana dan utilitas perumahan;
 - f. Pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan

- pelaksanaan kebijakan teknis bidang pertanahan;
- g. Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian UPT;
- h. Pengelolaan kesekretariatan; dan
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Susunan organisasi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan terdiri dari :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Perumahan dan permukiman;
- d. Bidang Prasarana Sarana dan Utilitas (PSU);
- e. Bidang Pertanahan;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Gambar 1. 1. Struktur Organisasi Disperkimtan



1.3. Dukungan Sumber Daya

1.3.1. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia yang dimiliki oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan seluruhnya di tahun 2022 berjumlah 18 orang.

Tabel 1.1

Rekapitulasi Pegawai Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Tapin Tahun 2022

No	Unit Kerja	Jumlah
1	Kepala Dinas	1 org
2	Sekretariat	5 org
3	Bidang Perumahan dan Permukiman	2 org
4	Bidang PSU	1 org
5	Bidang Pertanahan	1 org
6	Kelompok Jabatan Fungsional	8 org
Jumlah		18 org

Tabel 1.2

Rekapitulasi Tingkat Pendidikan Aparatur Sipil Negara Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Tapin Akhir Tahun 2022

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah
		(orang)
1	Strata 2 (S-2)	4
2	Strata 1 (S-1)	12
3	Sarjana Muda (D-3)	1
4	SLTA (Sekolah Lanjutan Tingkat Atas)	1
5	SLTP (Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama)	-

Berdasarkan tabel komposisi pegawai Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Tapin di atas menunjukkan bahwa pegawai yang berpendidikan strata 2 (S-2) sebanyak 4 orang. Pegawai yang berpendidikan pendidikan strata 1 (S-1) yakni sebanyak 12 orang. Sementara itu, pegawai yang berpendidikan sarjana muda/D3 ada sebanyak 1 orang.

Sisanya sebanyak 1 orang berpendidikan SLTA/SMK. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa sebagian besar sumber daya manusia yang terdapat di Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Tapin berpendidikan jenjang atas. Meskipun telah memiliki jumlah pegawai yang cukup dengan pendidikan jenjang atas, namun pegawai yang berlatar belakang teknis Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan masih dianggap kurang, sehingga perlu dilakukan penambahan.

Tabel 1.3
Daftar Pangkat dan Golongan PNS Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan per 31 Desember 2022

NO	NAMA	NIP	JABATAN	PANGKAT/GOL	ES
1	YUMANTO, AP, M.AP	19750328 199311 1 002	Kepala	Pembina Utama Muda (IV/c)	2B
2	H.HERMAN CAHYONO, S.Hut	19670210 199703 1 003	Sekretaris	Pembina Tk. 1 (IV/b)	3A
3	SUPIAN HADI, S.Sos	19770619 200701 1 010	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Penata Tk. I (III/d)	4A
4	MUHAMAD JAZULI RAHMAN, ST	19820124 201503 1 001	Kasubag Perencanaan dan Keuangan	Penata (III/c)	4A
5	KRISNA DARMAWAN, SE	19900225 202012 1 003	Bendahara	Penata Muda (III/a)	-
6	IKHSAN REZA FAKHLEVIE, SE	19930418 202012 1 004	Pranata Barang dan Jasa	Penata Muda (III/a)	-
BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN					
7	ZAUL RAHMAN, S.Sos	19810909 201001 1 020	Kabid Perumahan dan Kawasan Permukiman	Penata Tk. I (III/d)	3B
8	H. MAMAN, S.Sos	19650416 198603 1 016	JF. Teknik Penyehatan Lingkungan Muda	Penata Tk. I (III/d)	-
9	ERLIS AKHSAN FUAD, ST	19820728 201001 1 019	JF. Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Muda	Penata (III/c)	-
10	H. MUHAMMAD IRFAN ROSANDY, ST	19870110 201402 1 004	JF. Perencana Muda	Penata Muda Tk.I (III/b)	-
11	MUHAMMAD RAKHMAD RAUZIE	19740512 199503 1 006	Pengawas Fisik Pemukiman	Penata Muda Tk.I (III/b)	-

NO	NAMA	NIP	JABATAN	PANGKAT/GOL	ES
BIDANG PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS (PSU)					
12	Ahmad Zainul Muttaqin, ST, MT	19731008 199603 1 001	Kabid Prasarana dan Sarana Utilitas Umum (PSU)	Pembina (IVa)	3B
13	H.MARZUKI, SAP	19660502 198907 1 001	JF. Analis Kebijakan Muda	Penata Tk.I (III/d)	-
14	ISMA SARI, SP, M.Ling	19840608 201503 2 001	JF. Teknik Penyehatan Lingkungan Muda	Penata (III/c)	-
BIDANG PERTANAHAN					
15	H.ISROK ANTARIKSO, SKM. M.Kes	19680928 198902 1 001	Kabid Pertanahan	Pembina (IVa)	3B
16	YULIANA HAYATI, SH	19860722 201503 2 002	JF. Analis Kebijakan Muda	Penata (III/c)	-
17	KUMALASARI, S. Ars	19771025 200604 2 021	JF. Penata Ruang Muda	Penata Muda Tk. I (III/b)	-
18	ABDURAHMAN FADILAH, A.Md	19800321 201001 1 009	JF. Penata Ruang Muda	Penata (III/c)	-

Jumlah Pejabat Struktural Disperkimtan Tapin sebanyak 7 orang dan jumlah Pejabat Fungsional sebanyak 8 orang.

1.3.2. Sumber Daya Sarana Prasarana

Sarana prasarana dalam suatu SKPD sangatlah penting untuk menunjang operasional dan kegiatan kantor yang bersifat administrasi maupun teknis operasional, dengan ratio kecukupan dan pengelolaan sarana prasarana yang baik dapat memaksimalkan pencapaian tujuan dan sasaran SKPD.

Dukungan sumber daya sarana dan prasarana yang ada pada kantor Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Tapin bisa dilihat pada Tabel 1.4 berikut :

Tabel 1.4

Daftar Sarana Prasarana Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan per 31 Desember 2022

BARANG YANG DIPELIHARA							KETERANGAN	
KODE BARANG	NAMA BARANG	JUMLAH	SATUAN	STATUS BARANG	KONDISI BARANG			
					B	RR		RB
1.3.2.02.001.003.001	Truck + Attachment	1	Unit	Digunakan Sendiri	1		ISUZU / ELF DA 905 AE	
1.3.2.02.001.003.002	Pick Up	2	Unit	Digunakan Sendiri	2		Ford / Ranger DA 938 K, Nissan Navara DA 8633 KJ	
1.3.2.02.001.004.001	Sepeda Motor	8	Unit	Digunakan Sendiri	8		Yamaha Byson DA 815 KE, Honda Beat (DA 617 K, DA 5860 KT, DA 5857 KT), Honda CB150R (DA 613 K, DA 614 K, DA 615 K, DA 616 K)	
1.3.2.02.001.006.110	kendaraan bermotor khusus lainnya (dst)	1	Unit	Digunakan Sendiri	1		Truck HINO PJU DA 8730 KJ	
1.3.2.02.001.009.001	alat angkutan darat bermotor lainnya lainnya (dst)	3	Unit	Digunakan Sendiri	3		VIAR (DA 578 KE, DA 5411 KU), Kaisar Triseda DA 5506 KO	
1.3.2.02.001.002.003	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	1	Unit	Digunakan Sendiri	1		Toyota Innova DA 1582 KJ	
1.3.2.02.001.003.007	kendaraan bermotor angkutan barang lainnya (dst)	1	Unit	Digunakan Sendiri	1		Truck HINO Taman DA 8729 KJ	
1.3.2.05.002.004.003	AC Windows	14	Unit	Digunakan Sendiri	14			
1.3.2.05.002.004.004	A.C. Split	2	Unit	Digunakan Sendiri	2			
1.3.2.10.001.002.002	Lap Top	11	Unit	Digunakan Sendiri	11			
1.3.2.10.001.002.003	Note Book	1	Unit	Digunakan Sendiri	1			
1.3.2.10.001.001.002	Mini Komputer	7	Unit	Digunakan Sendiri	7			
1.3.2.10.001.002.001	P.C Unit	3	Unit	Digunakan Sendiri	3			
1.3.2.10.001.002.010	Personal Komputer lainnya	1	Unit	Digunakan Sendiri	1			
1.3.2.08.001.041.062	Distiling Apparatus / Personal Komputer	1	Unit	Digunakan Sendiri	1			
1.3.2.10.002.003.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	16	Unit	Digunakan Sendiri	16			

Sumber : Pranata Barang dan Jasa Disperkimtan Tapin

1.4. Aspek Strategis Organisasi

Dalam rangka melaksanakan kegiatan prioritas, maka perlu diperhatikan beberapa aspek strategis yang mempengaruhi tercapainya tujuan organisasi yaitu :

- ✔ Tersedianya sumber daya aparatur yang profesional sesuai dengan kebutuhan organisasi.
- ✔ Tersedianya sumber daya sarana prasarana kantor sesuai dengan kebutuhan organisasi.
- ✔ Terlaksananya penanganan kawasan kumuh
- ✔ Terlaksananya peningkatan kualitas rumah tidak layak huni
- ✔ Terlaksananya pemenuhan pelayanan dasar di bidang perumahan rakyat
- ✔ Terlaksananya sertifikasi aset tanah pemerintah daerah
- ✔ Terlaksananya fasilitasi penanganan konflik-konflik pertanahan.

1.5. Identifikasi Permasalahan dan Isu Strategis berdasarkan Tugas dan Fungsi

1.5.1. Isu STrategis

Berdasarkan identifikasi analisis terhadap kinerja pelayanan Disperkimtan, permasalahan dan hambatan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi, capaian terhadap visi dan misi kepala daerah, capaian program nasional, tantangan dan peluang maka ditentukan isu strategis Disperkimtan sebagai berikut:

- ✔ Belum memadainya penyediaan sarana dan prasarana dasar permukiman dan masih terdapat potensi tumbuh kembangnya rumah yang tidak layak huni dan kawasan kumuh.
- ✔ Terbatasnya jangkauan Penerangan Jalan Umum (PJU)
- ✔ Proses pensertifikatan tanah aset milik Pemerintah Kabupaten Tapin berlangsung lama dan berbelit.
- ✔ Kompleksitas sengketa pertanahan di Kabupaten Tapin.
- ✔ Kurangnya pemahaman aparatur Pemeritah Daerah dan Desa serta masyarakat tentang hukum pertanahan yang memicu munculnya permasalahan tanah.

1.5.2. Permasalahan

Adapun permasalahan - permasalahan yang dihadapi di tahun anggaran 2022 adalah :

- ❶ Terbatasnya data dan sumber daya aparatur dibidang teknis.
- ❷ Drainase di lingkungan perumahan dan permukiman yang belum tertata dengan baik menyebabkan rawan banjir
- ❸ Sebagian besar perumahan di Kabupaten Tapin belum memiliki kejelasan hibah aset ke pemerintah daerah, sehingga Disperkimtan kesulitan dalam hal penanganan fasilitas umum di perumahan.
- ❹ Arsip kepemilikan tanah (asset) pada masing-masing SKPD atau instansi di lingkungan Pemda Tapin belum dikelola dengan baik sehingga proses pensertifikasian tanah terhambat dari segi kelengkapan administrasi dan batas tanah.

1.6. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Sakip Tahun 2020

Proses perkembangan nilai hasil evaluasi SAKIP Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Tapin terangkum sebagai berikut :

Tabel 1.5
Progres Nilai SAKIP Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan
Pertanahan Kabupaten Tapin

KOMPONEN YANG DINILAI	BOBOT	NILAI		
		2018	2019	2020
Perencanaan Kinerja	30,00	24,46	24,46	24,67
Pengukuran Kinerja	25,00	17,81	17,81	19,06
Pelaporan Kinerja	15,00	10,42	10,42	12,04
Evaluasi Internal	10,00	6,92	6,92	8,35
Capaian Kinerja	20,00	11,88	11,88	11,25
Nilai Hasil Evaluasi	100,00	71,49	71,49	75,37
TINGKAT AKUNTABILITAS KINERJA		BB	BB	BB

Beberapa tindak lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Nomor 700/011/LHE.AKIP/WIL.I/2021 Tanggal 26 Juli 2021 :

- Melakukan reviu terhadap RENSTRA yaitu pada Indikator Kinerja Utama (IKU) Disperkimtan Tapin berdasarkan Peraturan Bupati No. 20 Tahun 2020 tentang Perubahan Indikator Utama Perangkat Daerah (data dukung terlampir).
- Meningkatkan monitoring intern terhadap capaian Rencana Aksi yang telah ditetapkan, berupa laporan realisasi per sub kegiatan yang dibuat oleh masing-masing PPTK sub kegiatan dan dilakukan evaluasi dalam bentuk rapat monitoring bulanan (data dukung terlampir).
- Menyajikan informasi tentang analisis efisiensi penggunaan sumber daya di dalam dokumen LKIP.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1. Perencanaan Strategis

Berdasar pada kondisi daerah, potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang dalam pembangunan daerah dan mengacu pada visi pembangunan Kabupaten Tapin di dalam RPJMD tahun 2018-2023 yaitu **“Bersama Mewujudkan Tapin Maju, Sejahtera dan Agamis”**.

Tugas dan fungsi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan adalah pada misi ketiga yakni :

“Memantapkan pengelolaan infrastruktur dan lingkungan secara berkelanjutan” dengan **tujuan** : “Meningkatkan kualitas lingkungan hidup” dan **sasaran** : “Meningkatnya kualitas lingkungan perumahan dan kawasan permukiman”.

2.2. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dalam upaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, maka dilakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi.

Pedoman atas Indikator Kinerja Utama dalam memperkuat akuntabilitas ke dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia, telah diterbitkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah. Berdasarkan Perbup No. 20 Tahun 2020 tentang Perubahan Indikator Utama Perangkat Daerah.

Setelah melalui proses asistensi dan evaluasi SAKIP pada tahun 2021 yang di selenggarakan oleh Bapelitbang Kabupaten Tapin dengan narasumber Bpk. Ananda Juarsa dari Kemenpan RB Perubahan IKU Dinas Kawasan Permukiman dan Pertanahan adalah sebagai berikut.

SEBELUM			
NO.	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	
1	Berkurangnya Kawasan Kumuh	1.1.	Persentase Penurunan Kawasan Kumuh
2	Meningkatnya Kemanfaatan Ruang Terbuka Hijau	2.1.	Persentase Peningkatan Pertumbuhan Jumlah Pengunjung di Ruang Terbuka Hijau (RTH)
3	Tertanganinya Konflik Pertanahan	3.1.	Persentase penanganan konflik-konflik pertanahan
SESUDAH			
NO.	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	
1	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Perumahan dan Kawasan Permukiman	1.1.	Persentase Luas wilayah permukiman bebas kumuh
		1.2.	Persentase Rumah Layak Huni
		1.3.	Persentase perumahan yang berkualitas
2	Meningkatnya kualitas manajemen pertanahan	2.1.	Persentase tanah Pemerintah Kabupaten yang bersertifikat
		2.2.	Persentase penanganan konflik-konflik pertanahan

Adapun penjelasan lebih lanjut terkait makna indikator, cara perhitungan indikator, beserta kinerja turunan tersaji pada table 2.1. di bawah ini.

Tabel 2.1

Indikator Kinerja Utama Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan

SEBELUM						SESUDAH					
No.	Sasaran Strategis/Sasaran Outcome	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan (Makna Indikator, alasan pemilihan indikator, Cara Penghitungan Indikator)	Penanggung-jawab	Sumber Data	No.	Sasaran Strategis/Sasaran Outcome	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan (Makna Indikator, alasan pemilihan indikator, Cara Penghitungan Indikator)	Penanggung-jawab	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya penyediaan administrasi perkantoran, sarana prasarana aparatur dan laporan kinerja/keuangan serta dokumen perencanaan perangkat daerah	Rata-rata capaian kinerja kegiatan sekretariat	$\frac{\sum CP}{\sum PS} \times 100\%$ <p>Keterangan : CP = Jumlah capaian program sekretariat PS = Program sekretariat seluruhnya</p>	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Outcome /Output dan pihak terkait	1	Meningkatnya penyediaan administrasi perkantoran, sarana prasarana aparatur dan laporan kinerja/keuangan serta dokumen perencanaan perangkat daerah	Rata-rata capaian kinerja kegiatan sekretariat	$\frac{\sum CK}{\sum KS} \times 100\%$ <p>Keterangan : CK = Capaian Kegiatan sekretariat KS = Kegiatan sekretariat seluruhnya</p>	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Outcome /Output dan pihak terkait
	Meningkatnya penyediaan administrasi perkantoran, sarana prasarana aparatur dan laporan kinerja/keuangan dokumen perencanaan perangkat daerah	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu (%)	$\frac{\sum LR}{\sum LS} \times 100\%$ <p>Keterangan : LR = Laporan Ramping LS = Laporan Seluruhnya</p> <p>Jenis Laporan : 1 Laporan Keuangan 2 LPPD (Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah) 3 LKIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah) 4 LKPJ (Laporan Keterangan Pertanggungjawaban) 5 Laporan SPM 6 Renstra / Renja</p>	Sekretaris	Outcome /Output dan pihak terkait		Meningkatnya penyediaan administrasi perkantoran, sarana prasarana aparatur dan laporan kinerja/keuangan dokumen perencanaan perangkat daerah	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu (%)	$\frac{\sum LR}{\sum LS} \times 100\%$ <p>Keterangan : LR = Laporan Ramping LS = Laporan Seluruhnya</p> <p>Jenis Laporan : 1 Laporan Keuangan 2 LPPD (Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah) 3 LKIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah) 4 LKPJ (Laporan Keterangan Pertanggungjawaban) 5 Laporan SPM 6 Renstra / Renja</p>	Sekretaris	Outcome /Output dan pihak terkait
	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran (%)		$\frac{\sum UK}{\sum UKS} \times 100\%$ <p>Keterangan : UK = Unit Kerja yang mendapat pelayanan UKS = Unit Kerja Seluruhnya</p>	Sekretaris			Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran (%)		$\frac{\sum UK}{\sum UKS} \times 100\%$ <p>Keterangan : UK = Unit Kerja yang mendapat pelayanan UKS = Unit Kerja Seluruhnya</p>	Sekretaris	
	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik (%)		$\frac{\sum SPA}{\sum SPAS} \times 100\%$ <p>Keterangan : SPA = Sarana Prasarana Aparatur kondisi baik SPAS = Sarana Prasarana Aparatur seluruhnya</p>	Sekretaris			Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik (%)		$\frac{\sum SPA}{\sum SPAS} \times 100\%$ <p>Keterangan : SPA = Sarana Prasarana Aparatur kondisi baik SPAS = Sarana Prasarana Aparatur seluruhnya</p>	Sekretaris	

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah -2022
DISPERKIMTAN KABUPATEN TAPIN

SEBELUM						SESUDAH					
No.	Sasaran Strategis/Sasaran Outcome	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan (Makna Indikator, alasan pemilihan indikator, Cara Penghitungan Indikator)	Penanggung-jawab	Sumber Data	No.	Sasaran Strategis/Sasaran Outcome	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan (Makna Indikator, alasan pemilihan indikator, Cara Penghitungan Indikator)	Penanggung-jawab	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2	Berkurangnya kawasan kumuh	Prosentase Penurunan Kawasan Kumuh	$\frac{\sum LK1 - LK2}{\sum LW} \times 100\%$ Keterangan : LK1 = Luas Kawasan Kumuh Tahun Ini LK2 = Luas Kawasan Kumuh Tahun Lalu LW = Luas Wilayah	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Outcome /Output dan pihak terkait	2	Meningkatnya kualitas lingkungan perumahan dan Kawasan permukiman	Persentase Luas wilayah permukiman bebas kumuh	$\frac{\sum LWBK}{\sum LW} \times 100\%$ Keterangan : LWBK = Luas Wilayah Kawasan Permukiman bebas kumuh LW = Luas Wilayah Kawasan Permukiman	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Outcome /Output dan pihak terkait
								Persentase Rumah Layak Huni	$\frac{\sum RLH}{\sum RS} \times 100\%$ Keterangan : RLH = Rumah Layak Huni RS = Rumah Seluruhnya	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Outcome /Output dan pihak terkait
								Persentase perumahan yang berkualitas	$\frac{\sum PK}{\sum PS} \times 100\%$ Keterangan : PK = Perumahan Kualitas Baik PS = Perumahan Seluruhnya	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Outcome /Output dan pihak terkait
	Meningkatnya rumah layak huni	Rasio rumah tidak layak huni yang tertangani	$\frac{\sum RTLH}{\sum RS} \times 100\%$ Keterangan : RTLH = Rumah tdkLayak Huni yang ditangani RS = Rumah tidak layak huni Seluruhnya	Kabid Perumahan dan Kawasan Permukiman	Outcome /Output dan pihak terkait		Meningkatnya kawasan bebas kumuh	Persentase penanganan kawasan kumuh	$\frac{\sum LKn}{\sum LK} \times 100\%$ Keterangan : LKn = Luas Penanganan Kawasan Kumuh Tahun In LK = Luas Kawasan Kumuh (SK Kumuh)	Kabid Perumahan dan Kawasan Permukiman	Outcome /Output dan pihak terkait
	Meningkatnya fungsi prasarana sarana dan utilitas umum yang baik	Cakupan sarana dan prasarana lingkungan Kawasan dalam Kondisi Baik (%)	$\frac{\sum PSF}{\sum PSS} \times 100\%$ Keterangan : PSF = PSU yang ditangani dan berfungsi PSS = PSU yang ditangani Seluruhnya	Kabid Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum	Outcome /Output dan pihak terkait		Meningkatnya Rumah Layak Huni	Persentase Peningkatan kualitas Rumah Tidak Layak Huni	$\frac{\sum RTLH}{\sum RLH} \times 100\%$ Keterangan : RLH = Rumah tidak Layak Huni yang tertangani RTLH = Rumah tidak layak huni Seluruhnya	Kabid Perumahan dan Kawasan Permukiman	Outcome /Output dan pihak terkait
							Terpenuhinya pelayanan dasar di bidang Perumahan Rakyat	Persentase penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten	(Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun n / Jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani pada tahun n) x 100%	Kabid Perumahan dan Kawasan Permukiman	Outcome /Output dan pihak terkait
								Persentase fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten	(Jumlah Rumah Tangga Penerima Fasilitasi Penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan + Rumah Tangga Penerima Subsidi Uang Sewa + Rumah Tangga Penerima Penyediaan Rumah Layak Huni / Jumlah total rumah tangga terkena relokasi program Pemerintah Daerah yang memenuhi kriteria penerima pelayanan) x 100%	Kabid Perumahan dan Kawasan Permukiman	Outcome /Output dan pihak terkait
							Meningkatnya Prasarana Sarana dan Utilitas Perumahan dengan kondisi baik	Persentase PSU perumahan yang ditangani dengan kondisi baik	$\frac{\sum PT}{\sum PS} \times 100\%$ Keterangan : PT = PSU perumahan yang ditangani PS = Perumahan seluruhnya	Kabid Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum	Outcome /Output dan pihak terkait

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah -2022
DISPERKIMTAN KABUPATEN TAPIN

SEBELUM						SESUDAH					
No.	Sasaran Strategis/Sasaran Outcome	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan (Makna Indikator, alasan pemilihan indikator, Cara Penghitungan Indikator)	Penanggung-jawab	Sumber Data	No.	Sasaran Strategis/Sasaran Outcome	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan (Makna Indikator, alasan pemilihan indikator, Cara Penghitungan Indikator)	Penanggung-jawab	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3	Meningkatnya pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Prosentase peningkatan pertumbuhan jumlah pengunjung di Ruang Terbuka Hijau (RTH)	$\frac{\sum P1 - P2}{\sum P2} \times 100\%$ Keterangan : P1 = Pengunjung Tahun ini P2 = Pengunjung Tahun Lalu	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Outcome /Output dan pihak terkait	Berdasarkan pemetaan permen 90 Tahun 2019 Pengelolaan / pemeliharaan RTH dan Taman Kota di luar kawasan Rantau Baru menjadi kewenangan Dinas Lingkungan Hidup					
	Terpeliharanya taman kota dan RTH	Cakupan RTH dan Taman yang dikelola (%)	$\frac{\sum RTH}{\sum RTHS} \times 100\%$ Keterangan : RTH = Jumlah RTH & Taman yang dikelola RTHS = Jumlah RTH & Taman yang seluruhnya	Kabid Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum	Outcome /Output dan pihak terkait						
4	Tertanganinya konflik pertanahan	Prosentase penanganan konflik-konflik pertanahan	$\frac{\sum K1}{\sum K2} \times 100\%$ Keterangan : K1 = Konflik yang tertangani K2 = Konflik yang terdaftar	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Outcome /Output dan pihak terkait	3	Meningkatnya kualitas manajemen pertanahan	Persentase tanah Pemerintah Kabupaten yang bersertifikat	$\frac{\sum P1}{\sum P2} \times 100\%$ Keterangan : P1 = Jumlah tanah Pemkab yang bersertifikat P2 = Jumlah target tanah Pemkab yang akan disertifikasi	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Outcome /Output dan pihak terkait
								Persentase penanganan konflik-konflik pertanahan	$\frac{\sum K1}{\sum K2} \times 100\%$ Keterangan : K1 = Jumlah Konflik Pertanahan yang diselesaikan K2 = Jumlah Konflik Pertanahan	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Outcome /Output dan pihak terkait
	Meningkatnya pelayanan informasi pertanahan	Persentase cakupan data penguasaan, pemilikan, penggunaan dan informasi	$\frac{\sum P1}{\sum P2} \times 100\%$ Keterangan : P1 = Jumlah kecamatan yang terdata P2 = Jumlah kecamatan seluruhnya	Kabid Pertanahan	Outcome /Output dan pihak terkait		Meningkatnya tertib administrasi pertanahan	Persentase penataan administrasi Tanah pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah persil aset tanah bersertipikat/ Jumlah persil aset tanah pemda x 100	Kabid Pertanahan	Outcome /Output dan pihak terkait
	Meningkatnya advokasi bidang pertanahan	Persentase advokasi pertanahan yang berhasil (%)	$\frac{\sum L1}{\sum L2} \times 100\%$ Keterangan : L1 = Laporan persoalan pertanahan yang difasilitasi L2 = Jumlah laporan persoalan pertanahan	Kabid Pertanahan	Outcome /Output dan pihak terkait		Meningkatnya advokasi bidang pertanahan	Persentase penyelesaian sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	Jumlah pengaduan sengketa tanah garapan yang tertangani / jumlah pengaduan sengketa tanah garapan yang diterima x 100	Kabid Pertanahan	Outcome /Output dan pihak terkait
							Terpenuhinya kebutuhan pengadaan lahan	Persentase tanah yang dibebaskan sesuai kebutuhan lokasi	Jumlah lokasi lahan yang dibebaskan / jumlah lokasi kebutuhan lahan x 100	Kabid Pertanahan	Outcome /Output dan pihak terkait

2.3. Perjanjian Kinerja

Tujuan penyusunan Perjanjian Kinerja adalah:

1. Manifestasi komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja pemberi amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Berikut ini Penetapan kinerja / perjanjian kinerja tahun 2022 yang telah ditetapkan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Tapin :

Tabel 2.2
Ringkasan Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Tapin			
No.	Sasaran Strategis/Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Target
1	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Persentase Luas wilayah permukiman bebas kumuh	99,91%
		Persentase Rumah Layak Huni	83,52%
		Persentase perumahan yang berkualitas	2,63%
2	Meningkatnya kualitas manajemen pertanahan	Persentase tanah Pemerintah Kabupaten yang bersertifikat	100,00%
		Persentase penanganan konflik-konflik pertanahan	100,00%
Sekretariat			
No.	Sasaran Strategis/Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Target
1	Meningkatnya penyediaan administrasi perkantoran, sarana prasarana aparatur dan laporan kinerja/keuangan dokumen perencanaan perangkat daerah	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	100%
		Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi	100%
		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun	100%
		Rata-rata target capaian	100%
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian			
1	Terlaksananya penyediaan administrasi umum perangkat daerah	Jumlah dokumen laporan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	4
		Jumlah sub unit kerja yang mendapatkan penyediaan bahan logistik kantor	4
		Jumlah sub unit kerja yang mendapatkan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	4
		Jumlah dokumen laporan penyediaan	4
		Jumlah dokumen laporan fasilitasi kunjungan	4
		Jumlah sub unit kerja yang terfasilitasi penyelenggaraan rapat koordinasi dan sinkronisasi	4

2	Terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah sub unit kerja yang mendapatkan penyediaan jasa surat menyurat	4
		Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	12
		Jumlah sub unit kerja yang mendapatkan penyediaan jasa pelayanan umum kantor	4
3	Tersedianya penunjang operasional dan pemeliharaan barang milik daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	12
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	12
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12
		Terlaksananya Rehab Gedung Kantor	1
Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan			
1	Terpenuhinya penyediaan Administrasi Keuangan (Gaji dan Tunjangan Perangkat Daerah)	Waktu Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Disperkimtan Tapin	12
2	Terlaksananya penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Akhir Tahun tepat waktu	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1
		Jumlah Laporan Keuangan Semesteran SKPD	1
		Jumlah Laporan Keuangan Semesteran dan Akhir Tahun (Laporan)	2
3	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	3
		Jumlah Dokumen RKA-SKPD	1
		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1
		Jumlah Dokumen DPA-SKPD	1
		Jumlah Dokumen DPA Perubahan-SKPD	1
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD	4
Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1		
Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman			
No.	Sasaran Strategis/Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Target
1	Meningkatnya rumah layak huni	Rasio Rumah tidak Layak Huni yang tertangani	2,59%
		Persentase Peningkatan kualitas Rumah Tidak Layak Huni	
2	Meningkatnya kawasan bebas kumuh	Persentase penurunan kawasan kumuh	0,15%
3	Terpenuhinya pelayanan dasar di bidang Perumahan Rakyat	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten /kota	100%
		Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota	100%
Perencanaan Teknis			
1	Jumlah Dokumen Survey dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen	1
Perumahan			
1	Terlaksananya Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	Jumlah unit perbaikan RTLH di luar kawasan kumuh	125

Kawasan Permukiman			
1	Terlaksananya Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	1
		Jumlah Dokumen Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	1
2	Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi	Jumlah Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan	2
3	Terlaksananya Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah unit rehabilitasi rumah bagi korban bencana	23
		Jumlah unit Rusus yang dibangun untuk masyarakat terdampak	25
4	Tersedianya dokumen rencana penanganan kumuh	Jumlah Dokumen Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	1
5	Terlaksananya penanganan kawasan kumuh	Jumlah Renovasi / Rehabilitasi RTLH di Permukiman Kumuh	38
		Jumlah Dokumen Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi	1
6	Terlaksananya peningkatan kualitas RTLH di luar kawasan kumuh sesuai target penanganan	Jumlah unit perbaikan RTLH di luar kawasan kumuh	125
Bidang Prasarana Sarana dan Utilitas Umum			
No.	Sasaran Strategis/Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Target
1	Meningkatnya Prasarana Sarana dan Utilitas Perumahan dengan kondisi baik	Cakupan sarana dan prasarana lingkungan Kawasan dalam Kondisi Baik (%)	63,89%
		Persentase PSU perumahan yang ditangani dengan kondisi baik (%)	2,63%
2	Terpeliharanya Taman Kota dan RTH	Cakupan RTH dan Taman yang dikelola (%)	100%
Penyediaan Fasilitas PSU Perumahan			
1	Terlaksananya Penyediaan dan Fasilitas PSU	Persentase Rumah yang Dilayani Bantuan PSU pada Perumahan	90%
2	Terlaksananya Pemeliharaan dan Pengelolaan RTH (Kawasan Rantau Baru)	Persentase RTH Publik yang terpelihara dengan baik	100%
Monitoring dan Evaluasi PSU Perumahan			
1	Terlaksananya urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Persentase Developer Perumahan yang Menyerahkan Fasilitas Umum/Fasilitas Khusus	14%
2	Terlaksananya pemeliharaan PJU	Persentase pemeliharaan penerangan jalan	73%
Bidang Pertanian			
No.	Sasaran Strategis/Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Target
1	Meningkatnya advokasi bidang pertanian	Persentase advokasi pertanian yang berhasil (%)	100%
2	Meningkatnya tertib administrasi pertanian	Persentase penataan administrasi Tanah pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (%)	100%
3	Terpenuhinya kebutuhan pengadaan lahan	Persentase tanah yang dibebaskan sesuai kebutuhan lokasi (%)	100%
Pengaturan Penguasaan Tanah			
1	Terlaksananya sosialisasi bidang pertanian	Persentase Sosialisasi Sistem Pendaftaran Tanah	100%
		Persentase Penyuluhan hukum pertanian (kali)	100%
Penyelesaian Sengketa Tanah			
1	Terlaksananya fasilitasi persoalan	Jumlah laporan persoalan pertanian yang difasilitasi	100%
Penatagunaan Tanah			
1	Terlaksananya pengadministrasian Tanah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase usulan pensertifikatan Aset Tanah SKPD terverifikasi BPN	100%
2	Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah	Persentase tanah yang dibebaskan sesuai kebutuhan luas	100%

Dalam hal memaksimalkan pencapaian kinerja dikelompokkan program dan kegiatan pendukung sebagaimana dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.3
Program dan Kegiatan Pedukung Kinerja Utama TA 2022

No	Kinerja Utama		Pendukung		
	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Persentase Rumah Layak Huni	Program pengembangan perumahan	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
			Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha
		Persentase Luas wilayah permukiman bebas kumuh	Program Kawasan Permukiman	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh
				Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh
		Persentase perumahan yang berkualitas	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian
2	Meningkatnya kualitas manajemen pertanahan	Persentase penanganan konflik-konflik pertanahan	Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
			Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
		Persentase tanah Pemerintah Kabupaten yang bersertifikat	Program Penatagunaan Tanah	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota

2.4. Program Kegiatan dan Alokasi Anggaran

Tabel 2.4
Daftar Kegiatan Berdasarkan Renja (Murni dan Perubahan) TA 2022

KODE	URAIAN	DPA	DPPA	PERUBAHAN	%
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		22.166.486.783,00	30.735.750.877,00	8.569.264.094,00	38,66
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		5.485.100.183,00	5.799.620.876,00	314.520.693,00	5,73
1.04.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.105.000,00	10.105.000,00	0,00	0,00
1.04.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.365.000,00	2.365.000,00	0,00	0,00
1.04.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00
1.04.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00
1.04.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	0,00
1.04.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	0,00
1.04.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.160.000,00	2.160.000,00	0,00	0,00
1.04.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.080.000,00	1.080.000,00	0,00	0,00
1.04.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.874.086.584,00	2.890.412.377,00	16.325.793,00	0,57
1.04.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.870.066.584,00	2.886.392.377,00	16.325.793,00	0,57
1.04.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.010.000,00	2.010.000,00	0,00	0,00
1.04.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2.010.000,00	2.010.000,00	0,00	0,00
1.04.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.633.466.900,00	1.820.461.800,00	186.994.900,00	11,45
1.04.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	231.289.800,00	338.729.700,00	107.439.900,00	46,45
1.04.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	150.136.700,00	201.943.700,00	51.807.000,00	34,51
1.04.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	50.762.400,00	71.362.400,00	20.600.000,00	40,58
1.04.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	13.435.000,00	13.435.000,00	0,00	0,00
1.04.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	2.750.000,00	2.750.000,00	0,00	0,00
1.04.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.185.093.000,00	1.192.241.000,00	7.148.000,00	0,60
1.04.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	396.352.199,00	408.352.199,00	12.000.000,00	3,03
1.04.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	46.400.000,00	46.400.000,00	0,00	0,00
1.04.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	85.098.000,00	85.098.000,00	0,00	0,00
1.04.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	264.854.199,00	276.854.199,00	12.000.000,00	4,53
1.04.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	571.089.500,00	670.289.500,00	99.200.000,00	17,37
1.04.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	41.490.000,00	41.490.000,00	0,00	0,00
1.04.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	237.430.000,00	202.820.000,00	(34.610.000,00)	-14,58
1.04.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	42.739.500,00	42.739.500,00	0,00	0,00
1.04.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	48.550.000,00	48.550.000,00	0,00	0,00
1.04.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	200.880.000,00	334.690.000,00	133.810.000,00	66,61
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN		4.100.975.000,00	725.540.000,00	(3.375.435.000,00)	-82,31
1.04.02.2.01	Pendataan Penyediaan dan rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	121.860.000,00	217.790.000,00	95.930.000,00	78,72
1.04.02.2.01.01	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	95.930.000,00	191.860.000,00	95.930.000,00	100,00
1.04.02.2.01.05	Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	25.930.000,00	25.930.000,00	0,00	0,00
1.04.02.2.02	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	30.900.000,00	30.900.000,00	0,00	0,00
1.04.02.2.02.01	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	30.900.000,00	30.900.000,00	0,00	0,00
1.04.02.2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	3.948.215.000,00	476.850.000,00	(3.471.365.000,00)	-87,92
1.04.02.2.03.01	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	476.850.000,00	476.850.000,00	0,00	0,00
1.04.02.2.03.05	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	3.471.365.000,00	0,00	(3.471.365.000,00)	-100,00

KODE	URAIAN	DPA	DPPA	PERUBAHAN	%
PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN		477.810.000,00	885.160.000,00	407.350.000,00	85,25
1.04.03.2.02	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	187.410.000,00	187.410.000,00	0,00	0,00
1.04.03.2.02.01	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	187.410.000,00	187.410.000,00	0,00	0,00
1.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	290.400.000,00	697.750.000,00	407.350.000,00	140,27
1.04.03.2.03.02	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	254.600.000,00	689.100.000,00	434.500.000,00	170,66
1.04.03.2.03.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	35.800.000,00	8.650.000,00	(27.150.000,00)	-75,84
PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH		555.400.000,00	4.471.895.000,00	3.916.495.000,00	705,17
1.04.04.2.01	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	555.400.000,00	4.471.895.000,00	3.916.495.000,00	705,17
1.04.04.2.01.01	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	505.950.000,00	2.899.700.000,00	2.393.750.000,00	473,12
1.04.04.2.01.02	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	49.450.000,00	1.572.195.000,00	1.522.745.000,00	3079,36
PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)		11.547.201.600,00	18.853.535.001,00	7.306.333.401,00	63,27
1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	11.547.201.600,00	18.853.535.001,00	7.306.333.401,00	63,27
1.04.05.2.01.01	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	101.860.000,00	101.860.000,00	0,00	0,00
1.04.05.2.01.02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	11.394.411.600,00	18.700.745.001,00	7.306.333.401,00	64,12
1.04.05.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	50.930.000,00	50.930.000,00	0,00	0,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN		60.027.574.693,00	4.962.555.000,00	(55.065.019.693,00)	-91,73
PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN		230.375.000,00	253.825.000,00	23.450.000,00	10,18
2.10.04.2.01	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	230.375.000,00	253.825.000,00	23.450.000,00	10,18
2.10.04.2.01.02	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	230.375.000,00	253.825.000,00	23.450.000,00	10,18
PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN		58.945.584.693,00	4.121.400.000,00	(54.824.184.693,00)	-93,01
2.10.05.2.01	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	58.945.584.693,00	4.121.400.000,00	(54.824.184.693,00)	-93,01
2.04.1.04.01.01.19.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	58.945.584.693,00	4.121.400.000,00	(54.824.184.693,00)	-93,01
PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH		851.615.000,00	587.330.000,00	(264.285.000,00)	-31,03
2.10.10.2.01	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	851.615.000,00	587.330.000,00	(264.285.000,00)	-31,03
2.10.10.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	743.550.000,00	436.650.000,00	(306.900.000,00)	-41,27
2.10.10.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	108.065.000,00	150.680.000,00	42.615.000,00	39,43
JUMLAH		82.194.061.476,00	35.698.305.877,00	(46.495.755.599,00)	-56,57

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang terjadi (performance result) atau realisasi dengan kinerja yang diharapkan (performance plan) atau target kinerja yang diperjanjikan dalam dokumen perjanjian kinerja tahun 2022. Perbandingan menghasilkan celah kinerja (performance gap) yang kemudian dianalisis untuk mengetahui penyebabnya. Jika ada kekurangan maka ditetapkan strategi untuk meningkatkan kinerja di masa datang (performance improvement). Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin berhasil atau semakin rendah realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin tidak berhasil, dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

NO.	RENTANG CAPAIAN	KATEGORI CAPAIAN
1	Lebih dari 100 %	Baik Sekali (BS)
2	Lebih dari 75% s.d 100%	Baik (B)
3	55% s.d 75%	Cukup (C)
4	Kurang dari 55 %	Kurang (K)

3.1.1. Capaian Indikator Kinerja Utama

Perbandingan antara target kinerja dan realisasi kinerja tahun ini (2021) berdasarkan Pengukuran kinerja pada program dan kegiatan dapat di lihat pada Tabel di bawah ini :

Tabel 3.1
Realisasi dan Capaian Target Kinerja Utama
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Tapin Tahun 2022

No.	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Tapin				
	Sasaran Strategis/Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Perumahan dan Kawasan Permukiman	a. Persentase Luas wilayah permukiman bebas kumuh	99,91%	97,69%	97,78%
		b. Persentase Rumah Layak Huni	83,52%	89,02%	106,59%
		c. Persentase perumahan yang berkualitas	2,63%	2,17%	82,66%
2	Meningkatnya kualitas manajemen pertanahan	a. Persentase tanah Pemerintah Kabupaten yang bersertifikat	100,00%	24,31%	24,31%
		b. Persentase penanganan konflik-konflik pertanahan	100,00%	100,00%	100,00%
Rata - rata					82,27%

1. Sasaran strategis : Meningkatnya Kualitas Lingkungan Perumahan dan Kawasan Permukiman.

dengan indikator dan rumus perhitungan sebagai berikut :

No.	Sasaran Strategis/Sasaran Outcome	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan (Makna Indikator, alasan pemilihan indikator, Cara Penghitungan Indikator)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya kualitas lingkungan perumahan dan Kawasan permukiman	Persentase Luas wilayah permukiman bebas kumuh	$\frac{\sum \text{LWBK}}{\sum \text{LW}} \times 100\%$ <p>Keterangan : LWBK = Luas Wilayah Kawasan Permukiman bebas kumuh LW = Luas Wilayah Kawasan Permukiman</p>
		Persentase Rumah Layak Huni	$\frac{\sum \text{RLH}}{\sum \text{RS}} \times 100\%$ <p>Keterangan : RLH = Rumah Layak Huni RS = Rumah Seluruhnya</p>
		Persentase perumahan yang berkualitas	$\frac{\sum \text{PK}}{\sum \text{PS}} \times 100\%$ <p>Keterangan : PK = Perumahan Kualitas Baik PS = Perumahan Seluruhnya</p>

Tabel 3.2
Realisasi dan Capaian Sasaran Pertama Meningkatnya Kualitas Lingkungan Perumahan dan Kawasan Permukiman

No.	Capaian Realisasi Kinerja				
	Sasaran Strategis/Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Perumahan dan Kawasan Permukiman	a. Persentase Luas wilayah permukiman bebas kumuh	99,91%	97,69%	97,78%
		b. Persentase Rumah Layak Huni	83,52%	89,02%	106,59%
		c. Persentase perumahan yang berkualitas	2,63%	2,13%	80,99%
Rata - rata					95,12%

Perhitungan capaian kinerja di tahun anggaran 2022 berdasarkan realisasi program/kegiatan dan perhitungan indikator adalah sebagai berikut :

1. Persentase Luas wilayah permukiman bebas kumuh

- 🔴 Luas wilayah kawasan permukiman (perkotaan) : 6327,85 ha
- 🔴 Luas kawasan kumuh kota Rantau berdasarkan SK Bupati Tapin No.188.45/217/KUM/2022 : 146,5 ha

🔴 Luas penanganan kawasan kumuh TA 2022 : 0,076 ha
 LW = 6327,85 ha
 LWBK = 6327,85 – (146,5-0,318) = 6181,67

$$\frac{6181,67}{6327,85} \times 100\% = 97,69\%$$

2. Persentase Rumah Layak Huni

Capaian indikator ini dihitung berdasarkan penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) .

- 🔴 Jumlah Rumah di Kabupaten Tapin berdasarkan dokumen RP3KP: 55.794 unit
- 🔴 Jumlah RTLH : 6288 unit (survey 2022)
- 🔴 Jumlah penangan RTLH tahun 2022 : 163 Unit
- 🔴 RTLH setelah penanganan : 6288 – 163 = 6125 unit

RS = 55.794 Unit
 RLH = 55.794 – 6125 = 49.669 Unit

$$\frac{49669,00}{55794,00} \times 100\% = 89,02\%$$

3. Persentase perumahan yang berkualitas

Perhitungan indikator ini diambil dari jumlah perumahan dengan fasilitas umum kualitas baik yang telah diserahkan kepada pemerintah daerah di tahun 2022 dibagi dengan jumlah perumahan yang terdata di tahun 2022.

PK = 1 Perumahan
 PS = 47 Perumahan

$$\frac{1}{47} \times 100\% = 2,13\%$$

Dari hasil capaian pengukuran kinerja secara mandiri (self assessment) terhadap 3 (Tiga) Indikator Kinerja Utama Disperkimtan Kabupaten Tapin Tahun 2022 di atas, maka dapat dianalisis pencapaian kinerja sasaran pertama “Meningkatnya Kualitas Lingkungan Perumahan dan Kawasan Permukiman” pada Tahun 2022 dikategorikan kedalam kategori pencapaian 75%-100% atau “Baik” dengan rata-rata capaian 95,12%.

2. Sasaran strategis: Meningkatnya kualitas manajemen pertanahan

No.	Sasaran Strategis/Sasaran Outcome	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan (Makna Indikator, alasan pemilihan indikator, Cara Penghitungan Indikator)
(1)	(2)	(3)	(4)
2	Meningkatnya kualitas manajemen pertanahan	Persentase tanah Pemerintah Kabupaten yang bersertifikat	$\frac{\sum P1}{\sum P2} \times 100\%$ <p>Keterangan : P1 = Jumlah tanah Pemkab yang bersertifikat P2 = Jumlah target tanah Pemkab yang akan disertifikasi</p>
		Persentase penanganan konflik-konflik pertanahan	$\frac{\sum K1}{\sum K2} \times 100\%$ <p>Keterangan : K1 = Jumlah Konflik Pertanahan yang diselesaikan K2 = Jumlah Konflik Pertanahan</p>

Tabel 3.3
Realisasi dan Capaian Sasaran Kedua
Meningkatnya Kualitas Manajemen Pertanahan

No.	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Tapin				
	Sasaran Strategis/Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
2	Meningkatnya kualitas manajemen pertanahan	a. Persentase tanah Pemerintah Kabupaten yang bersertifikat	100,00%	24,31%	24,31%
		b. Persentase penanganan konflik-konflik pertanahan	100,00%	100,00%	100,00%
Rata - rata					62,16%

Perhitungan capaian kinerja di tahun anggaran 2022 berdasarkan realisasi kegiatan dan perhitungan indikator adalah sebagai berikut :

1. Persentase tanah Pemerintah Kabupaten yang bersertifikat

- ✔ Total Persil tanah pemda = 1662 persil
- ✔ Kondisi awal sertifikat = 138 persil
- ✔ Capaian sertipikasi 2020 = 18 persil
- ✔ Capaian sertipikasi 2021 = 220 persil
- ✔ Capaian sertipikasi 2022 = 30 persil

$$P1 = 138 + 18 + 220 + 30$$

$$= 404 \text{ persil}$$

$$\frac{404}{1662} \times 100 = 24,31\%$$

$$P2 = 1662 \text{ persil}$$

Capaian 24,31 % masih jauh dari target yang ditentukan, Hal ini disebabkan oleh berbagai kendala dilapangan seperti :

- ❖ Ukuran luas tanah antara data KIB A/SPPF dan ukuran di lapangan berbeda;
- ❖ Petugas dari SKPD terkait masih banyak belum bisa menunjukan patok batas aset tanah;
- ❖ Pemberkasan administrasi masih kurang lengkap (SPPF Asli, surat pernyataan aset Kepala SKPD, tanda tangan Lurah/Kepala Desa setempat serta saksi-saksi);
- ❖ Berkas aset tanah yang diajukan pensertifikatan mengalami keterlambatan dalam kelengkapan data yuridis seperti status penguasaan bidang tanah pemegang hak atau pihak yang menguasai, disamping itu juga adanya pergantian/mutasi pejabat yang membidangi urusan aset BMD/tanah baik di SKPD maupun instansi terkait sehingga koordinasi menjadi kurang optimal;
- ❖ Untuk berkas pengajuan sertifikasi pengukuran ruas jalan masih belum dapat dilengkapi dikarenakan kendala di batas wilayah desa untuk tanda tangan Kepala desa setempat dan nama jalan dengan data KIB yang tidak sesuai.
- ❖ Dokumen asal usul perolehan sebagian tanah aset masih belum jelas dan lengkap sehingga pengukuran di lapangan menjadi terhambat.

2. Persentase penanganan konflik-konflik pertanahan

Kegiatan penyelesaian sengketa pertanahan ini dilaksanakan berdasarkan laporan atau pengaduan mengenai permasalahan pertanahan, yang kemudian upaya penyelesaian permasalahan di fasilitasi dan di mediasi oleh Tim Koordinasi dan Fasilitasi Konflik – Konflik Agraria, sehingga Capaian Serapan anggaran tidak dapat di perkirakan karena tergantung dari adanya laporan atau pengaduan permasalahan pertanahan.

Untuk tahun 2022 tidak ada pengaduan/ laporan tentang permasalahan/sengketa/konflik yang masuk ke Bidang Pertanahan Disperkimtan Tapin.

$$\begin{array}{l} K1 = 0 \text{ Konflik} \\ K2 = 0 \text{ Konflik} \end{array} \quad \frac{0}{0} \times 100 = 0\%$$

Dari hasil capaian pengukuran kinerja secara mandiri (self assessment) terhadap 2 (Dua) Indikator Kinerja Utama Disperkimtan Kabupaten Tapin Tahun 2022, maka dapat dianalisis pencapaian kinerja Sasaran Kedua “Meningkatnya Kualitas Manajemen Pertanahan” pada Tahun 2022 dikategorikan kedalam kategori pencapaian dengan rata-rata capaian 55% s.d. 75% atau “Cukup” dengan capaian 62,16%.

Hasil capaian pengukuran terhadap keseluruhan 5 (lima) Indikator Kinerja Utama Disperkimtan Kabupaten Tapin pada tahun 2022 disajikan pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.4
Capaian Realisasi Kinerja dan Keuangan Indikator Kinerja Utama (IKU)

No.	Capaian Realisasi Kinerja					Capaian Realisasi Keuangan				
	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian	Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Perumahan dan Kawasan Permukiman	a. Persentase Luas wilayah permukiman bebas kumuh	99,91%	97,69%	97,78%	Program kawasan permukiman	1. Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	187.410.000,00	186.088.000,00	99,29%
							1.1. Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	187.410.000,00	186.088.000,00	99,29%
							2. Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	697.750.000,00	685.035.000,00	98,18%
							2.1. Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	689.100.000,00	685.035.000,00	99,41%
							2.2. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	8.650.000,00	-	0,00%
		b. Persentase Rumah Layak Huni	83,52%	89,02%	106,59%	Program perumahan dan kawasan permukiman kumuh	1. Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	4.675.895.000,00	4.651.170.000,00	99,47%
							1.1. Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	3.103.700.000,00	3.097.225.000,00	99,79%
							1.2. Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	1.572.195.000,00	1.553.945.000,00	98,84%
		c. Persentase perumahan yang berkualitas	2,63%	2,13%	80,99%	Program peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU)	1. Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	18.853.535.001,00	15.496.623.130,00	82,19%
							1.1. Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	101.860.000,00	-	0,00%
							1.2. Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	18.700.745.001,00	15.496.623.130,00	82,87%
							1.3. Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	50.930.000,00	-	0,00%
							Rata - rata capaian kinerja			
						Rata - rata realisasi keuangan sub Kegiatan				60,03%

No.	Capaian Realisasi Kinerja					Capaian Realisasi Keuangan				
	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian	Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian
Meningkatnya kualitas manajemen pertanahan	a.	Persentase tanah Pemerintah Kabupaten yang bersertifikat	100,00%	24,31%	24,31%	Program penatagunaan tanah	1. Penggunaan Tanah yang Hambarannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	587.330.000,00	291.772.000,00	49,68%
							1.1. Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	436.650.000,00	150.965.000,00	34,57%
							1.2. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	150.680.000,00	140.807.000,00	93,45%
	b.	Persentase penanganan konflik-konflik pertanahan	100,00%	100,00%	100,00%	Program penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	1. Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	4.121.400.000,00	3.615.629.000,00	87,73%
							1.1. Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	4.121.400.000,00	3.615.629.000,00	87,73%
						Program penyelesaian sengketa tanah garapan	1. Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	253.825.000,00	233.514.000,00	92,00%
							1.1. Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	253.825.000,00	233.514.000,00	92,00%
	Rata - rata capaian kinerja					62,16%	Rata - rata realisasi keuangan kegiatan			
						Rata - rata realisasi keuangan sub Kegiatan				76,94%

Tabel 3.5
Capaian Realisasi Perjanjian Kinerja Eselon III

No.	Kinerja Utama	Realisasi Kinerja			Realisasi Keuangan				
		Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian	Program	Anggaran	Realisasi	Capaian
Sekretariat									
1	Meningkatnya penyediaan administrasi perkantoran, sarana prasarana aparatur dan laporan kinerja/keuangan dokumen perencanaan perangkat daerah	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	100,00%	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	5.799.620.876,00	5.275.665.239,00	90,97%
		Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100%	100%	100,00%				
		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu	100%	100%	100,00%				
		Rata-rata target capaian	100%	100%	100,00%				
Rata - rata Capaian Kinerja					100,00%	Rata - rata Capaian Keuangan			90,97%
Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman									
1	Meningkatnya rumah layak huni	Rasio Rumah tidak Layak Huni yang tertangani	2,59%	2,59%	100,00%	Program perumahan dan kawasan permukiman kumuh	4.675.895.000,00	4.651.170.000,00	99,47%
		Persentase Peningkatan kualitas Rumah Tidak Layak Huni	2,59%	2,59%	100,00%				
2	Meningkatnya kawasan bebas kumuh	Persentase penurunan kawasan kumuh	0,15%	0,15%	100,00%	Program kawasan permukiman	885.160.000,00	871.123.000,00	98,41%
3	Terpenuhinya pelayanan dasar di bidang Perumahan Rakyat	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten /kota	100,00%	100,00%	100,00%	Program pengembangan perumahan	725.540.000,00	0,00	0,00%
		Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota	100,00%	100,00%	100,00%				
Rata - rata Capaian Kinerja					100,00%	Rata - rata Capaian Keuangan			65,96%
Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU)									
1	Meningkatnya Prasarana Sarana dan Utilitas Perumahan dengan kondisi baik	Cakupan sarana dan prasarana lingkungan Kawasan dalam Kondisi Baik (%)	63,89%	66,87%	104,67%	Program peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU)	18.853.535.001,00	15.496.623.130,00	82,19%
		Persentase PSU perumahan yang ditangani dengan kondisi baik (%)	2,63%	2,13%	80,99%				
2	Terpeliharanya Taman Kota dan RTH	Cakupan RTH dan Taman yang dikelola (%)	100%	100%	100,00%				
Rata - rata Capaian Kinerja					95,22%	Rata - rata Capaian Keuangan			82,19%
Bidang Pertanian									
1	Meningkatnya advokasi bidang pertanian	Persentase advokasi pertanian yang berhasil (%)	100,00%	100%	100,00%	Program penyelesaian sengketa tanah garapan	253.825.000,00	233.514.000,00	92,00%
2	Meningkatnya tertib administrasi pertanian	Persentase penataan administrasi Tanah pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (%)	100,00%	42,23%	42,23%	Program penatagunaan tanah	587.330.000,00	291.772.000,00	49,68%
3	Terpenuhinya kebutuhan pengadaan lahan	Persentase tanah yang dibebaskan sesuai kebutuhan lokasi (%)	100,00%	100,00%	100,00%	Program penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	4.121.400.000,00	3.615.629.000,00	87,73%
Rata - rata Capaian Kinerja					80,74%	Rata - rata Capaian Keuangan			76,47%

Tabel 3.6
Capaian Realisasi Perjanjian Kinerja Eselon IV

Realisasi Kinerja (Sekretariat)						Realisasi Keuangan			
No.	Sasaran Strategis/Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian	Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian									
1	Terlaksananya penyediaan administrasi umum perangkat daerah	Tersedianya Jasa Administrasi Perkantoran	12	12	100,00%	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.820.461.800,00	1.661.982.459,00	91,29%
		Jumlah dokumen laporan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	4	4	100,00%	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	338.729.700,00	318.439.700,00	94,01%
		Jumlah sub unit kerja yang mendapatkan penyediaan bahan logistik kantor	4	4	100,00%	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	201.943.700,00	150.058.400,00	74,31%
		Jumlah sub unit kerja yang mendapatkan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	4	4	100,00%	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	71.362.400,00	64.497.568,00	90,38%
		Jumlah dokumen laporan penyediaan	4	4	100,00%	Penyediaan Bahan/Material	13.435.000,00	10.775.000,00	80,20%
		Jumlah dokumen laporan fasilitas kunjungan tamu	4	4	100,00%	Fasilitas Kunjungan Tamu	2.750.000,00	1.260.000,00	45,82%
		Jumlah sub unit kerja yang terfasilitasi penyelenggaraan rapat koordinasi dan sinkronisasi	4	4	100,00%	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.192.241.000,00	1.116.951.791,00	93,69%
2	Terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Tersedianya sumber daya, peralatan dan mesin perkantoran	12	12	100,00%	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	408.352.199,00	300.614.039,00	73,62%
		Jumlah sub unit kerja yang mendapatkan penyediaan jasa surat menyurat	4	4	100,00%	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	46.400.000,00	13.000.000,00	28,02%
		Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	12	12	100,00%	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	85.098.000,00	47.008.039,00	55,24%
		Jumlah sub unit kerja yang mendapatkan penyediaan jasa pelayanan umum kantor	4	4	100,00%	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	276.854.199,00	240.606.000,00	86,91%
3	Tersedianya penunjang operasional dan pemeliharaan barang milik daerah	Tersedianya penunjang operasional dan pemeliharaan barang milik daerah	12	12	100,00%	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	670.289.500,00	583.940.688,00	87,12%
		Jumlah kendaraan Dinas jabatan yang dipelihara	1	1	100,00%	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	41.490.000,00	34.970.854,00	84,29%
		Jumlah kendaraan Dinas operasional yang dipelihara	16	16	100,00%	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	202.820.000,00	162.647.227,00	80,19%
		Jumlah unit yang dipelihara	37	37	100,00%	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	42.739.500,00	30.366.919,00	71,05%
		Jumlah bangunan gedung kantor yang dipelihara/rehabilitasi	1	1	100,00%	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	48.550.000,00	43.785.938,00	90,19%
		Luas Pemeliharaan/rehabilitasi	450	450	100,00%	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	334.690.000,00	312.169.750,00	93,27%
Rata - rata Capaian Kinerja					100,00%	Rata - rata Capaian Keuangan		77,62%	

Realisasi Kinerja (Sekretariat)						Realisasi Keuangan			
No.	Sasaran Strategis/Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian	Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian
Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan									
1	Terlaksananya administrasi gaji, tunjangan dan pelaporan	Waktu penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Disperkimtan Tapin	12	12	100,00%	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.890.412.377,00	2.726.368.053,00	94,32%
						Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.886.392.377,00	2.722.348.053,00	94,32%
		Jumlah laporan keuangan semesteran dan akhir tahun (Laporan)	2	2	100,00%	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.010.000,00	2.010.000,00	100,00%
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	2.010.000,00	2.010.000,00	100,00%
2	Terlaksananya Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	3	3	100,00%	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.105.000,00	2.760.000,00	27,31%
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.365.000,00	-	0,00%
		Jumlah Dokumen RKA SKPD	1	1	100,00%	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.100.000,00	-	0,00%
		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	1	100,00%	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.100.000,00	-	0,00%
		Jumlah Dokumen DPA - SKPD	1	1	100,00%	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.150.000,00	600.000,00	52,17%
		Jumlah Dokumen DPA - Perubahan SKPD	1	1	100,00%	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1.150.000,00	-	0,00%
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4	4	100,00%	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	2.160.000,00	2.160.000,00	100,00%
		Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	1	100,00%	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.080.000,00	-	0,00%
Rata - rata Capaian Kinerja					100,00%	Rata - rata Capaian Keuangan			69,33%

Tabel 3.7
Capaian Realisasi Perjanjian Kinerja Staf (Pelaksana)

No.	Sasaran Strategis/Kinerja Utama	Realisasi Kinerja (Sekretariat)			Realisasi Keuangan				
		Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian	Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian
Pranata Barang dan Jasa									
1	Tersedianya penunjang operasional dan pemeliharaan barang milik daerah	Tersedianya penunjang operasional dan pemeliharaan barang milik daerah	12	12	100,00%	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	670.289.500,00	583.940.688,00	87,12%
		Jumlah kendaraan Dinas jabatan yang dipelihara	1	1	100,00%	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	41.490.000,00	34.970.854,00	84,29%
		Jumlah kendaraan Dinas operasional yang dipelihara	16	16	100,00%	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	202.820.000,00	162.647.227,00	80,19%
		Jumlah unit yang dipelihara	37	37	100,00%	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	42.739.500,00	30.366.919,00	71,05%
		Jumlah bangunan gedung kantor yang dipelihara/rehabilitasi	1	1	100,00%	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	48.550.000,00	43.785.938,00	90,19%
		Luas Pemeliharaan/rehabilitasi	450	450	100,00%	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	334.690.000,00	312.169.750,00	93,27%
Rata - rata Capaian Kinerja					100,00%	Rata - rata Capaian Keuangan			84,35%

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2022 capaian program dan kegiatan pendukung Sasaran Strategis Pertama : **Meningkatnya Kualitas Lingkungan Perumahan dan Kawasan Permukiman** adalah sebagai berikut :

a. Program Kawasan Permukiman

Sasaran utama program ini adalah pada penanganan kawasan kumuh di Kabupaten/kota. Pada Tahun 2022 Disperkimtan Tapin melalui sub unit bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman menangani kawasan kumuh sesuai Keputusan Bupati Tapin Nomor 188.45/217/KUM/2022 tentang Penetapan Lokasi Permukiman Kumuh Kota Rantau. Outcome dari program ini adalah meningkatnya kawasan bebas kumuh dengan indikator Persentase Penanganan Kawasan Kumuh (%), realisasi 0,15% dari target 0,15% atau dengan capaian di akhir TA sebesar 100% . Perhitungan diambil dari luas bangunan peningkatan kualitas RTLH tahun sebelumnya ditambah dengan penanganan RTLH tahun 2022 sebanyak 38 unit dengan ukuran per unit 4 x 5 = 20 m2.

Jumlah Pagu DPPA sebesar **Rp. 885.160.000,00**. Pada akhir Tahun Anggaran 2022 realisasi penyerapan dana **Rp. 871.123.000,00** atau **98,41%** dengan sisa Anggaran **Rp. 14.037.000,00**.

Tabel 3.8
Capaian Realisasi Kinerja dan Keuangan Program Kawasan permukiman

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA & ANGGARAN 2022		REALISASI KINERJA & ANGGARAN		CAPAIAN KINERJA & ANGGARAN	
		4	5	6	7		
2	3	K	RP	K	RP	K	RP (%)
PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase penurunan kawasan kumuh	0,15	885.160.000,00	0,15	871.123.000,00	100,00	98,41
Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Tersedianya dokumen rencana penanganan kumuh	100,00	187.410.000,00	100,00	186.088.000,00	100,00	92,11
Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	1,00	187.410.000,00	1,00	186.088.000,00	100,00	99,29
Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Terlaksananya penanganan kawasan kumuh	12,00	697.750.000,00	12,00	685.035.000,00	100,00	96,99
Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Renovasi/Rehabilitasi RTLH di Permukiman Kumuh	38,00	689.100.000,00	38,00	685.035.000,00	100,00	99,90
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman kumuh	Jumlah dokumen laporan koordinasi dan sinkronisasi	0,00	8.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rata - Rata Capaian Kinerja Kegiatan						100,00	94,55
Rata - Rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan						66,67	64,00
Predikat Kinerja Kegiatan						B	B

URAIAN	2021 (57 Unit)		2022 (38 Unit)	
Luas permukiman perkotaan (LW)	820,26	ha	820,26	ha
SK kumuh perkotaan (Keputusan Bupati Tapin No. 188.45/056/KUM/2016 diperbaharui No. 188.45/217/KUM/2022)	14,62	ha	146,5	ha
	1,78	%	17,86	%
Kaw permukiman perkotaan bebas kumuh	805,64	ha	673,76	ha
Penanganan kumuh berdasarkan luas rumah yang ditangani (4x5) per unit	0,137	ha	0,076	ha
	805,93	ha	673,84	ha
	98,25	%	82,15	%
PERSENTASE PENURUNAN KAWASAN KUMUH	1,99	%	0,15	%

b. Program Pengembangan Perumahan

Program ini merupakan program yang ditujukan untuk penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal di bidang Perumahan Rakyat. Jumlah Pagu DPPA sebesar Rp. 725.540.000,00. Pada akhir Tahun Anggaran 2022 realisasi penyerapan dana Rp. 0 atau 0% dengan sisa Anggaran Rp. 725.540.000,00 dikarenakan pada tahun 2022 di wilayah pemerintah kabupaten tidak terdapat bencana yang bersifat masif, dan tidak ada bencana yang ditetapkan sebagai bencana daerah baik berupa SK Bencana Alam maupun laporan resmi lainnya sehingga tidak ada realisasi penyediaan dan rehabilitasi rumah bagi korban bencana . Pada tahun 2022 juga tidak ada relokasi program pemerintah sehingga pada indikator fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota tidak ada realisasi relokasi atau sama dengan nol.

Tabel 3.9
Capaian Program Pengembangan Perumahan

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA & ANGGARAN 2022		REALISASI KINERJA & ANGGARAN		CAPAIAN KINERJA & ANGGARAN	
		4		5		6	
2	3	K	RP	K	RP	K	RP (%)
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten /kota	100,00		100,00		100,00	
	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota	100,00	725.540.000,00	100,00	0,00	100,00	100,00
Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Terlaksananya relokasi Hunian	0,00	476.850.000,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah unit rehabilitasi rumah bagi korban bencana	0,00	476.850.000,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Rusus yang dibangun untuk masyarakat terdampak	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Rata - Rata Capaian Kinerja Kegiatan						100,00	0,00
Rata - Rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan						100,00	0,00
Predikat Kinerja Kegiatan						B	K

c. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman

Sasaran utama program ini adalah pada penanganan Rumah tidak layak huni. Outcome program ini adalah meningkatnya Rumah Layak Huni dengan indikator Rasio rumah tidak layak huni yang tertangani dan Presentase peningkatan kualitas rumah tidak layak huni realisasi 2,59% dari target 2,59%. Target sebesar 2,59% merupakan nilai dari target PK Perubahan 2022, pada perubahan anggaran tahun 2022 dialokasikan penambahan pagu untuk penanganan RTLH pada lokasi rawan stunting berdasarkan SK Bupati Tapin No. 188.45/084/KUM/2021 tanggal 16 April 2021 dan Penanganan RTLH pada lokasi Kemiskinan Ekstrim.

Tabel 3.10
Capaian Program Perumahan dan Kawasan Permukiman

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA & ANGGARAN 2022		REALISASI KINERJA & ANGGARAN		CAPAIAN KINERJA & ANGGARAN	
		4	5	5	6		
2	3	K	RP	K	RP	K	RP (%)
PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Rasio Rumah tidak Layak Huni yang tertangani	2,59	4.675.895.000,00	2,59	4.651.170.000,00	100,00	99,47
	Persentase Peningkatan kualitas Rumah Tidak Layak Huni	2,59		2,59		100,00	
Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	12,00	4.675.895.000,00	12,00	4.651.170.000,00	100,00	99,32
Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Terlaksananya Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	125,00	3.103.700.000,00	125,00	3.097.225.000,00	100,00	99,79
Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Terlaksananya pendampingan/Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat diPermukiman Kumuh	1,00	1.572.195.000,00	1,00	1.553.945.000,00	100,00	98,84
Rata - Rata Capaian Kinerja Kegiatan						100,00	95,32
Rata - Rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan						100,00	92,28
Predikat Kinerja Kegiatan						B	B

URAIAN	2022
Total rumah di Kabupaten Tapin (RP3KP 2019)	55794 unit
Rumah Tidak Layak Huni (Survey 2022)	6288 unit
	11,27 %
Penanganan RTLH (di dalam & di luar kawasan kumuh)	163 unit
RATIO RTLH YANG TERTANGANI (RENSTRA 2018-2023)	2,59 %
PERSENTASE PENINGKATAN RTLH	2,59 %

Jumlah Pagu DPPA sebesar Rp. 4.675.895.000,00. Pada akhir Tahun Anggaran 2022 realisasi penyerapan dana Rp. 4.651.170.000,00 atau 99,47% dengan sisa Anggaran Rp. 24.725.000,00.

d. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)

Sasaran utama program ini adalah pada PSU perumahan dan kawasan permukiman dan sesuai dengan kebijakan dari pemerintah daerah cakupan program ini juga meliputi penanganan PSU di wilayah kabupaten Tapin yaitu pada Pengelolaan dan pemeliharaan kawasan Rantau baru serta penanganan Penerangan Jalan Umum (PJU) yang menyerap anggaran cukup besar khususnya pada pembayaran rekening PJU setiap bulannya. Indikator outcome dari program ini adalah :

1. Cakupan sarana dan prasarana lingkungan kawasan dalam kondisi baik (%), realisasi 66,87 % dari target 63,89% atau dengan capaian sebesar 104,67 %.
2. Persentase PSU perumahan yang ditangani dengan kondisi baik(%) realisasi 2,63% dari target 2,13% atau dengan capaian 80,99%.
3. Cakupan RTH dan Taman yang dikelola (%) realisasi 100% dari target kawasan yang dikelola 100%.

Tabel 3.11
Capaian Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA &		REALISASI KINERJA &		CAPAIAN	
		K	4 RP	K	5 RP	K	6 RP (%)
PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Cakupan sarana dan prasarana lingkungan Kawasan dalam Kondisi Baik (%)	63,89		66,87		104,67	
	Persentase PSU perumahan yang ditangani dengan kondisi baik (%)	2,63	18.853.535.001,00	2,13	15.496.623.130,00	80,99	82,87
	Cakupan RTH dan Taman yang dikelola (%)	100,00		100,00		100,00	
Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Terlaksananya Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	44,37	18.853.535.001,00	44,37	15.496.623.130,00	100,00	82,87
Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Terlaksananya Perencanaah Penyediaan PSU perumahan	0,00	101.860.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Terlaksananya Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	44,37	18.700.745.001,00	44,37	15.496.623.130,00	100,00	82,87
Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Tersedianya update data perumahan di Kabupaten Tapin	0,00	50.930.000,00	0,00	50.930.000,00	0,00	0,00
Rata - Rata Capaian Kinerja Kegiatan						100,00	82,87
Rata - Rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan						33,33	27,62
Predikat Kinerja Kegiatan						B	B

TA 2022				
Penyelenggaraan PSU	Vol	satuan	Realisasi	Capaian
Pembangunan dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Umum				
Pembangunan dan rehabilitasi penerangan jalan umum (PJU)	100	kaw ds	36,00	36,00
Pemeliharaan PJU	5501	titik	1.732,00	31,49
Pembayaran rek PJU	12	Bulan	12,00	100,00
Pembangunan PSU Perumahan	-	kwsn	-	
	1	Paket	1,00	100,00
Rata - rata Capaian				66,87
Target Kinerja Program				63,89
Capaian Realisasi Kinerja Program				104,67

Jumlah Pagu DPPA sebesar **Rp. 18.853.535.001,00**. Pada akhir Tahun Anggaran 2022 realisasi penyerapan anggaran **Rp. 15.496.623.130,00** atau **82,19%** dengan sisa Anggaran **Rp. 3.356.911.871,00**.

Sasaran Kinerja Kedua “Meningkatnya kualitas manajemen pertanahan” dengan indikator Persentase tanah Pemerintah Kabupaten yang bersertifikat dan Persentase penanganan konflik-konflik pertanahan dialokasikan program sebagai berikut :

e. Program Penatagunaan Tanah

Sasaran program ini adalah meningkatnya tertib administrasi pertanahan, khususnya pada administrasi dan sertifikasi tanah BMD. Jumlah Pagu DPPA sebesar **Rp. 587.330.000,00**. Pada akhir Tahun Anggaran 2022 realisasi penyerapan anggaran **Rp. 291.772.000,00** atau **49,68%** dengan sisa Anggaran **Rp. 295.558.000,00**. Indikator outcome program ini adalah :

1. Persentase penataan administrasi Tanah pemerintah Daerah Kabupaten/Kota(%) Realisasi 42,23% dari target 100% dengan capaian 42,34%.

Tabel 3.12
Capaian Program Penatagunaan Tanah

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA &		REALISASI KINERJA &		CAPAIAN	
		4		5		6	
2	3	K	RP	K	RP	K	RP (%)
PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Persentase penataan administrasi Tanah pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (%)	100,00	587.330.000,00	42,23	291.772.000,00	42,23	49,68%
Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Persentase usulan pensertifikatan Aset tanah SKPD terverifikasi BPN	100,00	587.330.000,00	42,23	291.772.000,00	42,23	49,68%
Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Jumlah Sertifikasi Aset Tanah Pemerintah Daerah	30,00	436.650.000,00	30,00	150.965.000,00	100,00	34,57
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	19,00	150.680.000,00	19,00	140.807.000,00	100,00	93,45
Rata - Rata Capaian Kinerja Kegiatan						42,23	49,68
Rata - Rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan						100,00	64,01
Predikat Kinerja Kegiatan						C	C

f. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan

Indikator Outcome program ini adalah Persentase advokasi pertanahan yang berhasil (%). Realisasi 100% dari target 100% dengan capaian 100%. Jumlah Pagu DPPA sebesar **Rp. 253.825.000,00**. Pada akhir Tahun Anggaran 2022 realisasi penyerapan anggaran **Rp. 233.514.000,00** atau **92,00%** dengan sisa Anggaran **Rp. 20.311.000,00**

Tabel 3.13
Capaian Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA & ANGGARAN 2022		REALISASI KINERJA & ANGGARAN		CAPAIAN KINERJA & ANGGARAN	
		4		5		6	
2	3	K	RP	K	RP	K	RP (%)
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN			4.962.555.000,00		4.161.226.000,00		83,85%
	Persentase advokasi pertanahan yang berhasil	100,00	253.825.000,00	100,00	253.825.000,00	100,00	92,00
Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase laporan sengketa tanah yang difasilitasi	100,00	253.825.000,00	100,00	253.825.000,00	100,00	92,00
Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan penyelenggaraan fasilitasi persoalan/ sengketa tanah	1,00	253.825.000,00	1,00	253.825.000,00	100,00	100,00
Rata - Rata Capaian Kinerja Kegiatan						100,00	92,00
Rata - Rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan						100,00	92,00
Predikat Kinerja Kegiatan						B	B

g. Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan.

Indikator Outcome program ini adalah Persentase tanah yang dibebaskan sesuai kebutuhan lokasi (%). Realisasi 100% dari target 100% dengan capaian 100%. Jumlah Pagu DPPA sebesar **Rp. 4.121.400.000,00**. Pada akhir Tahun Anggaran 2022 realisasi penyerapan anggaran **Rp. 3.615.629.000,00** atau **87,73%** dengan sisa Anggaran **Rp. 505.771.000,00**

Tabel 3.14
Capaian Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA & ANGGARAN 2022		REALISASI KINERJA & ANGGARAN		CAPAIAN KINERJA & ANGGARAN	
		4		5		6	
2	3	K	RP	K	RP	K	RP (%)
PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Persentase tanah yang dibebaskan sesuai kebutuhan lokasi (%)	100,00	4.121.400.000,00	100,00	3.615.629.000,00	100,00	87,73
Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase tanah yang dibebaskan sesuai kebutuhan luas	86,00	4.121.400.000,00	86,00	3.615.629.000,00	100,00	87,73
Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah	Persentase tanah yang dibebaskan sesuai kebutuhan luas	86,00	4.121.400.000,00	86,00	3.615.629.000,00	100,00	87,73
Rata - Rata Capaian Kinerja Kegiatan						100,00	87,73
Rata - Rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan						100,00	87,73
Predikat Kinerja Kegiatan						B	B

3.1.2. Perbandingan antara realisasi kinerja tahun ini dan tahun lalu

Realisasi dan capaian pada tahun 2022 dibandingkan dengan tahun sebelumnya rata-rata mengalami peningkatan dalam hal pencapaian target dan realisasi, beberapa hal yang mendukung meningkatnya capaian kinerja adalah sebagai berikut :

1. Dukungan ketersediaan anggaran yang bersumber dari APBD yang cukup besar seperti pada penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan pembangunan Sarana Prasarana Rumah Sederhana Sehat, sehingga pencapaian target kinerja dapat dimaksimalkan.
2. Penambahan sumber daya manusia berupa Pegawai Tidak Tetap (PTT) pada masing-masing bidang secara bertahap, sehingga beban pekerjaan pada masing-masing bidang menjadi berkurang.
3. Ketersediaan sarana prasarana kantor berupa peralatan dan mesin seperti printer dan laptop sehingga proses administrasi kegiatan dapat dilaksanakan secara maksimal.
4. Adanya koordinasi dan keterlibatan pihak kecamatan dan perangkat desa secara berkala dalam pelaksanaan kegiatan di lapangan, sehingga kendala pelaksanaan kegiatan di lapangan dapat diminimalisir.

Adapun rincian perbandingan capaian kinerja tahun 2022 dengan tahun-tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.15
Perbandingan Capaian Kinerja Disperkimtan Tapin
TA 2018 sd 2022

No.	Sasaran Strategis/Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Realisasi					Capaian					Peningkatan Capaian
			2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	
			Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Tapin										
Perubahan IKU berdasarkan Peraturan Bupati Tapin No. 60 Tahun 2020													
1	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Persentase Luas wilayah permukiman bebas kumuh			98,24%	98,25%	97,69%			98,24%	99,24%	97,78%	-1,46%
		Persentase Rumah Layak Huni			83,14%	83,48%	89,02%			83,14%	99,84%	106,59%	6,74%
		Persentase perumahan yang berkualitas			0,00%	2,63%	2,13%			0,00%	100,00%	80,99%	-19,01%
2	Meningkatnya kualitas manajemen pertanahan	Persentase tanah Pemerintah Kabupaten yang bersertifikat			9,39%	22,62%	24,31%			9,39%	22,62%	24,31%	1,69%
		Persentase penanganan konflik-konflik pertanahan	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	Max
IKU sebelum Perubahan (Peraturan Bupati Tapin Nomor 03 Tahun 2019													
1	Berkurangnya kawasan kumuh	Prosentase Penurunan Kawasan Kumuh	-0,0036	-0,0041	-0,0065			83,16%	92,48%	100,00%			
2	Meningkatnya kemanfaatan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Prosentase peningkatan pertumbuhan jumlah pengunjung di Ruang Terbuka Hijau (RTH)	25,00	14,60	-44,88			29,41%	87,58%	0,00%			
3	Tertanganinya konflik pertanahan	Prosentase konflik pertanahan yang selesai ditangani	100,00%	100,00%	100,00%			100,00%	100,00%	100,00%			

Sekretariat													
No.	Sasaran Strategis/Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Realisasi					Capaian					Peningkatan Capaian
			2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	
1	Meningkatnya penyediaan administrasi perkantoran, sarana prasarana aparatur dan laporan kinerja/keuangan dokumen perencanaan perangkat daerah	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	100,00%	99,07%	87,50%	100,00%	100,00%	100,00%	99,07%	87,50%	100,00%	100,00%	Max
		Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	Max
		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	Max
Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman													
No.	Sasaran Strategis/Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Realisasi					Capaian					Peningkatan Capaian
			2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	
1	Meningkatnya rumah layak huni	Rasio Rumah tidak Layak Huni yang tertangani	0,17%	0,44%	0,80%	2,05%	2,59%	42,86%	88,00%	126,98%	232,95%	100,00%	Max
		Persentase Peningkatan kualitas Rumah Tidak Layak Huni				2,05%	2,59%				91,93%	100,00%	8,07%
2	Meningkatnya kawasan bebas kumuh	Persentase penurunan kawasan kumuh	0,0036%	0,0041%	0,0065%	1,99%	0,15%	83,16%	93,18%	100,00%	93,43%	100,00%	6,57%
3	Terpenuhinya pelayanan dasar di bidang Perumahan Rakyat	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten /kota	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	100%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%	Max
		Fasilitas penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	100%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%	Max
Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas													
No.	Sasaran Strategis/Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Realisasi					Capaian					Peningkatan Capaian
			2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	
1	Meningkatnya Prasarana Sarana dan Utilitas Perumahan dengan kondisi baik	Cakupan sarana dan prasarana lingkungan Kawasan dalam Kondisi Baik (%)	62,00%	54,90%	41,10%	54,50%	66,87%	69,86%	90,66%	61,64%	86,81%	104,67%	Max
		Persentase PSU perumahan yang ditangani dengan kondisi baik (%)				2,63%	2,17%				100,00%	82,51%	-17,49%
2	Terpeliharanya Taman Kota dan RTH	Cakupan RTH dan Taman yang dikelola (%)	100,00%	100,00%	100%	100%	100%	100,00%	100%	100%	100,00%	100,00%	100,00%
Bidang Pertanahan													
No.	Sasaran Strategis/Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Realisasi					Capaian					Peningkatan Capaian
			2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	
1	Meningkatnya pelayanan informasi pertanahan	Persentase cakupan data penguasaan, pemilikan, penggunaan dan informasi pertanahan (%)	18,18%	18,18%	18,18%	18,18%		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		Max
2	Meningkatnya advokasi bidang pertanahan	Persentase advokasi pertanahan yang berhasil (%)	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%	Max
3	Meningkatnya tertib administrasi pertanahan	Persentase penataan administrasi Tanah pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (%)				80,69%	42,23%				80,69%	42,23%	-38,46%
4	Terpenuhinya kebutuhan pengadaan lahan	Persentase tanah yang dibebaskan sesuai kebutuhan lokasi (%)				60,00%	100%				60,00%	100%	40,00%

3.1.3. Membandingkan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah

Perbandingan realisasi indikator kinerja pada tahun 2022 dengan target jangka menengah RPJMD dan Renstra 2018-2023 dijabarkan pada tabel berikut :

Tabel 3.16

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah

RENSTRA																	
NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	Kondisi Awal		TA 2019			TA 2020			TA 2021			TA 2022		
				2017	2018	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(13)	(14)	(15)
1	Meningkatkan pelayanan sekretariat		Indeks Kepuasan Pegawai terhadap pelayanan sekretariat (%)														
		Meningkatnya penyediaan administrasi perkantoran, sarana prasarana aparatur dan laporan kinerja/keuangan dokumen perencanaan perangkat daerah	Rata-rata capaian kinerja kegiatan sekretariat	100,00	100,00	100,00	99,69	99,69	100	95,83	95,83	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	Meningkatnya kualitas lingkungan perumahan		Persentase rumah layak huni (%)	97,5	97,62	98,00	97,56	99,55	98,00	58,70	59,90	98,00	83,48	85,18	98,00	83,48	85,18
PERUBAHAN IKU (PERATURAN BUPATI TAPIN NO.60 TAHUN 2020)																	
			Persentase Luas wilayah permukiman bebas kumuh		98,24				0,00	98,24	98,24	99,00	98,25	99,24	99,91	97,69	97,78
		Meningkatnya kualitas Lingkungan perumahan dan Kawasan permukiman	Persentase Rumah Layak Huni		82,80				0,00	83,14	83,14	83,61	83,48	99,84	83,52	89,02	106,59
			Persentase perumahan yang berkualitas		0,00				0,00	0,00	0,00	2,63	2,63	100,00	2,63	2,13	82,66
		Meningkatnya kualitas manajemen pertanahan	Persentase tanah Pemerintah Kabupaten yang bersertifikat		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,39	9,39	100,00	22,62	22,62	100,00	24,31	24,31
			Persentase penanganan konflik-konflik pertanahan		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

3.1.4. Perbandingan antara realisasi kinerja dengan target SPM

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat. Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat di Kabupaten/Kota mencakup 2 (dua) jenis pelayanan dasar, terdiri dari:

- ❶ penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota; dan
- ❷ Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota

1. Target Pencapaian SPM

Target capaian Standar Pelayanan Minimal Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel. 3.17
Target dan Realisasi SPM tahun 2022

NO.	JENIS PELAYANAN DASAR	TARGET SPM 2022 (%)
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	100
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten /kota	100
TOTAL		100

a. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota.

Pada tahun 2022 di disediakan anggaran sebesar Rp.725.540.000,- untuk rehabiitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota.

b. Fasilitas penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

Pada tahun 2022 tidak ada rencana relokasi program pemerintah sehingga tidak ada realisasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten / kota.

2. Realisasi

a. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota layak huni dan terjangkau

Jenis Pelayanan dasar ini direalisasikan melalui sumber dana APBD dengan capaian realisasi sebagai berikut :

NO.	JENIS PELAYANAN DASAR	TARGET SPM 2022 (%)	REALISASI		KETERANGAN
			UNIT	%	
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	100	0	100	Tidak ada SK Bencana maupun bencana yang terlapor di tahun 2022
2	Fasilitas penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten /kota	100	0	100	Tidak relokasi program pemerintah di tahun 2022
TOTAL		100	0	100	

KODE	URAIAN	ANGGARAN		REALISASI			CAPAIAN		SISA
		DPA	DPPA	FISIK	%	Rp	%	%	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		4.100.975.000,00	725.540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	725.540.000,00
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN		4.100.975.000,00	725.540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	725.540.000,00
1.04.02.2.01	Pendataan Penyediaan dan rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	121.860.000,00	217.790.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		217.790.000,00
1.04.02.2.01.01	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	95.930.000,00	191.860.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		191.860.000,00
1.04.02.2.01.05	Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	25.930.000,00	25.930.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		25.930.000,00
1.04.02.2.02	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	30.900.000,00	30.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		30.900.000,00
1.04.02.2.02.01	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	30.900.000,00	30.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		30.900.000,00
1.04.02.2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	3.948.215.000,00	476.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		476.850.000,00
1.04.02.2.03.01	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	476.850.000,00	476.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		476.850.000,00
1.04.02.2.03.05	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	3.471.365.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
JUMLAH		4.100.975.000,00	725.540.000,00	74,00	100,00	0,00	0,00	100,00	725.540.000,00

Capaian SPM 100% dikarenakan di tahun 2022 tidak ada bencana yang dilaporkan ke Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Tapin baik berupa SK Bencana Alam maupun laporan resmi lainnya sehingga di tahun 2022 tidak ada realisasi unit penyediaan dan rehabilitasi rumah bagi korban bencana.

b. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

Capaian Jenis Pelayanan dasar ini tersaji dalam tabel sebagai berikut :

LOKASI	TARGET (UNIT)	TOTAL	REALISASI (Unit)	CAPAIAN (%)
	2022		2022	2022
$\frac{\text{Jumlah rumah yang tertangani (Realisasi)}}{\text{Jumlah target penerima layanan (Target)}} \times 100$				
Kabupaten Tapin	0	0	0	100
TOTAL	0	0	0	100

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN	AKSI
-1	-2	-3			-4	-5
2.	Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				100.00 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	0	0	0	100.00 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				20.00 %	
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia	100.00 %	
	1 . Fasilitasi penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan	0	0	0	100.00 %	
	2 . Subsidi uang sewa	0	0	0	100.00 %	
	3 . Penyediaan rumah layak huni	0	0	0	100.00 %	

3.1.5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Rata-rata Capaian Indikator Kinerja Utama (sasaran Strategis) Ess II atau kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan tahun 2022 sebesar **81,93%** dari 2 (dua) sasaran strategis yaitu Meningkatnya

Kualitas Lingkungan Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Meningkatnya Kualitas Manajemen Pertanahan.

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Capaian 2022			
			Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Predikat Capaian
1	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Perumahan dan Kawasan Permukiman	1.1. Persentase Luas wilayah permukiman bebas kumuh	99,91	97,69	97,78	B
		1.2. Persentase Rumah Layak Huni	83,52	89,02	106,59	BS
		1.3. Persentase perumahan yang berkualitas	2,63	2,13	80,99	B
SASARAN PERTAMA (AVERAGE)					95,12	B
2	Meningkatnya kualitas manajemen pertanahan	2.1. Persentase tanah Pemerintah Kabupaten yang bersertifikat	100,00	24,31	24,31	K
		2.2. Persentase penanganan konflik-konflik pertanahan	100,00	100,00	100,00	B
SASARAN KEDUA (AVERAGE)					62,16	C
KESELURUHAN (AVERAGE)					81,93	B

Capaian yang rendah pada Sasaran Meningkatnya kualitas manajemen pertanahan pada indikator Persentase tanah pemerintah kabupaten yang bersertifikat dengan capaian 24,31%.

Permasalahan :

Pengelolaan arsip kepemilikan tanah (aset) di masing-masing SKPD atau instansi di lingkungan Pemda Tapin yang belum maksimal, dan proses penerbitan sertifikat dari BPN yang sangat lama.

Alternatif Solusi yang dilakukan :

- Mengarahkan Bidang Pertanahan selaku unit yang menangani proses sertifikasi aset tanah untuk melakukan rapat koordinasi dengan SKPD yang mengusulkan sertifikasi aset tanah secara berkala dan bertempat di kantor Disperkimtan Tapin.
- Mengarahkan bidang Pertanahan untuk melakukan koordinasi dengan Bidang Aset BKAD untuk kebutuhan data luasan dan lokasi aset tanah yang diusulkan pensertifikasian.
- Berkoordinasi dengan Tim percepatan sertifikasi aset.

Analisa terhadap program-program yang dilaksanakan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Tapin Tahun 2022 yang mendukung keberhasilan dalam pencapaian indikator kinerja utama adalah sebagai berikut :

a. Program Kawasan Permukiman

Tingkat keberhasilan program ini adalah pada penanganan kawasan kumuh di Kabupaten/kota. Pada Tahun 2022 Disperkimtan Tapin melalui sub unit bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman menangani kawasan kumuh sesuai Keputusan Bupati Tapin Nomor 188.45/217/KUM/2022 tentang Penetapan Lokasi Permukiman Kumuh.

Permasalahan :

- ❏ Kebutuhan terhadap ketersediaan stok dan kualitas material dan bahan baku bangunan yang tinggi.
- ❏ Masyarakat penerima bantuan yang kurang memahami standar teknis pelaksanaan bantuan peningkatan kualitas rumah tidak layak huni.

Alternatif Solusi yang dilakukan :

- ❏ Melakukan survey ketersediaan bahan di beberapa toko bahan bangunan penyedia material.
- ❏ Melakukan pengecekan kondisi barang dan kualitas barang bersama dengan tim PHO Disperkimtan Tapin.
- ❏ Melakukan sosialisasi terkait standar teknis pelaksanaan bantuan peningkatan kualitas rumah tidak layak huni kepada masyarakat penerima bantuan bersama perangkat desa dan kecamatan.

b. Program Pengembangan Perumahan

Program ini merupakan program yang ditujukan untuk penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal di bidang Perumahan Rakyat. Sebagian dari output kegiatan pada program ini menunjang capaian kinerja pada penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).

Permasalahan :

- ❏ Tidak ada permasalahan dikarenakan pada tahun 2022 tidak ada Bencana Daerah.

Alternatif Solusi yang dilakukan :

- ❏ Tidak ada alternatif solusi yang dibutuhkan.

c. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman

Tingkat keberhasilan program ini adalah pada penanganan Rumah tidak layak huni (RTLH) di luar kawasan kumuh.

Permasalahan :

- ❏ Kebutuhan terhadap ketersediaan stok dan kualitas material dan bahan baku bangunan yang tinggi.
- ❏ Proses penyaluran bantuan kepada penerima sempat mengalami kendala retur.

Alternatif Solusi yang dilakukan :

- ❏ Melakukan survey ketersediaan bahan di beberapa toko bahan bangunan penyedia material.
- ❏ Melakukan pengecekan kondisi barang dan kualitas barang bersama dengan tim PHO Disperkimtan Tapin.
- ❏ Melakukan koordinasi dengan pihak Bank untuk mempercepat proses penyaluran bantuan.

d. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)

Sasaran utama program ini adalah pada PSU perumahan dan kawasan permukiman dan sesuai dengan kebijakan dari pemerintah daerah cakupan program ini juga meliputi penanganan PSU Perumahan di wilayah kabupaten Tapin, pengelolaan dan pemeliharaan kawasan Rantau baru serta penanganan Penerangan Jalan Umum (PJU).

Permasalahan :

- ❏ Kekurangan sumber daya aparatur yang disebabkan adanya kekosongan pejabat fungsional karena proses mutasi dan pensiun.
- ❏ Sebagian besar perumahan di Kabupaten Tapin belum memiliki kejelasan hibah aset ke pemerintah daerah, sehingga Disperkimtan kesulitan dalam hal penanganan fasilitas umum di perumahan.

Alternatif Solusi yang dilakukan :

- ❶ Mengajukan permohonan penambahan Aparatur Sipil Negara untuk mengisi kekosongan di Bidang Prasarana Sarana dan Utilitas (PSU) Disperkimtan Tapin.
- ❷ Melakukan survey perumahan dan pengembang di Kabupaten Tapin.
- ❸ Melakukan koordinasi dengan Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI) Provinsi Kalimantan Selatan terkait data pengembang yang aktif dan terdaftar di Kabupaten Tapin.
- ❹ Melakukan koordinasi dengan para pengembang dalam hal teknis serah terima fasilitas umum perumahan.

e. Program Penatagunaan Tanah

Tingkat keberhasilan program ini adalah pada meningkatnya tertib administrasi pertanahan, khususnya pada administrasi dan sertifikasi tanah aset BMD di Kabupaten Tapin.

Permasalahan :

- ❶ Ukuran luas tanah antara data KIB A/SPPF dan ukuran di lapangan berbeda;
- ❷ Petugas dari SKPD terkait masih banyak belum bisa menunjukan patok batas aset tanah;
- ❸ Pemberkasan administrasi masih kurang lengkap (SPPF Asli, surat pernyataan aset Kepala SKPD, tanda tangan Lurah/Kepala Desa setempat serta saksi-saksi);
- ❹ Berkas aset tanah yang diajukan pensertifikatan mengalami keterlambatan dalam kelengkapan data yuridis seperti status penguasaan bidang tanah pemegang hak atau pihak yang menguasai, disamping itu juga adanya pergantian/mutasi pejabat yang membidangi urusan aset BMD/tanah baik di SKPD maupun instansi terkait sehingga koordinasi menjadi kurang optimal;
- ❺ Untuk berkas pengajuan sertifikasi pengukuran ruas jalan masih belum dapat dilengkapi dikarenakan kendala di batas wilayah desa untuk tanda tangan Kepala desa setempat dan nama jalan dengan data KIB yang tidak sesuai.

Alternatif Solusi yang dilakukan :

- ✔ Membentuk Tim Percepatan Sertifikasi Aset Tanah
- ✔ Melakukan rapat koordinasi dengan SKPD yang mengusulkan sertifikasi aset tanah secara berkala dan bertempat di kantor Disperkimtan Tapin.
- ✔ Melakukan koordinasi dengan Bidang Aset BKAD untuk kebutuhan data luasan dan lokasi aset tanah yang diusulkan pensertifikasian.
- ✔ Melakukan kroscek bersama BPN terhadap titik-titik kordinat batas lokasi aset tanah yang diusulkan pensertifikasian.
- ✔ Melakukan survey lokasi yang diusulkan pensertifikasian bersama BPN dan SKPD terkait untuk memastikan batas-batas lokasi aset tanah yang diusulkan.

f. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan

Tingkat keberhasilan program ini adalah terlaksananya fasilitasi mediasi konflik-konflik pertanahan. Pada tahun 2022 tidak ada fasilitasi konflik yang terlapor dan melibatkan Disperkimtan Kab. Tapin.

Permasalahan :

- ✔ Tidak ada permasalahan.

Alternatif Solusi yang dilakukan :

- ✔ Tidak ada solusi yang dibutuhkan.

g. Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan.

Indikator Outcome program ini adalah Persentase tanah yang dibebaskan sesuai kebutuhan lokasi untuk pembangunan.

Permasalahan :

- ✔ Harga tanah yang ditawarkan oleh pemilik tanah cukup tinggi dan bervariasi.

- ❖ Lokasi tanah yang yang harus menyesuaikan dengan perencanaan pembangunan daerah.

Alternatif Solusi yang dilakukan :

- ❖ Bekerjasama dengan pihak ketiga yaitu konsultan Apraisal untuk melakukan survey, perhitungan dan analisa sebagai dasar dalam menetapkan harga tanah yang sesuai dengan ketentuan dan perundangan yang berlaku.
- ❖ Melakukan koordinasi dengan SKPD pengusul pengadaan tanah.
- ❖ Melakukan koordinasi dengan Dinas PUPR terkait dengan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR)

3.1.6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya

1. Sumber daya Manusia (SDM)

Sumber daya manusia (SDM) Disperkimtan Tapin telah dimaksimalkan dalam upaya pencapaian kinerja. Akan tetapi dalam hal kekosongan pejabat fungsional pada bidang Prasarana Sarana dan Utilitas (PSU) sangat diperlukan adanya penambahan ASN yang memiliki latar belakang pendidikan di bidang teknis untuk mengisi kekosongan tersebut.

Alternatif solusi yang dilakukan : menyediakan karyawan berupa Pegawai Tidak Tetap (PTT) untuk ditempatkan pada masing – masing bidang.

2. Sumber daya Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana ruangan dan operasional untuk melakukan pekerjaan di Disperkimtan Kabupaten Tapin pada TA 2022 mengalami penyusutan khususnya pada aset peralatan dan mesin sehingga turut mempengaruhi terhadap kelancaran operasional pada saat proses pelaksanaan kegiatan (Laporan Penyusutan Aset Tetap terlampir),

Alternatif solusi yang dilakukan : melakukan penambahan peralatan dan mesin berupa laptop dan printer serta meubel kursi dan meja kerja pada TA 2022.

3. Sumber daya Anggaran

Adapun mengenai analisis efisiensi sumber daya anggaran yang telah ditetapkan pada TA 2022 dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 3.18

Analisis Efisiensi Sumber Daya dan Realisasi Kinerja Disperkimtan TA 2022

KODE / PROGRAM	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	REALISASI KINERJA & ANGGARAN		CAPAIAN KINERJA & ANGGARAN		ANALISIS EFISIENSI ANGGARAN
			5	6	6	7	
1	2	3	K	RP	K	RP (%)	7
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			26.294.581.369,00		85,55%		
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran (%)	100,00	5.275.665.239,00	100,00	90,97	Efisien
		Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik (%)	100,00		100,00		
		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu (%)	100,00		100,00		
1-04.2-10.0-00.01.1.0 . 1.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12,00	2.760.000,00	100,00	27,31	Sangat Efisien
1-04.2-10.0-00.01.1.0 . 1.2.01.4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Terlaksananya Penyusunan DPA-SKPD	1,00	600.000,00	100,00	52,17	Sangat Efisien
1-04.2-10.0-00.01.1.0 . 1.2.01.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terlaksananya Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4,00	2.160.000,00	100,00	100,00	Efisien
1-04.2-10.0-00.01.1.0 . 1.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi gaji, tunjangan dan pelaporan	12,00	2.726.368.053,00	100,00	94,32	Efisien
1-04.2-10.0-00.01.1.0 . 1.2.02.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terlaksananya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12,00	2.722.348.053,00	100,00	94,32	Efisien
1.04 . 1.04.01.01 . 02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Terlaksananya Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	1,00	2.010.000,00	100,00	100,00	Efisien
1.04 . 1.04.01.01 . 02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Terlaksananya Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	1,00	2.010.000,00	100,00	100,00	Efisien
1-04.2-10.0-00.01.1.0 . 1.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Jasa Administrasi Perkantoran	12,00	1.661.982.459,00	100,00	91,29	Efisien
1-04.2-10.0-00.01.1.0 . 1.2.06.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya Penyediaan Alat Tulis Kantor	12,00	318.439.700,00	100,00	94,01	Efisien
1-04.2-10.0-00.01.1.0 . 1.2.06.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terlaksananya Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12,00	150.058.400,00	100,00	74,31	Sangat Efisien
1-04.2-10.0-00.01.1.0 . 1.2.06.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terlaksananya Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12,00	64.497.568,00	100,00	90,38	Efisien
1-04.2-10.0-00.01.1.0 . 1.2.06.7	Penyediaan Bahan/Material	Tersedianya Bahan/Material	12,00	10.775.000,00	100,00	80,20	Efisien
1-04.2-10.0-00.01.1.0 . 1.2.06.8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya fasilitas kunjungan tamu	12,00	1.260.000,00	100,00	45,82	Sangat Efisien
1-04.2-10.0-00.01.1.0 . 1.2.06.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi	12,00	1.116.951.791,00	100,00	93,69	Efisien

KODE / PROGRAM	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	REALISASI KINERJA & ANGGARAN		CAPAIAN KINERJA & ANGGARAN		ANALISIS EFISIENSI ANGGARAN
			5		6		
1	2	3	K	RP	K	RP (%)	7
1-04.2-10.0-00.01.1.0 . 1.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya sumber daya, peralatan dan mesin perkantoran	12,00	300.614.039,00	100,00	73,62	Efisien
1-04.2-10.0-00.01.1.0 . 1.2.08.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12,00	13.000.000,00	100,00	28,02	Sangat Efisien
1-04.2-10.0-00.01.1.0 . 1.2.08.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12,00	47.008.039,00	100,00	55,24	Sangat Efisien
1-04.2-10.0-00.01.1.0 . 1.2.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12,00	240.606.000,00	100,00	86,91	Efisien
1-04.2-10.0-00.01.1.0 . 1.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya penunjang operasional dan pemeliharaan barang milik daerah	12,00	169.914.790,00	100,00	89,71	Efisien
1-04.2-10.0-00.01.1.0 . 1.2.09.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	12,00	34.970.854,00	100,00	84,29	Efisien
1-04.2-10.0-00.01.1.0 . 1.2.09.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	12,00	162.647.227,00	100,00	80,19	Efisien
1-04.2-10.0-00.01.1.0 . 1.2.09.6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12,00	30.366.919,00	100,00	71,05	Sangat Efisien
1-04.2-10.0-00.01.1.0 . 1.2.09.9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	12,00	43.785.938,00	100,00	90,19	Efisien
1-04.2-10.0-00.01.1.0 . 1.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1,00	312.169.750,00	100,00	93,27	Efisien
Rata - Rata Capaian Kinerja Kegiatan					100,00	75,25	Efisien
Rata - Rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan					100,00	79,69	Efisien
Predikat Kinerja Kegiatan					B	B	
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN		Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten /kota	100,00	0,00	100,00	0,00	Efisien
		Fasilitas penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota	100,00		100,00		
1.04 . 1-04.2-10.0-00.01.1.0 . 2.2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Terlaksananya relokasi Hunian	0,00	0,00	100,00	0,00	Sangat Efisien
1.04 . 1-04.2-10.0-00.01.1.0 . 2.2.03.1	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah unit rehabilitasi rumah bagi korban bencana	0,00	0,00	100,00	0,00	Sangat Efisien
1.04 . 1-04.2-10.0-00.01.1.0 . 2.2.03.5	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Rusus yang dibangun untuk masyarakat terdampak	0,00	0,00	100,00	0,00	Sangat Efisien
Rata - Rata Capaian Kinerja Kegiatan					100,00	0,00	Sangat Efisien
Rata - Rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan					100,00	0,00	Sangat Efisien
Predikat Kinerja Kegiatan					B	K	

KODE / PROGRAM	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	REALISASI KINERJA & ANGGARAN		CAPAIAN KINERJA & ANGGARAN		ANALISIS EFISIENSI ANGGARAN
			5	6	7		
1	2	3	K	RP	K	RP (%)	7
PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN		Persentase penurunan kawasan kumuh		871.123.000,00	93,43	98,41	Efisien
1.04 . 1-04.2-10.0-00.01.1.0 . 3.2.02	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Tersedianya dokumen rencana penanganan kumuh	100,00	186.088.000,00	100,00	92,11	Efisien
1.04 . 1-04.2-10.0-00.01.1.0 . 3.2.02.1	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	1,00	186.088.000,00	100,00	99,29	Efisien
1.04 . 1-04.2-10.0-00.01.1.0 . 3.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Terlaksananya penanganan kawasan kumuh	12,00	685.035.000,00	100,00	96,99	Efisien
1.04 . 1-04.2-10.0-00.01.1.0 . 3.2.03.2	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Renovasi/Rehabilitasi RTLH di Permukiman Kumuh	38,00	685.035.000,00	100,00	99,90	Efisien
1.04 . 1-04.2-10.0-00.01.1.0 . 3.2.03.4	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman kumuh	Jumlah dokumen laporan koordinasi dan sinkronisasi	0,00	0,00	0,00	0,00	Tidak Efisien
Rata - Rata Capaian Kinerja Kegiatan					100,00	94,55	Efisien
Rata - Rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan					66,67	64,00	Tidak Efisien
Predikat Kinerja Kegiatan					B	B	
PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH		Rasio Rumah tidak Layak Huni yang tertangani	2,59	4.651.170.000,00	100,00	99,47	Efisien
		Persentase Peningkatan kualitas Rumah Tidak Layak Huni	2,59		100,00		
1.04 . 1-04.2-10.0-00.01.1.0 . 4.2.01	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	12,00	4.651.170.000,00	100,00	99,32	Efisien
1.04 . 1-04.2-10.0-00.01.1.0 . 4.2.01.1	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Terlaksananya Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	125,00	3.097.225.000,00	100,00	99,79	Efisien
1.04 . 1-04.2-10.0-00.01.1.0 . 4.2.01.2	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Terlaksananya pendampingan/Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat diPermukiman Kumuh	1,00	1.553.945.000,00	100,00	98,84	Efisien
Rata - Rata Capaian Kinerja Kegiatan					100,00	95,32	Efisien
Rata - Rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan					100,00	92,28	Efisien
Predikat Kinerja Kegiatan					B	B	

KODE / PROGRAM	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	REALISASI KINERJA & ANGGARAN		CAPAIAN KINERJA & ANGGARAN		ANALISIS EFISIENSI ANGGARAN
			5	6	7		
1	2	3	K	RP	K	RP (%)	7
PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)		Cakupan sarana dan prasarana lingkungan Kawasan dalam Kondisi Baik (%)	66,87	15.496.623.130,00	104,67	82,87	Efisien
		Persentase PSU perumahan yang ditangani dengan kondisi baik (%)	2,17		80,99		
		Cakupan RTH dan Taman yang dikelola (%)	100,00		100,00		
1.04 . 1-04.2-10.0-00.01.1.0 . 5.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Terlaksananya Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	44,37	15.496.623.130,00	100,00	82,87	Efisien
1.04 . 1-04.2-10.0-00.01.1.0 . 5.2.01.1	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Terlaksananya Penyediaan PSU perumahan	0,00	0,00	0,00	0,00	Tidak Efisien
1.04 . 1-04.2-10.0-00.01.1.0 . 5.2.01.2	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Terlaksananya Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	44,37	15.496.623.130,00	100,00	82,87	Efisien
1.04 . 1-04.2-10.0-00.01.1.0 . 5.2.01.3	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Tersedianya update data perumahan di Kabupaten Tapin	0,00	50.930.000,00	0,00	0,00	Tidak Efisien
Rata - Rata Capaian Kinerja Kegiatan					100,00	82,87	Efisien
Rata - Rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan					100,00	82,87	Efisien
Predikat Kinerja Kegiatan					B	B	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN			4.161.226.000,00		83,85%		
PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN		Persentase advokasi pertanahan yang berhasil	100,00	253.825.000,00	100,00	92,00	Efisien
2.10 . 1-04.2-10.0-00.01.1.0 . 4.2.01	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase laporan sengketa tanah yang difasilitasi	100,00	253.825.000,00	100,00	92,00	Efisien
2.10 . 1-04.2-10.0-00.01.1.0 . 4.2.01.2	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan penyelenggaraan fasilitasi persoalan/ sengketa tanah	1,00	253.825.000,00	100,00	100,00	Efisien
PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN		Persentase tanah yang dibebaskan sesuai kebutuhan lokasi (%)	100,00	3.615.629.000,00	100,00	87,73	Efisien
2.10 . 1-04.2-10.0-00.01.1.0 . 5.2.01	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase tanah yang dibebaskan sesuai kebutuhan luas	86,00	3.615.629.000,00	100,00	87,73	Efisien
2.10 . 1-04.2-10.0-00.01.1.0 . 5.2.01.2	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase tanah yang dibebaskan sesuai kebutuhan luas	86,00	3.615.629.000,00	100,00	87,73	Efisien

KODE / PROGRAM	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	REALISASI KINERJA & ANGGARAN		CAPAIAN KINERJA & ANGGARAN		ANALISIS EFISIENSI ANGGARAN
			5		6		
1	2	3	K	RP	K	RP (%)	7
PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH		Persentase penataan administrasi Tanah pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (%)	42,23	291.772.000,00	42,23	49,68%	Tidak Efisien
2.10 . 1-04.2-10.0-00.01.1.0 . 10.2.01	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Persentase usulan pensertifikatan Aset tanah SKPD terverifikasi BPN	42,23	291.772.000,00	42,23	49,68%	Tidak Efisien
2.10 . 1-04.2-10.0-00.01.1.0 . 10.2.01.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Jumlah Sertifikasi Aset Tanah Pemerintah Daerah	30,00	150.965.000,00	100,00	34,57	Sangat Efisien
2.10 . 1-04.2-10.0-00.01.1.0 . 10.2.01.3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	19,00	140.807.000,00	100,00	93,45	Efisien
Rata - Rata Capaian Kinerja Kegiatan					66,38	54,95	Efisien
Rata - Rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan					100,00	59,67	Efisien
Predikat Kinerja Kegiatan					C	C	
Rata - Rata Capaian Seluruh Program					94,38	68,99	Efisien
Rata - Rata Capaian Seluruh Kinerja Kegiatan					95,56	71,37	Sangat Efisien
Rata - Rata Capaian Seluruh Kinerja Sub Kegiatan Kegiatan					90,91	70,02	Efisien
Rata - Rata Predikat Kinerja					B	C	Efisien
Faktor pendorong keberhasilan : Kerja sama dan koordinasi yang terarah							
Faktor penghambat capaian kinerja : Man power (Adanya kekosongan personil pejabat fungsional yang belum terisi)							
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD tahun berikutnya : Perlu penambahan personil untuk mengisi kekosongan personil Pejabat fungsional							

3.1.7. Analisis program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan / kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Pada Tahun Anggaran 2022 dialokasikan dana sebesar Rp.30.472.292.718,00 untuk program pencapaian target kinerja utama dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan. Adapun alokasi anggaran dana tersebut terbagi dalam 7 (tujuh) program sebagai berikut :

KODE	URAIAN	ANGGARAN	%
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		24.936.130.001,00	69,85
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN		725.540.000,00	2,03
1. 04 .02. 2.01	Pendataan Penyediaan dan rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	217.790.000,00	0,61
1. 04 .02. 2.01. 01	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	191.860.000,00	0,54
1. 04 .02. 2.01. 05	Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	25.930.000,00	0,07
1. 04 .02. 2.02	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	30.900.000,00	0,09
1. 04 .02. 2.02. 01	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	30.900.000,00	0,09
1. 04 .02. 2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	476.850.000,00	1,34
1. 04 .02. 2.03. 01	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	476.850.000,00	1,34
1. 04 .02. 2.03. 05	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	0,00	0,00
PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN		885.160.000,00	2,48
1. 04 .03. 2.02	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	187.410.000,00	0,52
1. 04 .03. 2.02 .01	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	187.410.000,00	0,52
1. 04 .03. 2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	697.750.000,00	1,95
1. 04 .03. 2.03 .02	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	689.100.000,00	1,93
1. 04 .03. 2.03 .04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	8.650.000,00	0,02
PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH		4.471.895.000,00	12,53
1. 04 .04. 2.01	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	4.471.895.000,00	12,53
1. 04 .04. 2.01. 01	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	2.899.700.000,00	8,12
1. 04 .04. 2.01. 02	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	1.572.195.000,00	4,40
PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)		18.853.535.001,00	52,81
1. 04 .05. 2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	18.853.535.001,00	52,81
1. 04 .05. 2.01. 01	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	101.860.000,00	0,29
1. 04 .05. 2.01. 02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	18.700.745.001,00	52,39
1. 04 .05. 2.01. 03	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	50.930.000,00	0,14
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN		4.962.555.000,00	13,90
PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN		253.825.000,00	0,71
2. 10 .04 .2.01	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	253.825.000,00	0,71
2. 10 .04 .2.01 .02	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	253.825.000,00	0,71
PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN		4.121.400.000,00	11,55
2. 10 .05 .2.01	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	4.121.400.000,00	11,55
2.04 . 1.04.01.01 . 19.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	4.121.400.000,00	11,55
PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH		587.330.000,00	1,65
2. 10 .10 .2.01	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	587.330.000,00	1,65
2. 10 .10 .2.01. 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	436.650.000,00	1,22
2. 10 .10 .2.01. 03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	150.680.000,00	0,42
JUMLAH		29.898.685.001,00	83,75
ANGGARAN DISPERKIMTAN TA 2022		35.698.305.877,00	

Tabel 3.19
Program dan Kegiatan Pendukung Target Kinerja Disperkimtan TA 2022

No.	Capaian Realisasi IKU dan Program						Capaian Realisasi Kegiatan/Sub Kegiatan														
	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian	Program	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian						
1	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Perumahan dan Kawasan Permukiman	a. wilayah permukiman bebas kumuh	99,91	97,69	97,78	Program kawasan permukiman	Persentase penurunan kawasan kumuh	0,15%	0,15%	100,00%	1. Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Tersedianya dokumen rencana penanganan kumuh	100%	100%	100,00%						
											1.1. Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	1,00	1,00	100,00%						
											2. Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Terlaksananya penanganan kawasan kumuh	12,00	12,00	100,00%						
											2.1. Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Renovasi/Rehabilitasi RTLH di Permukiman Kumuh	38,00	38,00	100,00%						
											2.2. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman kumuh	Jumlah dokumen laporan koordinasi dan sinkronisasi	-	-	0,00%						
											1. Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Terlaksananya relokasi/rehabilitasi Hunian	100%	100%	100,00%						
	b. Persentase Rumah Layak Huni	83,52	89,02	106,59	Program pengembangan perumahan	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	1.1. Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah unit rehabilitasi rumah bagi korban bencana	-	-	100,00%						
											Program perumahan dan kawasan permukiman kumuh	Rasio Rumah tidak Layak Huni yang tertangani	2,59%	2,59%	100,00%	1. Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	12,00	12,00	100,00%	
																1.1. Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	125,00	125,00	100,00%	
																	1.2. Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Terlaksananya pendampingan/Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	1,00	1,00	100,00%
																	1. Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Terlaksananya Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	44,37	44,37	100,00%
																	1.1. Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Terlaksananya Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	44,37	44,37	100,00%
c. Persentase perumahan yang berkualitas	2,63	2,13	80,99	Program peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU)	Cakupan sarana dan prasarana lingkungan Kawasan dalam Kondisi Baik (%)	63,89%	66,87%	104,66%	100,00%	100,00%						100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		
											Persentase PSU perumahan yang ditangani dengan kondisi baik (%)	2,63%	2,13%	80,99%							
															Cakupan RTH dan Taman yang dikelola (%)					100,00%	100,00%
Average					95,12	Average					85,71%										

No.	Capaian Realisasi IKU dan Program										Capaian Realisasi Kegiatan/Sub Kegiatan					
	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian	Program	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	
2	Meningkatnya kualitas manajemen pertanahan	a. Pemerintah Kabupaten yang bersertifikat	100	24,31	24,31	Program penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	Persentase tanah yang dibebaskan sesuai kebutuhan lokasi (%)	100,00%	100,00%	100,00%	1.	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase tanah yang dibebaskan sesuai kebutuhan luas	100,00	86,00	86,00%
											1.1.	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase tanah yang dibebaskan sesuai kebutuhan luas	100,00	86,00	86,00%
		b. penanganan konflik-konflik pertanahan	100	100,00	100	Program penatagunaan tanah	Persentase penataan administrasi Tanah pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (%)	100,00%	42,23%	42,23%	1.	Penggunaan Tanah yang Hambarannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Persentase usulan pensertifikatan Aset tanah SKPD terverifikasi BPN	100,00	100,00	100,00%
						Program penyelesaian sengketa tanah garapan	Persentase advokasi pertanahan yang berhasil (%)	100,00%	100,00%	100,00%	1.	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sertifikasi Aset Tanah Pemerintah Daerah	30,00	30,00	100,00%
											1.1.	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	19,00	19,00	100,00%
Average					62,16	Average					94,40%					

Pada sasaran Kinerja pertama “**Meningkatnya Kualitas Lingkungan Perumahan dan Kawasan Permukiman**” dengan indikator Persentase Luas wilayah permukiman bebas kumuh, Persentase Rumah Layak Huni, Persentase perumahan yang berkualitas, dialokasikan beberapa program dan kegiatan sebagai berikut :

Tabel 3.20
Program dan Kegiatan Pendukung Meningkatkan Kualitas Lingkungan Perumahan dan Kawasan Permukiman

KODE	URAIAN	ANGGARAN	%
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		24.936.130.001,00	69,85
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN		725.540.000,00	2,03
1. 04 .02. 2.01	Pendataan Penyediaan dan rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	217.790.000,00	0,61
1. 04 .02. 2.01. 01	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	191.860.000,00	0,54
1. 04 .02. 2.01. 05	Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	25.930.000,00	0,07
1. 04 .02. 2.02	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	30.900.000,00	0,09
1. 04 .02. 2.02. 01	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	30.900.000,00	0,09
1. 04 .02. 2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	476.850.000,00	1,34
1. 04 .02. 2.03. 01	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	476.850.000,00	1,34
1. 04 .02. 2.03. 05	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	0,00	0,00
PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN		885.160.000,00	2,48
1. 04 .03. 2.02	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	187.410.000,00	0,52
1. 04 .03. 2.02 .01	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	187.410.000,00	0,52
1. 04 .03. 2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	697.750.000,00	1,95
1. 04 .03. 2.03 .02	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	689.100.000,00	1,93
1. 04 .03. 2.03 .04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	8.650.000,00	0,02
PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH		4.471.895.000,00	12,53
1. 04 .04. 2.01	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	4.471.895.000,00	12,53
1. 04 .04. 2.01. 01	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	2.899.700.000,00	8,12
1. 04 .04. 2.01. 02	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	1.572.195.000,00	4,40
PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)		18.853.535.001,00	52,81
1. 04 .05. 2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	18.853.535.001,00	52,81
1. 04 .05. 2.01. 01	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	101.860.000,00	0,29
1. 04 .05. 2.01. 02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	18.700.745.001,00	52,39
1. 04 .05. 2.01. 03	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	50.930.000,00	0,14
JUMLAH		24.936.130.001,00	69,85
ANGGARAN DISPERKIMTAN TA 2022		35.698.305.877,00	

1. Program Pengembangan Perumahan

Program ini merupakan program yang ditujukan untuk penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal di bidang Perumahan Rakyat. Sebagian dari output kegiatan pada program ini menunjang capaian kinerja pada penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Outcome dari program ini akan dijelaskan pada Bab IV tentang penarapan dan capaian SPM.

2. Program Kawasan Permukiman

Sasaran utama program ini adalah pada penanganan kawasan kumuh di Kabupaten/kota. Pada Tahun 2022 Disperkimtan Tapin melalui sub unit bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman menangani kawasan kumuh sesuai Keputusan Bupati Tapin Nomor 188.45/217/KUM/2022 tentang Penetapan Lokasi Permukiman Kumuh Kota Rantau. Outcome dari program ini adalah meningkatnya kawasan bebas kumuh dengan indikator Persentase Penanganan Kawasan Kumuh (%), realisasi 0,15% dari target 0,15% atau dengan capaian di akhir TA sebesar 100% . Perhitungan diambil dari luas bangunan peningkatan kualitas RTLH sebanyak 38 unit dengan ukuran per unit $4 \times 5 = 20 \text{ m}^2$.

📍 Kegiatan Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha

Output kegiatan ini adalah Terlaksananya updating kawasan kumuh yang direalisasikan dalam sub kegiatan sebagai berikut :

Sub Kegiatan :

Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh berupa pendataan dan updating kawasan kumuh.

Output sub kegiatan ini berupa penyusunan dokumen Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (RP2KPKPK), yang akan menjadi salah satu dokumen penting dalam penyusunan rencana kerja bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam hal penanganan kawasan kumuh. Capaian sub kegiatan ini adalah 100% dari target 1 Dokumen.

❶ **Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha**

Kegiatan ini menangani rumah tidak layak huni (RTLH) di dalam kawasan kumuh melalui 2 (dua) sub kegiatan.

Sub kegiatan :

1. Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni

Target yang ditetapkan dalam sub kegiatan ini adalah RTLH di kawasan kumuh dengan jumlah unit RTLH dengan realisasi 38 unit (100%) peningkatan kualitas RTLH di Kecamatan Tapin Utara

2. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh

Output sub kegiatan ini adalah perumusan kebijakan terkait pengendalian permukiman kumuh dalam bentuk rapat-rapat tim Pokja yang melibatkan Kepala Daerah dan SKPD lain yang terkait dalam kerjasama penanganan kawasan kumuh. Di tahun 2022 sub kegiatan ini tidak terealisasi dikarenakan kendala teknis

3. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman

Sasaran utama program ini adalah pada penanganan Rumah tidak layak huni. Outcome program ini adalah meningkatnya Rumah Layak Huni dengan indikator Rasio rumah tidak layak huni yang tertangani dan Presentase peningkatan kualitas rumah tidak layak huni realisasi 2,59% dari target 2,59%. Target sebesar 2,59% merupakan nilai dari target PK Perubahan 2022, pada perubahan anggaran tahun 2022 dialokasikan penambahan pagu untuk penanganan RTLH pada lokasi rawan stunting berdasarkan SK Bupati Tapin No. 188.45/084/KUM/2021 tanggal 16 April 2021 dan Penanganan RTLH pada lokasi Kemiskinan Ekstrim.

URAIAN	2022	
Total rumah di Kabupaten Tapin (RP3KP 2019)	55794	unit
Rumah Tidak Layak Huni dari faktor Keselamatan (Survey 2022)	6288	unit
	11,27	%
Penanganan RTLH (di dalam & di luar kawasan kumuh)	163	unit
RATIO RTLH YANG TERTANGANI (RENSTRA 2018-2023)	2,59	%
PERSENTASE PENINGKATAN RTLH	2,59	%

🔴 Kegiatan Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan ini menangani rumah tidak layak huni di luar kawasan kumuh, melalui 2 (dua) sub kegiatan.

Sub kegiatan :

1. Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha.

Target dari sub kegiatan ini adalah RTLH di luar kawasan kumuh dengan target sebanyak 125 unit dan realisasi output 125 unit atau 100%.

2. Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha.

Sub kegiatan ini berupa pembentukan tim pendamping untuk memperlancar kegiatan di lapangan khususnya pada kegiatan-kegiatan peningkatan kualitas rumah tidak layak huni.

4. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)

Sasaran utama program ini adalah pada PSU perumahan dan kawasan permukiman dan sesuai dengan kebijakan dari pemerintah daerah cakupan program ini juga meliputi penanganan PSU di wilayah kabupaten Tapin yaitu pada Pengelolaan dan pemeliharaan kawasan

Rantau baru serta penanganan Penerangan Jalan Umum (PJU) yang menyerap anggaran cukup besar khususnya pada pembayaran rekening PJU setiap bulannya. Indikator outcome dari program ini adalah :

1. Cakupan sarana dan prasarana lingkungan kawasan dalam kondisi baik (%), realisasi 66,87% dari target 63,89% atau dengan capaian sebesar 104,67 %.

TA 2022				
Penyelenggaraan PSU	Vol	satuan	Realisasi	Capaian
Pembangunan dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Umum				
Pembangunan dan rehabilitasi penerangan jalan umum (PJI)	100	kaw ds	36,00	36,00
Pemeliharaan PJU	5501	titik	1.732,00	31,49
Pembayaran rek PJU	12	Bulan	12,00	100,00
Pembangunan/Rehabilitasi Drainase Kawasan Perumahan & Permukiman	-	kwsn	-	
	420	m'	-	100,00
Rata - rata Capaian				66,87
Target Kinerja Program				63,89
Capaian Realisasi Kinerja Program				104,67

2. Persentase PSU perumahan yang ditangani dengan kondisi baik(%) realisasi 2,63% dari target 2,13% atau dengan capaian 80,99%.
3. Cakupan RTH dan Taman yang dikelola (%) realisasi 100% dari target kawasan yang dikelola 100%.

📌 Kegiatan Urusan Penyelenggaraan Perumahan.

Output kegiatan ini adalah Terlaksananya Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang direalisasikan dalam sub kegiatan sebagai berikut :

Sub Kegiatan :

Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian.

Output sub kegiatan ini berupa pengelolaan dan pemeliharaan Kawasan Rantau baru, pembangunan dan pemeliharaan PJU, pembayaran rekening PJU dan perencanaan fasilitas umum di

perumahan selama 12 bulan di tahun anggaran. Realisasi 12 bulan dengan capaian 100 %.

Tabel 3.21.
Pembangunan PJU Kabupaten Tapin TA 2022

NO.	URAIAN	Jml Titik
1	Pembangunan Penerangan Jalan Umum (PJU) di Desa Pipitak Jaya Kec. Piani	68
2	Pembangunan Penerangan Jalan Umum (PJU) di Jalan Akses RSUD Baru dan Ruas RSUD Baru Bitahan	36
3	Pembangunan Penerangan Jalan Umum (PJU) di Jalan Akses RSUD Baru dan Ruas RSUD Baru Bitahan (Lanjutan)	14
4	Pembangunan Jaringan Listrik + Penerangan Jalan Umum (PJU) di Desa Hatiwin (P33)	27
5	Pembangunan Penerangan Jalan Umum (PJU) di Desa Andhika (Lanjutan) (P33)	22
6	Pembangunan Penerangan Jalan Umum (PJU) di Desa A Yani Pura (P33)	47
7	Pembangunan Penerangan Jalan Umum (PJU) di Desa Harapan Masa (P33)	48
8	Pembangunan Penerangan Jalan Umum (PJU) di Desa Kambang Habang Baru (P33)	37
9	Pembangunan Penerangan Jalan Umum (PJU) di Desa Kambang Habang Lama (P33)	37
10	Pembangunan Penerangan Jalan Umum (PJU) di Desa Kambang Kuning (Tanah Rata) (P33)	47
11	Pembangunan Penerangan Jalan Umum (PJU) di Desa Linuh (P33)	48
12	Pembangunan Penerangan Jalan Umum (PJU) di Desa Mekarsari (P33)	48
13	Pembangunan Penerangan Jalan Umum (PJU) di Desa Pandulangan (P33)	42
14	Pembangunan Penerangan Jalan Umum (PJU) di Desa Paring Guling (P33)	40
15	Pembangunan Penerangan Jalan Umum (PJU) di Desa Pualam Sari (P33)	47
16	Pembangunan Penerangan Jalan Umum (PJU) di Desa Sawang (P33)	18
17	Pembangunan Penerangan Jalan Umum (PJU) di Desa Serawi (P33)	42
18	Pembangunan Penerangan Jalan Umum (PJU) di Desa Suato Lama (Lanjutan) (P33)	37
19	Pembangunan Penerangan Jalan Umum (PJU) di Desa Suato Tatakan (P33)	48
20	Pembangunan Penerangan Jalan Umum (PJU) di Sungai Salai (Lanjutan) (P33)	29
21	Pembangunan Penerangan Jalan Umum (PJU) di Desa Timbaan (P33)	47
22	Pembangunan Penerangan Jalan Umum (PJU) di Desa Timbung (P33)	21
23	Pembangunan Penerangan Jalan Umum (PJU) di Desa Tungkap (P33)	47
24	Pembangunan Penerangan Jalan Umum (PJU) di Kelurahan Binuang (P33)	47
25	Pembangunan Penerangan Jalan Umum (PJU) di Kelurahan Karang Putih (P33)	42
26	Pembangunan Penerangan Jalan Umum (PJU) di Desa Bitahan Baru (Musrempang)	32
27	Pembangunan Penerangan Jalan Umum (PJU) di Desa Pantai Cabe (Musrempang)	15
28	Pembangunan Penerangan Jalan Umum (PJU) di Kelurahan Rantau Kiwa RT 10 (Musrempang)	10
29	Pembangunan Penerangan Jalan Umum (PJU) di Desa Bedaun (Musrempang)	17
TOTAL		1.060

NO.	URAIAN	Jml Titik
1	Pembangunan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJUTS) di Depan dan Menuju Puskesmas Baringin (Desa Baringin A)	7
2	Pembangunan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJUTS) di Desa Banua Hanyar	7
3	Pembangunan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJUTS) di Desa Baringin	7
4	Pembangunan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJUTS) di Desa Mandurian Hilir	7
5	Pembangunan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJUTS) di Desa Munggu Raya	7
6	Pembangunan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJUTS) di Desa Sungai Rutas Hulu	7
7	Pembangunan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJUTS) di Komplek Pondok Pesantren Muthul Huda (Desa Hatungun)	7
TOTAL		49

Sasaran Kinerja Kedua “Meningkatnya kualitas manajemen pertanahan” dengan indikator Persentase tanah Pemerintah Kabupaten yang bersertifikat dan Persentase penanganan konflik-konflik pertanahan dialokasikan program dan kegiatan sebagai berikut :

Tabel 3.22

Program dan Kegiatan Pendukung Meningkatnya Kualitas Manajemen Pertanahan

KODE	URAIAN	ANGGARAN	%
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN		4.962.555.000,00	13,90
PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN		253.825.000,00	0,71
2. 10 .04 .2.01	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	253.825.000,00	0,71
2. 10 .04 .2.01 .02	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	253.825.000,00	0,71
PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN		4.121.400.000,00	11,55
2. 10 .05 .2.01	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	4.121.400.000,00	11,55
2.04 . 1.04.01.01 . 19.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	4.121.400.000,00	11,55
PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH		587.330.000,00	1,65
2. 10 .10 .2.01	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	587.330.000,00	1,65
2. 10 .10 .2.01. 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	436.650.000,00	1,22
2. 10 .10 .2.01. 03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	150.680.000,00	0,42
JUMLAH		4.962.555.000,00	13,90
ANGGARAN DISPERKIMTAN TA 2022		35.698.305.877,00	

1. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan

Indikator Outcome program ini adalah Persentase advokasi pertanahan yang berhasil (%). Realisasi 100% dari target 100% dengan capaian 100%. Dalam program ini ada 1 (satu) kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja yaitu :

🔴 Kegiatan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota

Output kegiatan ini adalah Persentase laporan sengketa tanah yang difasilitasi yang direalisasikan dalam 1 (satu) sub kegiatan.

Sub Kegiatan :

Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.

Output sub kegiatan ini tergantung jumlah laporan/ pengaduan sengketa tanah yang masuk & terdaftar di Bidang Pertanahan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Tapin, untuk tahun 2022 tidak ada laporan sengketa tanah yang masuk ke Bidang Pertanahan Disperkimtan

Kab. Tapin. Kegiatan yang mendukung program penyelesaian sengketa tanah yaitu Penyuluhan Hukum Pertanahan yang telah dilaksanakan sebanyak 16 kali selama tahun 2022.

2. Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan.

Indikator Outcome program ini adalah Persentase tanah yang dibebaskan sesuai kebutuhan lokasi (%). Realisasi 100% dari target 100% dengan capaian 100%. Dalam program ini ada 1 (satu) kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja yaitu :

❶ Kegiatan Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Output kegiatan ini adalah Persentase tanah yang dibebaskan sesuai kebutuhan luas yang direalisasikan dalam 1 (satu) sub kegiatan dengan realisasi 86 % dari target 100%.

No.	Pembebasan Lahan	Luas (M2)	Realisasi	Capaian
1	Gedung Pengujian KIR dan Gedung Pelayanan KIR Dishub Kab. Tapin	20000	17254	86,27%
	Persentase Usulan Sertifikasi Terverifikasi BPN	20000	17254	86,27%

Sub Kegiatan :

Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Output sub kegiatan ini berupa Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota selama 12 bulan di tahun anggaran.

3. Program Penatagunaan Tanah.

Sasaran program ini adalah meningkatnya tertib administrasi pertanahan, khususnya pada administrasi dan sertifikasi tanah BMD. Indikator outcome program ini adalah :

- ❶ Persentase penataan administrasi Tanah pemerintah Daerah Kabupaten/Kota(%) Realisasi 42,23% dari target 100% dengan capaian 42,23%.

Dalam program ini ada 1 (satu) kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja yaitu :

- ❶ **Kegiatan Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota**

Output kegiatan ini adalah Persentase usulan pensertifikatan Aset tanah SKPD terverifikasi BPN yang direalisasikan dalam 2 (dua) sub kegiatan dengan realisasi 42,23 % dari target 100%.

No.	Uraian	Jumlah	Satuan
1	Data Tanah Aset yang belum dilakukan pengukuran	985	Persil
2	Berkas usulan sertifikasi dari SKPD	251	Persil
3	Tanah sudah dilakukan pengukuran	78	Persil
4	Terverifikasi BPN	106	Persil
5	Sertipikat Hak Pakai yang sudah dikeluarkan BPN	30	Bidang
Persentase Usulan Sertifikasi Terverifikasi BPN		42,23	%

Sub kegiatan :

1. Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah

Sub kegiatan ini merupakan pelaksanaan percepatan sertifikasi aset tanah pemerintah (BMD) dengan output 30 sertipikat untuk 30 persil tanah.

2. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota

Output kegiatan ini berupa bantuan persiapan pendaftaran sertifikasi tanah melalui kerjasama antara Disperkimtan Tapin dan BPN dengan waktu pelaksanaan kegiatan selama 12 bulan di tahun anggaran. Selain itu pada sub kegiatan ini juga dilakukan sosialisasi sistem pendaftaran tanah dengan output 18 (delapan belas) kali sosialisasi dari target 18

(delapan belas) kali dan Sosialisasi Pengelolaan Sistem administrasi Pertanahan Berbasis Aplikasi Protades dengan Output 1 (satu) kali dengan target 1 (satu) kali sehingga realisasi capaian Persentase Sosialisasi Urusan Bidang Pertanahan sebesar 100%

3.2. Realisasi Anggaran

Anggaran yang disediakan untuk pencapaian target kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Tapin adalah sebesar Rp.35.902.305.877,00. Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp30.435.496.369,00 terdiri dari Realisasi Belanja Operasi sebesar Rp17.784.148.879,00 dan Realisasi Belanja Modal sebesar Rp12.651.347.490,00. Rincian Alokasi dan Realisasi Anggaran dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.23
Realisasi Anggaran Belanja TA 2022

Uraian	Anggaran		Realisasi	%
	DPA	DPPA		
BELANJA OPERASI	17.956.743.181,00	21.441.610.215,00	17.784.148.879,00	82,94
Belanja Pegawai	2.895.416.584,00	2.953.922.377,00	2.784.238.053,00	94,26
Belanja Barang dan Jasa	15.061.326.597,00	15.478.687.838,00	11.990.910.826,00	77,47
Belanja Bantuan Sosial	-	3.009.000.000,00	3.009.000.000,00	100,00
BELANJA MODAL	64.237.318.295,00	14.460.695.662,00	12.651.347.490,00	87,49
Belanja Modal Tanah	57.936.274.843,00	3.897.470.000,00	3.450.800.000,00	88,54
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	169.955.200,00	278.575.000,00	253.826.900,00	91,12
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2.253.000.400,00	292.000.000,00	273.359.750,00	93,62
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	3.878.087.852,00	9.592.650.662,00	8.673.360.840,00	90,42
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	-	400.000.000,00		
Jumlah	82.194.061.476,00	35.902.305.877,00	30.435.496.369,00	84,77

Tabel 3.24
Realisasi Anggaran Program Kegiatan Pendukung Kinerja TA 2022

No.	Capaian Realisasi IKU dan Program										Capaian Realisasi Kegiatan/Sub Kegiatan			
	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian	Program	Indikator	Anggaran	Realisasi	Capaian	Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Perumahan dan Kawasan Permukiman	a. wilayah permukiman bebas kumuh	99,91	97,69	97,78	Program kawasan permukiman	Persentase penurunan kawasan kumuh	885.160.000,00	871.123.000,00	98,41%	1. Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	187.410.000,00	186.088.000,00	99,29%
											1.1. Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	187.410.000,00	186.088.000,00	99,29%
											2. Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	697.750.000,00	685.035.000,00	98,18%
											2.1. Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	689.100.000,00	685.035.000,00	99,41%
											2.2. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman kumuh	8.650.000,00	0,00	0,00%
	b. Persentase Rumah Layak Huni	83,52	89,02	106,59	Program pengembangan perumahan	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota	885.160.000,00	0	0,00%	1. Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	476.850.000,00	0,00	0,00%
											1.1. Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	476.850.000,00	0,00	100,00%
											1. Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	4.675.895.000,00	4.651.170.000,00	99,47%
	1.2. Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	1.572.195.000,00	1.553.945.000,00	98,84%										
	c. Persentase perumahan yang berkualitas	2,63	2,13	80,99	Program peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU)	Cakupan sarana dan prasarana lingkungan Kawasan dalam Kondisi Baik (%)	Persentase PSU perumahan yang ditangani dengan kondisi baik (%)	18.853.535.001,00	15.496.623.130,00	82,19%	1. Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	18.853.535.001,00	15.496.623.130,00	82,19%
											1.1. Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	18.700.745.001,00	15.496.623.130,00	82,87%
	Average					95,12	Average					82,89%		

No.	Capaian Realisasi IKU dan Program										Capaian Realisasi Kegiatan/Sub Kegiatan				
	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian	Program	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	
2	Meningkatnya kualitas manajemen pertanahan	a. Persentase tanah Pemerintah Kabupaten yang bersertifikat	100	24,31	24,31	Program penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	Persentase tanah yang dibebaskan sesuai kebutuhan lokasi (%)	100,00%	100,00%	100,00%	1.	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	4.121.400.000,00	3.615.629.000,00	87,73%
											1.1.	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	4.121.400.000,00	3.615.629.000,00	87,73%
		b. penanganan konflik-konflik pertanahan	100	100,00	100	Program penatagunaan tanah	Persentase penataan administrasi Tanah pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (%)	100,00%	42,23%	42,23%	1.	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	587.330.000,00	291.772.000,00	49,68%
						Program penyelesaian sengketa tanah garapan	Persentase advokasi pertanahan yang berhasil (%)	100,00%	100,00%	100,00%	1.	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	436.650.000,00	150.965.000,00	34,57%
											1.1.	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	150.680.000,00	140.807.000,00	93,45%
Average					62,16	Average					70,63%				

Tabel 3.25
Realisasi Anggaran Program Kegiatan Disperkimtan TA 2022

KODE	URAIAN	DPA	DPPA	PERUBAHAN	REALISASI	%	SISA
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		22.166.486.783,00	30.939.750.877,00	8.773.264.094,00	26.294.581.369,00	84,99%	4.645.169.508,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		5.485.100.183,00	5.799.620.876,00	314.520.693,00	5.275.665.239,00	90,97%	523.955.637,00
1.04.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.105.000,00	10.105.000,00	0,00	2.760.000,00	27,31%	7.345.000,00
1.04.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.365.000,00	2.365.000,00	0,00	0,00	0,00%	2.365.000,00
1.04.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00		0,00%	1.100.000,00
1.04.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00		0,00%	1.100.000,00
1.04.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	600.000,00	52,17%	550.000,00
1.04.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00		0,00%	1.150.000,00
1.04.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.160.000,00	2.160.000,00	0,00	2.160.000,00	100,00%	0,00
1.04.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.080.000,00	1.080.000,00	0,00		0,00%	1.080.000,00
1.04.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.874.086.584,00	2.890.412.377,00	16.325.793,00	2.726.368.053,00	94,32%	164.044.324,00
1.04.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.870.066.584,00	2.886.392.377,00	16.325.793,00	2.722.348.053,00	94,32%	164.044.324,00
1.04.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.010.000,00	2.010.000,00	0,00	2.010.000,00	100,00%	0,00
1.04.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2.010.000,00	2.010.000,00	0,00	2.010.000,00	100,00%	0,00
1.04.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.633.466.900,00	1.820.461.800,00	186.994.900,00	1.661.982.459,00	91,29%	158.479.341,00
1.04.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	231.289.800,00	338.729.700,00	107.439.900,00	318.439.700,00	94,01%	20.290.000,00
1.04.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	150.136.700,00	201.943.700,00	51.807.000,00	150.058.400,00	74,31%	51.885.300,00
1.04.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	50.762.400,00	71.362.400,00	20.600.000,00	64.497.568,00	90,38%	6.864.832,00
1.04.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	13.435.000,00	13.435.000,00	0,00	10.775.000,00	80,20%	2.660.000,00
1.04.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	2.750.000,00	2.750.000,00	0,00	1.260.000,00	45,82%	1.490.000,00
1.04.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.185.093.000,00	1.192.241.000,00	7.148.000,00	1.116.951.791,00	93,69%	75.289.209,00

KODE	URAIAN	DPA	DPPA	PERUBAHAN	REALISASI	%	SISA
1.04.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	396.352.199,00	408.352.199,00	12.000.000,00	300.614.039,00	73,62%	107.738.160,00
1.04.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	46.400.000,00	46.400.000,00	0,00	13.000.000,00	28,02%	33.400.000,00
1.04.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	85.098.000,00	85.098.000,00	0,00	47.008.039,00	55,24%	38.089.961,00
1.04.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	264.854.199,00	276.854.199,00	12.000.000,00	240.606.000,00	86,91%	36.248.199,00
1.04.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	571.089.500,00	670.289.500,00	99.200.000,00	583.940.688,00	87,12%	86.348.812,00
1.04.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	41.490.000,00	41.490.000,00	0,00	34.970.854,00	84,29%	6.519.146,00
1.04.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	237.430.000,00	202.820.000,00	(34.610.000,00)	162.647.227,00	80,19%	40.172.773,00
1.04.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	42.739.500,00	42.739.500,00	0,00	30.366.919,00	71,05%	12.372.581,00
1.04.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	48.550.000,00	48.550.000,00	0,00	43.785.938,00	90,19%	4.764.062,00
1.04.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	200.880.000,00	334.690.000,00	133.810.000,00	312.169.750,00	93,27%	22.520.250,00
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN		4.100.975.000,00	725.540.000,00	(3.375.435.000,00)	0,00	0,00%	725.540.000,00
1.04.02.2.01	Pendataan Penyediaan dan rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	121.860.000,00	217.790.000,00	95.930.000,00	0,00	0,00%	217.790.000,00
1.04.02.2.01.01	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	95.930.000,00	191.860.000,00	95.930.000,00	0,00	0,00%	191.860.000,00
1.04.02.2.01.05	Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	25.930.000,00	25.930.000,00	0,00	0,00	0,00%	25.930.000,00
1.04.02.2.02	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	30.900.000,00	30.900.000,00	0,00	0,00	0,00%	30.900.000,00
1.04.02.2.02.01	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	30.900.000,00	30.900.000,00	0,00	0,00	0,00%	30.900.000,00
1.04.02.2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	3.948.215.000,00	476.850.000,00	(3.471.365.000,00)	0,00	0,00%	476.850.000,00
1.04.02.2.03.01	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	476.850.000,00	476.850.000,00	0,00	0,00	0,00%	476.850.000,00
1.04.02.2.03.05	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	3.471.365.000,00	0,00	(3.471.365.000,00)	0,00	0,00%	0,00

KODE	URAIAN	DPA	DPPA	PERUBAHAN	REALISASI	%	SISA
PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN		477.810.000,00	885.160.000,00	407.350.000,00	871.123.000,00	98,41%	14.037.000,00
1.04.03.2.02	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	187.410.000,00	187.410.000,00	0,00	186.088.000,00	99,29%	1.322.000,00
1.04.03.2.02.01	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	187.410.000,00	187.410.000,00	0,00	186.088.000,00	99,29%	1.322.000,00
1.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	290.400.000,00	697.750.000,00	407.350.000,00	685.035.000,00	98,18%	12.715.000,00
1.04.03.2.03.02	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	254.600.000,00	689.100.000,00	434.500.000,00	685.035.000,00	99,41%	4.065.000,00
1.04.03.2.03.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	35.800.000,00	8.650.000,00	(27.150.000,00)	0,00	0,00%	8.650.000,00
PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH		555.400.000,00	4.675.895.000,00	3.916.495.000,00	4.651.170.000,00	99,47%	24.725.000,00
1.04.04.2.01	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	555.400.000,00	4.675.895.000,00	3.916.495.000,00	4.651.170.000,00	99,47%	24.725.000,00
1.04.04.2.01.01	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	505.950.000,00	3.103.700.000,00	2.393.750.000,00	3.097.225.000,00	99,79%	6.475.000,00
1.04.04.2.01.02	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	49.450.000,00	1.572.195.000,00	1.522.745.000,00	1.553.945.000,00	98,84%	18.250.000,00
PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)		11.547.201.600,00	18.853.535.001,00	7.306.333.401,00	15.496.623.130,00	82,19%	3.356.911.871,00
1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	11.547.201.600,00	18.853.535.001,00	7.306.333.401,00	15.496.623.130,00	82,19%	3.356.911.871,00
1.04.05.2.01.01	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	101.860.000,00	101.860.000,00	0,00	0,00	0,00%	101.860.000,00
1.04.05.2.01.02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	11.394.411.600,00	18.700.745.001,00	7.306.333.401,00	15.496.623.130,00	82,87%	3.204.121.871,00
1.04.05.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	50.930.000,00	50.930.000,00	0,00	0,00	0,00%	50.930.000,00

KODE	URAIAN	DPA	DPPA	PERUBAHAN	REALISASI	%	SISA
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN		60.027.574.693,00	4.962.555.000,00	(55.065.019.693,00)	4.140.915.000,00	83,44%	821.640.000,00
PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN		230.375.000,00	253.825.000,00	23.450.000,00	233.514.000,00	92,00%	20.311.000,00
2.10.04.2.01	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	230.375.000,00	253.825.000,00	23.450.000,00	233.514.000,00	92,00%	20.311.000,00
2.10.04.2.01.02	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	230.375.000,00	253.825.000,00	23.450.000,00	233.514.000,00	92,00%	20.311.000,00
PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH		58.945.584.693,00	4.121.400.000,00	(54.824.184.693,00)	3.615.629.000,00	87,73%	505.771.000,00
2.10.05.2.01	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	58.945.584.693,00	4.121.400.000,00	(54.824.184.693,00)	3.615.629.000,00	87,73%	505.771.000,00
2.04.1.04.01.01.19.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	58.945.584.693,00	4.121.400.000,00	(54.824.184.693,00)	3.615.629.000,00	87,73%	505.771.000,00
PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH		851.615.000,00	587.330.000,00	(264.285.000,00)	291.772.000,00	49,68%	295.558.000,00
2.10.10.2.01	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	851.615.000,00	587.330.000,00	(264.285.000,00)	291.772.000,00	49,68%	295.558.000,00
2.10.10.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	743.550.000,00	436.650.000,00	(306.900.000,00)	150.965.000,00	34,57%	285.685.000,00
2.10.10.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi	108.065.000,00	150.680.000,00	42.615.000,00	140.807.000,00	93,45%	9.873.000,00
JUMLAH		82.194.061.476,00	35.902.305.877,00	(46.291.755.599,00)	30.435.496.369,00	84,77%	5.466.809.508,00

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Disperkimtan Kabupaten Tapin Tahun 2022 ini menggambarkan kinerja dan evaluasi terhadap capaian keberhasilan maupun kegagalan di tahun anggaran berkenaan. Pencapaian sasaran diperoleh dengan cara membandingkan target dengan realisasi indikator sasaran melalui media formulir Pengukuran Kinerja sehingga dapat diketahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis organisasi. Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan indikator kinerja sasaran digunakan skala pengukuran ordinal sebagai berikut:

NO.	RENTANG CAPAIAN	KATEGORI CAPAIAN
1	Lebih dari 100 %	Baik Sekali (BS)
2	Lebih dari 75% s.d 100%	Baik (B)
3	55% s.d 75%	Cukup (C)
4	Kurang dari 55 %	Kurang (K)

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Capaian 2022			
			Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Predikat Capaian
1	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Perumahan dan Kawasan Permukiman	1.1. Persentase Luas wilayah permukiman bebas kumuh	99,91	97,69	97,78	B
		1.2. Persentase Rumah Layak Huni	83,52	89,02	106,59	BS
		1.3. Persentase perumahan yang berkualitas	2,63	2,13	80,99	B
SASARAN PERTAMA (AVERAGE)					95,12	B
2	Meningkatnya kualitas manajemen pertanahan	2.1. Persentase tanah Pemerintah Kabupaten yang bersertifikat	100,00	24,31	24,31	K
		2.2. Persentase penanganan konflik-konflik pertanahan	100,00	100,00	100,00	B
SASARAN KEDUA (AVERAGE)					62,16	C
KESELURUHAN (AVERAGE)					81,93	B

Hasil analisis pencapaian Pengukuran Kinerja terhadap Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Disperkimtan Kabupaten Tapin Tahun 2022, dapat disimpulkan bahwa secara pencapaian target sasaran strategis Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Tapin masuk dalam kategori rentang capaian **75% sd 100%** dengan kategori capaian **BAIK (B)**.

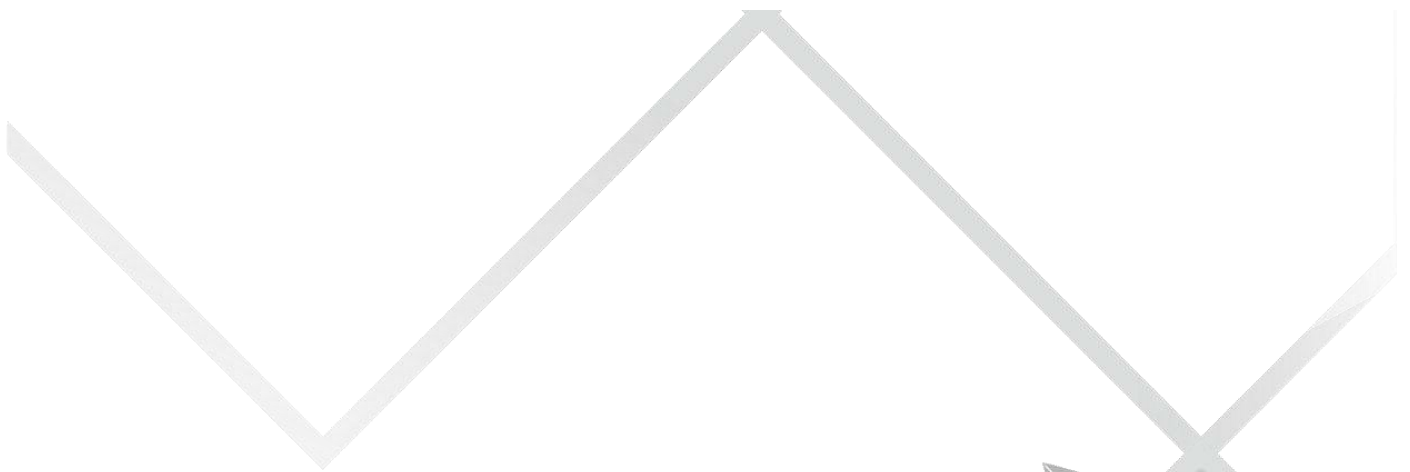
Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Disperkimtan Kabupaten Tapin kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kabupaten Tapin.

Rantau, 08 Maret 2023

Kepala Dinas,



YUMANTO, AP., M.AP.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19750328 199311 1 002



Provenance



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

Jalan Jend. Sudirman (By Pass) Rantau (71111) Kalimantan Selatan (0511) 31291

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN
PERTANAHAN KABUPATEN TAPIN

NOMOR : 27 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
KABUPATEN TAPIN TAHUN 2021

KEPALA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN
PERTANAHAN KABUPATEN TAPIN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Tapin Tahun 2021 dengan Keputusan Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Tapin
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan permukiman

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);

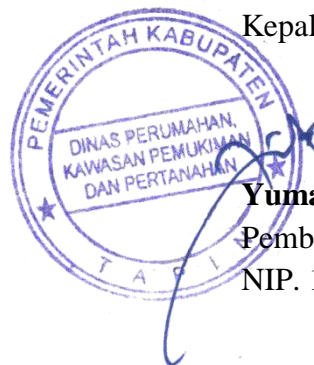
9. Peraturan Daerah Nomor 09 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 09 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Indikator Kinerja Utama Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Tapin Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Tapin untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun laporan kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen renstra.
- KETIGA : Keputusan Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Tapin ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rantau
Pada tanggal 09 Desember 2021

Kepala Dinas,



Yumanto, AP, M.AP
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19750328 199311 1 002

Tembusan :
1. Inspektur Kab. Tapin

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Tapin
 Nomor : 27 Tahun 2021
 Tanggal : 09 Desember 2021

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN TAPIN TAHUN 2021**

No.	Sasaran Strategis/Sasaran Outcome	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan (Makna Indikator, alasan pemilihan indikator, Cara Penghitungan Indikator)	Penanggung-jawab	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya kualitas Lingkungan perumahan dan Kawasan permukiman	Persentase Luas wilayah permukiman bebas kumuh	$\frac{\sum \text{LWBK}}{\sum \text{LW}} \times 100\%$ Keterangan : LWBK = Luas Wilayah Kawasan Permukiman bebas kumuh LW = Luas Wilayah Kawasan Permukiman	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Outcome /Output dan pihak terkait
		Persentase Rumah Layak Huni	$\frac{\sum \text{RLH}}{\sum \text{RS}} \times 100\%$ Keterangan : RLH = Rumah Layak Huni RS = Rumah Seluruhnya	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Outcome /Output dan pihak terkait
		Persentase perumahan yang berkualitas	$\frac{\sum \text{PK}}{\sum \text{PS}} \times 100\%$ Keterangan : PK = Perumahan Kualitas Baik PS = Perumahan Seluruhnya	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Outcome /Output dan pihak terkait

2	Meningkatnya kualitas manajemen pertanahan	Persentase tanah Pemerintah Kabupaten yang bersertifikat	$\frac{\sum P1}{\sum P2} \times 100\%$ <p>Keterangan : P1 = Jumlah tanah Pemkab yang bersertifikat P2 = Jumlah target tanah Pemkab yang akan disertifikasi</p>	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Outcome /Output dan pihak terkait
		Persentase penanganan konflik-konflik pertanahan	$\frac{\sum K1}{\sum K2} \times 100\%$ <p>Keterangan : K1 = Jumlah Konflik Pertanahan yang diselesaikan K2 = Jumlah Konflik Pertanahan</p>	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Outcome /Output dan pihak terkait



Kepala Dinas,

Yumanto, AP, M.AP

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19750328 199311 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

Jalan Jend. Sudirman (By Pass) Rantau (71111) Kalimantan Selatan (0511) 31291

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
KABUPATEN TAPIN

NOMOR : 13 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) PADA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN
PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN TAPIN

KEPALA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
KABUPATEN TAPIN

- Menimbang** :
- a. Dalam rangka penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Tapin, dipandang perlu membentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP);
 - b. bahwa nama yang tercantum dalam Lampiran keputusan ini dianggap cakap dan mampu untuk melaksanakan tugasnya sebagai Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP);
 - c. bahwa untuk maksud konsideran huruf a dan b tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Tapin.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 No.6, tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, tambahan Lembaga Negara Nomor 2756) sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108 tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);

4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tatacara Review atas Laporan Kinerja;
6. Peraturan Bupati Tapin Nomor 39 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
PERTAMA :
- Membentuk Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Tapin dengan susunan keanggotaan dan jabatan dalam tim sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari lampiran ini;
- KEDUA :
- Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat dari keputusan ini, akan dibebankan pada Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA SKPD) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Tapin;
- KETIGA :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Rantau
Pada tanggal 20 Januari 2023



Kepala Dinas,

Yumanto, AP, M.AP
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19750328 199311 1 002

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Kabupaten Tapin
Nomor : 13 Tahun 2023
Tanggal : 20 Januari 2023

**TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) PADA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN
PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN TAPIN**

No	JABATAN DALAM SKPD	JABATAN DALAM TIM
1	Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Penanggung Jawab
2	Sekretaris Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Ketua
3	Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan	Sekretaris
4	Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Anggota
5	Kepala Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU)	Anggota
6	Kepala Bidang Pertanahan	Anggota



Kepala Dinas,

Yumanto, AP, M.AP

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19750328 199311 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

Jalan Jend. Sudirman (By Pass) Rantau (71111) Kalimantan Selatan (0511) 31291

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
KABUPATEN TAPIN

NOMOR : 11 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) PADA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN
PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN TAPIN

KEPALA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
KABUPATEN TAPIN

- Menimbang : a. Dalam rangka penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Tapin, dipandang perlu membentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);
- b. Bahwa nama yang tercantum dalam Lampiran keputusan ini dianggap cakap dan mampu untuk melaksanakan tugasnya sebagai Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);
- c. bahwa untuk maksud konsideran huruf a dan b tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Tapin.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 No.6, tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, tambahan Lembaga Negara Nomor 2756) sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108 tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja instansi Pemerintah;

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tatacara Review atas Laporan Kinerja;
6. Peraturan Bupati Tapin Nomor 39 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah kabupaten Tapin

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Membentuk Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Tapin;
- KEDUA : Tugas dan Tanggung jawab Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sebagaimana tersebut dalam diktum pertama dalam lampiran keputusan ini;
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat dari keputusan ini, akan dibebankan pada Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA SKPD) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Tapin;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 07 Februari 2022 dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Rantau
Pada tanggal 07 Februari 2022

Kepala Dinas,



Yumanto, AP, M.AP
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19750328 199311 1 002

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman danPertanahan
Kabupaten Tapin
Nomor : 11 Tahun 2022
Tanggal : 07 Februari 2022

**TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) PADA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN
PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN TAPIN**

No	JABATAN DALAM SKPD	JABATAN DALAM TIM
1	Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Penanggung Jawab
2	Sekretaris Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Ketua
3	Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan	Sekretaris
4	Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Anggota
5	Kepala Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU)	Anggota
6	Kepala Bidang Pertanahan	Anggota



Kepala Dinas,

Yumanto, AP, M.AP
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19750328 199311 1 002

**RENCANA AKSI
RENJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TAPIN
PERIODE PELAKSANAAN TAHUN 2022**

No	Tujuan	Sasaran strategis	Indikator	Sat	Target	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten/kota Tahun Berjalan 2022		Target Per Triwulan								Unit Penanggung Jawab					
								9		10		11		12		13							
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10		11		12		13		14					
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
						PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	100	%	90,00	%	90,00	%	90,00	%	90,00	%	90,00	%	Sekretariat			
							Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100	%	5.485.100.183,00	100,000	%	1.854.221.730,00	10,891	%	1.393.311.526,00	10,891	%	1.224.151.526,00	10,891	%	1.013.415.401,00	Sekretariat
							Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu	100	%		53,85	%		7,69	%		53,85	%		7,69	%		Sekretariat
						Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan anggaran dan laporan capaian dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD tepat waktu	100	%	10.105.000,00	53,85	%	3.580.000,00	7,69	%	270.000,00	53,85	%	5.985.000,00	7,69	%	270.000,00	Sekretariat
							Jumlah laporan capaian dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	13	Laporan	5,00	Laporan	3,00	Laporan	4,00	Laporan	2,00	Laporan					Sekretariat	
						Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	4	Dokumen	2.365.000,00	1	Dokumen	-	0	Dokumen	-	3	Dokumen	2.365.000,00	0	Dokumen	-	Sekretariat
						Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD	1	Dokumen	1.100.000,00	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	1	Dokumen	1.100.000,00	0	Dokumen	-	Sekretariat
						Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	Dokumen	1.100.000,00	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	1	Dokumen	1.100.000,00	0	Dokumen	-	Sekretariat
						Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA - SKPD	1	Dokumen	1.150.000,00	1	Dokumen	1.150.000,00	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	Sekretariat
						Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA - SKPD	1	Dokumen	1.150.000,00	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	1	Dokumen	1.150.000,00	0	Dokumen	-	Sekretariat
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4	Dokumen	2.160.000,00	4	Dokumen	2.160.000,00	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	Sekretariat
						Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	Dokumen	1.080.000,00	1	Dokumen	270.000,00	1	Dokumen	270.000,00	1	Dokumen	270.000,00	1	Dokumen	270.000,00	Sekretariat
						Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	100	%	2.874.086.584,00	25,00	%	719.526.646,00		%	717.516.646,00		%	719.526.646,00		%	717.516.646,00	Sekretariat
							Persentase terlaksananya penyusunan laporan keuangan semesteran dan akhir tahun tepat waktu	100	%		50,00	%		0,00	%		50	%		0	%		Sekretariat
							Jumlah laporan keuangan semesteran dan akhir tahun	2	Laporan	1,00	Laporan	0	Laporan	1	Laporan	0	Laporan						Sekretariat
						Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Waktu penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12	bulan	2.870.066.584,00	3	bulan	717.516.646,00	3	bulan	717.516.646,00	3	bulan	717.516.646,00	3	bulan	717.516.646,00	Sekretariat
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Laporan	2.010.000,00	1	Laporan	2.010.000,00	-	Laporan	-	Laporan	-	Laporan	-	Laporan	-	Sekretariat
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan Semesteran SKPD	1	Laporan	2.010.000,00	0	Laporan	-	Laporan	-	1	Laporan	2.010.000,00	Laporan	-	Laporan	-	Sekretariat
						Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya penyediaan administrasi umum perangkat daerah	100	%	1.633.466.900	62,50	%	725.087.700,00	62,50	%	431.267.500,00	62,50	%	342.402.500,00	62,50	%	134.709.200,00	Sekretariat
							Waktu penyediaan Alat Tulis Kantor	12	bulan		3,00	bulan		3,00	bulan		3,00	bulan		3,00	bulan		Sekretariat
							Waktu penyediaan makanan dan minuman	12	bulan		3,00	bulan		3,00	bulan		3,00	bulan		3,00	bulan		Sekretariat
							Waktu penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12	bulan		3,00	bulan		3,00	bulan		3,00	bulan		3,00	bulan		Sekretariat
							Waktu pelaksanaan Tapin Expo 2022	1	kali		0,00	kali		0,00	kali		0,00	kali		0,00	kali		Sekretariat
							Waktu pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	12	bulan		3,00	bulan		3,00	bulan		3,00	bulan		3,00	bulan		Sekretariat
						Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah dokumen laporan penyediaan peralatan dan perlengkapan Kantor	4	Dokumen	231.289.800,00	1	Dokumen	188.635.200,00	1	Dokumen	21.280.000,00	1	Dokumen	11.850.000,00	1	Dokumen	9.524.600,00	Sekretariat
						Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah sub unit kerja yang mendapatkan penyediaan bahan logistik kantor	4	Sub unit kerja	150.136.700,00	4	Sub unit kerja	43.462.500,00	4	Sub unit kerja	42.962.500,00	4	Sub unit kerja	32.462.500,00	4	Sub unit kerja	31.249.200,00	Sekretariat
						Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah sub unit kerja yang mendapatkan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	4	Sub unit kerja	50.762.400,00	4	Sub unit kerja	15.000.000,00	4	Sub unit kerja	15.000.000,00	4	Sub unit kerja	15.000.000,00	4	Sub unit kerja	5.762.400,00	Sekretariat
						Penyediaan Bahan/Material	Jumlah dokumen laporan penyediaan bahan/material	4	Dokumen	13.435.000,00	1	Dokumen	4.500.000,00	1	Dokumen	8.935.000,00	1	Dokumen	-	1	Dokumen	-	Sekretariat
						Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Dokumen laporan fasilitasi kunjungan tamu	4	Dokumen	2.750.000,00	1	Dokumen	1.000.000,00	1	Dokumen	600.000,00	1	Dokumen	600.000,00	1	Dokumen	550.000,00	Sekretariat

Meningkatkan pelayanan sekretariat

Meningkatnya penyediaan administrasi perkantoran, sarana prasarana aparatur dan laporan kinerja/keuangan dokumen perencanaan perangkat daerah

Rata-rata capaian kinerja kegiatan sekretariat

% 100


No	Tujuan	Sasaran strategis	Indikator	Sat	Target	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Peringkat Daerah Kabupaten/kota Tahun Berjalan 2022		Target Per Triwulan								Unit Penanggung Jawab											
								9		10		11		12		13													
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp												
								Rp		Rp		Rp		Rp		Rp													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14																
						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah sub unit kerja yang terfasilitasi penyelenggaraan rapat koordinasi dankonsultasi	4	Sub unit kerja	1.185.093.000,00	4	Sub unit kerja	472.490.000,00	4	Sub unit kerja	342.490.000,00	4	Sub unit kerja	282.490.000,00	4	Sub unit kerja	87.623.000,00	Sekretariat						
						Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah (bulan)	100	%	55,00	%	55,00	%	55,00	%	55,00	%	55,00	%	55,00	%	55,00	%	Sekretariat					
							Waktu penyediaan jasa surat menyurat	12	bulan	396.352.199	3,00	bulan	85.817.384,00	3,00	bulan	115.797.380,00	3,00	bulan	76.857.380,00	3,00	bulan	117.880.055,00	Sekretariat						
							Waktu penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	12	bulan		3,00	bulan		3,00	bulan		3,00	bulan		3,00	bulan		3,00	bulan	Sekretariat				
							Waktu penyediaan jasa Pegawai Non PNS	12	bulan		3,00	bulan		3,00	bulan		3,00	bulan		3,00	bulan		3,00	bulan	Sekretariat				
						Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah sub unit kerja yang mendapatkan penyediaan jasa surat menyurat	4	Sub unit kerja	46.400.000,00	4	Sub unit kerja	6.960.000,00	4	Sub unit kerja	39.440.000,00	4	Sub unit kerja	-	4	Sub unit kerja	-	-	Sekretariat					
						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	Bulan	85.098.000,00	3	Bulan	23.274.504,00	3	Bulan	21.274.500,00	3	Bulan	21.274.500,00	3	Bulan	19.274.496,00	3	Bulan	19.274.496,00	Sekretariat			
						Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah sub unit kerja yang mendapatkan penyediaan jasa pelayanan umum kantor	4	Sub unit kerja	264.854.199,00	4	Sub unit kerja	55.582.880,00	4	Sub unit kerja	55.082.880,00	4	Sub unit kerja	55.582.880,00	4	Sub unit kerja	55.582.880,00	4	Sub unit kerja	98.605.559,00	Sekretariat			
						Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	%	100,00	%	10,89	%	10,89	%	10,89	%	10,89	%	10,89	%	10,89	%	10,89	%	Sekretariat			
							Waktu penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	12	bulan	571.089.500	3,00	bulan	320.210.000	3,00	bulan	128.460.000	3,00	bulan	79.380.000	3,00	bulan	43.039.500	3,00	bulan	43.039.500	Sekretariat			
							Waktu pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	12	bulan		3,00	bulan		3,00	bulan		3,00	bulan		3,00	bulan		3,00	bulan		Sekretariat			
							Waktu pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	12	bulan		3,00	bulan		3,00	bulan		3,00	bulan		3,00	bulan		3,00	bulan		Sekretariat			
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas jabatan yang dipelihara (unit)	1	Unit	41.490.000,00	1	Unit	17.500.000,00	1	Unit	13.000.000,00	1	Unit	8.500.000,00	1	Unit	2.490.000,00	1	Unit	2.490.000,00	Sekretariat			
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perzinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara (unit)	16	Unit	237.430.000,00	16	Unit	75.000.000,00	16	Unit	92.400.000,00	16	Unit	45.900.000,00	16	Unit	24.130.000,00	16	Unit	24.130.000,00	Sekretariat			
						Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit yang dipelihara (unit)	37	Unit	42.739.500,00	37	Unit	12.080.000,00	37	Unit	10.310.000,00	37	Unit	12.230.000,00	37	Unit	8.119.500,00	37	Unit	8.119.500,00	Sekretariat			
						Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah bangunan gedung kantor yang dipelihara (unit)	1	Unit	48.550.000,00	1	Unit	14.750.000,00	1	Unit	12.750.000,00	1	Unit	12.750.000,00	1	Unit	8.300.000,00	1	Unit	8.300.000,00	Sekretariat			
						Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Luas Pemeliharaan/rehabilitasi (m2)	450	m2	200.880.000,00	450	m2	200.880.000,00	m2	m2		m2	m2		m2	m2		m2	m2		Sekretariat			
						PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten	100	%	100	%	0	%	0	%	0	%	0	%	0	%	0	%	0	%	Bidang PKP			
							Persentase fasilitas penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten	100	%	4.100.975.000,00	100	%	121.860.000,00	0	%	3.877.865.000,00	0	%	83.250.000,00	0	%	0	%	0	%	18.000.000,00	Bidang PKP		
						Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Persentase dokumen yang tersedia	100	%	121.860.000,00	100,0	%	121.860.000,00	0,0	%	-	0,0	%	-	0,0	%	-	0,0	%	-	Bidang PKP			
						Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	1	Dokumen	95.930.000,00	1	Dokumen	95.930.000,00		Dokumen	-		Dokumen	-		Dokumen	-		Dokumen	-	Bidang PKP			
						Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam/atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	1	Dokumen	25.930.000,00	1	Dokumen	25.930.000,00		Dokumen			Dokumen			Dokumen			Dokumen		Bidang PKP			
						Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Persentase tingkat pemahaman peserta sosialisasi	90	%	30.900.000,00	0,0	%	-	90,0	%	30.900.000,00	0,0	%	-	0,0	%	-	0,0	%	-	Bidang PKP			
						Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan (Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan)	Jumlah Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	2	kali	30.900.000,00	0,0	kali	-	2	kali	30.900.000,00	0	kali	-	0	kali	-	0	kali	-	Bidang PKP			
						Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Persentase Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	100	%	3.948.215.000,00	0,0	%	-	100,0	%	3.846.965.000,00	0,0	%	83.250.000,00	0,0	%	0	%	0	%	18.000.000,00	Bidang PKP		
						Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah unit rehabilitasi rumah bagi korban bencana	23	Unit	476.850.000,00	0	Unit	-	23	Unit	476.850.000,00	0	Unit	-	0	Unit	-	0	Unit	-	0	Unit	-	Bidang PKP
						Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Rusuk yang dibangun untuk masyarakat terdampak	25	unit	3.471.365.000,00	0	unit	-	25	unit	3.370.115.000,00	0	unit	83.250.000,00	0	unit	0	unit	0	unit	18.000.000,00	Bidang PKP		
						PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Rasio Rumah tidak Layak Huni yang tertangani	1,45	%	555.400.000,00	0,28	%	507.400.000,00	0	%	33.000.000,00	0	%	15.000.000,00	0	%	0	%	0	%	-	Bidang PKP		
							Persentase Peningkatan kualitas Rumah Tidak Layak Huni	0,28	%		0,28	%		0	%		0	%		0	%		0	%		Bidang PKP			
						Pencegahan Perumahan dan Kawasan	persentase realisasi peningkatan kualitas RTLH di luar kawasan kumuh sesuai target	100	%	555.400.000,00	68,42	%	507.400.000,00	15,79	%	33.000.000,00	15,79	%	15.000.000,00	0,00	%	0,00	%	0,00	%	-	Bidang PKP		

No	Tujuan	Sasaran strategis	Indikator	Sat	Target	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten/kota Tahun Berjalan 2022								Unit Penanggung Jawab										
								I				II		III			IV									
								K		Rp		K		Rp			K		Rp							
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10		11		12		13		14								
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp									
						Perumahan Kumuh pada Daerah Kabupaten/kota	Jumlah sarana dan prasarana rumah sederhana sehat	3	buah	3	buah	0,00	buah	0,00	buah	0,00	buah	Bidang PKP								
						Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Perumahan Kumuh diluar Kawasan Perumahan Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah unit perbaikan RTLH di luar kawasan kumuh	10	Unit	505.950.000,00	10	Unit	487.950.000,00	0	Unit	18.000.000,00	0	Unit	Bidang PKP							
						Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU diluar Kawasan Perumahan Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Waktu pendampingan kerjasama perbaikan rumah tidak layak huni/Bantuan Stimulan/Perumahan Swadaya	9	Bulan	49.450.000,00	3	Bulan	19.450.000,00	3	Bulan	15.000.000,00	3	Bulan	15.000.000,00	0	Bulan	Bidang PKP				
						PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase penurunan/ penanganan kawasan kumuh	1,1	%	477.810.000,00	1,10	%	389.310.000,00	%	33.450.000,00	%	33.450.000,00	%	21.600.000,00	Bidang PKP						
						Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Perumahan Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan penanganan kawasan kumuh	100	%		100	%	0	%	0	%	0	%	0	%	Bidang PKP					
						Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Perumahan Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Waktu Pendataan Rumah Tidak Layak Huni dan Backlog Perumahan	12	bulan	187.410.000,00	3	bulan	122.610.000,00	3	bulan	21.600.000,00	3	bulan	21.600.000,00	3	bulan	Bidang PKP				
						Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Perumahan Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah laporan pelaksanaan pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu	1	laporan		0	laporan	1	laporan	0	laporan	0	laporan	0	laporan	Bidang PKP					
						Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Perumahan Kumuh (Dinas Perumahan, Kawasan Perumahan dan Pertanahan)	Jumlah Dokumen Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Perumahan Kumuh	1	Dokumen	187.410.000,00	1	Dokumen	122.610.000,00	0	Dokumen	21.600.000,00	0	Dokumen	21.600.000,00	0	Dokumen	21.600.000,00	Bidang PKP			
						Peningkatan Kualitas Kawasan Perumahan Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	persentase luasan kumuh yang tertangani	1,1	%	290.400.000,00	1,1	%	266.700.000,00	0	%	11.850.000,00	0	%	11.850.000,00	0	%	-	Bidang PKP			
						Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Renovasi / Rehabilitasi RTLH di Perumahan Kumuh	10	Unit	254.600.000,00	10	Unit	254.600.000,00	0	Unit	-	0	Unit	-	0	Unit	-	Bidang PKP			
						Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Perumahan Kumuh	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pokja PKP	9	Bulan	35.800.000,00	3	Bulan	12.100.000,00	3	Bulan	11.850.000,00	3	Bulan	11.850.000,00	0	Bulan	-	Bidang PKP			
						PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Cakupan sarana dan prasarana lingkungan kawasan dalam Kondisi Baik (%)	63,89	%	13.164.279.800,00	21,30	%	21,30	%	21,30	%	21,30	%	21,30	%	0,00	%	0,00	%	Bidang PSU	
						PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase PSU perumahan yang ditangani dengan kondisi baik (%)	2,63	%	13.164.279.800,00	0,00	%	8.711.781.800,00	2,63	%	2.006.882.861,00	0,00	%	1.401.174.996,00	0,00	%	1.044.440.143,00	0,00	%	Bidang PSU	
						PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Cakupan RTH dan Taman yang dikelola (%)	100	%	13.164.279.800,00	100,00	%	100,00	%	100,00	%	100,00	%	100,00	%	100,00	%	100,00	%	Bidang PSU	
						Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Persentase perumahan terfasilitasi kecukupan PSU dalam kondisi berfungsi baik	2,63	%	13.164.279.800,00	0,00	%	2,63	%	-	%	-	%	-	%	-	%	-	%	Bidang PSU	
						Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Persentase Developer Perumahan yang Menyerahkan Fasilitas Umum/Fasilitas Khusus.	14	%	13.164.279.800,00	0,00	%	14	%	0	%	0	%	0	%	0	%	0	%	Bidang PSU	
						Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Jumlah ruang terbuka hijau (RTH) publik yang terpelihara dengan baik	2	kawasan	13.164.279.800,00		kawasan		kawasan		kawasan		kawasan		kawasan		kawasan		kawasan	Bidang PSU	
						Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Jumlah pembangunan/rehabilitasi drainase kawasan perumahan dan permukiman	0	kawasan	13.164.279.800,00		kawasan	8.711.781.800,00		kawasan	2.006.882.861,00		kawasan	1.401.174.996,00		kawasan	1.044.440.143,00		kawasan	Bidang PSU	
						Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Waktu pemeliharaan penerangan jalan umum (PJU)	12	bulan	13.164.279.800,00		bulan			bulan			bulan		bulan		bulan		bulan	Bidang PSU	
						Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Terpenuhinya kenyamanan pengguna jalan umum pada malam hari	1	tahun	13.164.279.800,00		tahun			tahun			tahun		tahun		tahun		tahun	Bidang PSU	
						Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Waktu Pembangunan dan rehabilitasi penerangan jalan umum (PJU)	12	bulan	13.164.279.800,00		bulan			bulan			bulan		bulan		bulan		bulan	Bidang PSU	
						Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Jumlah dokumen Detail Engineering Design (DED) PSU Perumahan	2	Dokumen	101.860.000,00	0	Dokumen	-	2	Dokumen	101.860.000,00	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	Bidang PSU
						Penyediaan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Persentase Rumah Yang Dilayani Bantuan PSU Pada Perumahan	90	%	13.011.489.800,00	0	%	0	%	0	%	90	%	0	%	0	%	0	%	Bidang PSU	
						Penyediaan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Persentase RTH Publik yang terpelihara dengan baik	100	%	13.011.489.800,00	100	%	8.661.361.800,00	100	%	1.904.512.861,00	100	%	1.401.174.996,00	100	%	1.044.440.143,00	100	%	Bidang PSU	
						Penyediaan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Persentase pemeliharaan penerangan jalan	73	%	13.011.489.800,00	18,25	%	18,25	%	18,25	%	18,25	%	18,25	%	18,25	%	18,25	%	Bidang PSU	
						Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum Perumahan	Persentase Developer Perumahan yang Menyerahkan Fasilitas Umum/Fasilitas Khusus.	14	%	50.930.000,00	14	%	50.420.000,00	0	%	510.000,00	0	%	-	0	%	-	0	%	-	Bidang PSU
						PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase advokasi pertanahan yang berhasil	100	%	230.375.000,00	100,00	%	113.275.000,00	100,00	%	43.150.000,00	100,00	%	43.150.000,00	100,00	%	30.800.000,00	100,00	%	Bidang Pertanahan	
						PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase laporan persoalan pertanahan yang difasilitasi	100	%	230.375.000,00	100	%	113.275.000,00	100	%	43.150.000,00	100	%	43.150.000,00	100	%	30.800.000,00	100	%	Bidang Pertanahan	

No	Tujuan	Sasaran strategis	Indikator	Sat	Target	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten/kota Tahun Berjalan 2022		Target Per Triwulan								Unit Penanggung Jawab					
								9		10		11		12		13							
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10		11		12		13		14					
						Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Waktu fasilitasi penyelesaian konflik-konflik pertanahan	12	bulan	230.375.000,00	3	bulan	113.275.000,00	3	bulan	43.150.000,00	3	bulan	43.150.000,00	3	bulan	30.800.000,00	Bidang Pertanahan
							jumlah penyaluhan hukum pertanahan	3	Kali		3	Kali		0	Kali		0	Kali		0	Kali		Bidang Pertanahan
				%	100	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan penyelenggaraan fasilitasi persoalan/sengketa tanah	1	Dokumen	230.375.000,00	0	Dokumen	113.275.000,00	0	Dokumen	43.150.000,00	0	Dokumen	43.150.000,00	1	Dokumen	30.800.000,00	Bidang Pertanahan
						PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Persentase tanah yang dibebaskan sesuai kebutuhan lokasi (%)	100	%	58.945.584.693,00	100	%	3.851.448.543,00	100	%	54.955.786.150,00	100	%	122.300.000,00	100	%	16.050.000,00	Bidang Pertanahan
						Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase tanah yang dibebaskan sesuai kebutuhan luas	100	%	58.945.584.693,00	100	%	3.851.448.543,00	100	%	54.955.786.150,00	0	%	122.300.000,00	0	%	16.050.000,00	Bidang Pertanahan
						Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan ganti kerugian dan santunan tanah	1	Laporan	58.945.584.693,00	0	Laporan	3.851.448.543,00	1	Laporan	54.955.786.150,00	0	Laporan	122.300.000,00	0	Laporan	16.050.000,00	Bidang Pertanahan
						PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Persentase cakupan data penguasaan, pemilikan, penggunaan dan informasi pertanahan	18,18	%	851.615.000,00	18,18	%	297.212.497,00	0,00	%	245.866.668,00	0,00	%	196.377.501,00	0,00	%	112.158.334,00	Bidang Pertanahan
							Persentase penataan administrasi Tanah pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (%)	100	%		25,71	%		31,43	%		24,00	%		18,86	%		Bidang Pertanahan
						Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Persentase usulan penyertifikatan aset tanah SKPD terverifikasi BPN	100	%		25,71	%		31,43	%		24,00	%		18,86	%		Bidang Pertanahan
							Jumlah sistem informasi pertanahan yang dibuat	1	buah	851.615.000,00	1,00	buah	297.212.497,00	0,00	buah	245.866.668,00	0,00	buah	196.377.501,00	0,00	buah	112.158.334,00	Bidang Pertanahan
							Jumlah dokumen survey dan pendataan pertanahan	1	Dokumen		1,00	Dokumen		0,00	Dokumen		0,00	Dokumen		0,00	Dokumen		Bidang Pertanahan
							Jumlah sosialisasi sistem pendaftaran tanah	3	kali		3,00	kali		0,00	kali		0,00	kali		0,00	kali		Bidang Pertanahan
						Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Jumlah usulan sertifikasi aset tanah pemerintah daerah	175	bidang	743.550.000,00	45	bidang	206.887.497,00	55	bidang	239.566.668,00	42	bidang	190.337.501,00	33	bidang	106.758.334,00	Bidang Pertanahan
						Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	Jumlah sosialisasi pertanahan	3	kali	108.065.000,00	2	kali	90.325.000,00	1	kali	6.300.000,00	0	kali	6.040.000,00	0	kali	5.400.000,00	Bidang Pertanahan
Jumlah Anggaran dan Realisasi Seluruh Program										83.811.139.676,00			15.846.509.570,00			62.589.312.205			3.118.854.023			2.256.463.878	

Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Kabupaten Tapin

Yumanto, AP., MAP.
Pegawai Utama Muda (IV/c)
NIP. 19750328 199311 1 002



**EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH LINGKUP KABUPATEN/KOTA
RENJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TAPIN MONEY TRIWULAN
PERIODE PELAKSANAAN TAHUN 2022**

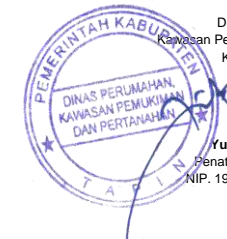
No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten/kota Tahun Berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2022 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (%)		Unit Penanggung Jawab					
						I		II		III		IV											
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						K	Rp	K	Rp	K
1	2	3	4	7		8		9		10		11		12		13 = (12/7x100)		16					
	Meningkatnya penyediaan administrasi perkantoran, sarana prasarana aparatur dan laporan kinerja/keuangan dokumen perencanaan perangkat daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	100	%	5.485.100.183,00	58,75	%	503.044.560,00	58,75	%	1.319.987.856,00	58,75	%	58,75	%	3.544.486.228,00	58,75	64,62	Sekretariat			
			Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100	%		10,891	%		10,891	%		10,891	%		21,78		%			21,782		
			Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu	100	%		53,85	%		7,69	%		7,69	%		61,54		%			61,54		
	Terlaksananya Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan anggaran dan laporan capaian dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD tepat waktu	100	%	10.105.000,00	53,85	%	2.760.000,00	7,69	%	5,00	%	0,00	%	92,31	%	92,31	27,31	Sekretariat			
			Jumlah laporan capaian dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	13	Laporan		7,00	Laporan		1,00	Laporan		5,00		Laporan		0,00				Laporan	13,00	Laporan
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	4	Dokumen	2.365.000,00	1	Dokumen	-	0	Dokumen	-	3	Dokumen	-	Dokumen	4	Dokumen	-	100,00	0,00	Sekretariat		
	Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD	1	Dokumen	1.100.000,00	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	1	Dokumen	-	Dokumen	1	Dokumen	-	100,00	0,00	Sekretariat		
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	Dokumen	1.100.000,00	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	1	Dokumen	-	Dokumen	1	Dokumen	-	100,00	0,00	Sekretariat		
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA - SKPD	1	Dokumen	1.150.000,00	1	Dokumen	600.000,00	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	Dokumen	1	Dokumen	600.000	100,00	52,17	Sekretariat		
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA - SKPD	1	Dokumen	1.150.000,00	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	Dokumen	-	Dokumen	-	0,00	0,00	Sekretariat		
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4	Dokumen	2.160.000,00	4	Dokumen	2.160.000,00	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	Dokumen	4	Dokumen	2.160.000	100,00	100,00	Sekretariat		
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	Dokumen	1.080.000,00	1	Dokumen	-	1	Dokumen	-	1	Dokumen	-	Dokumen	1	Dokumen	-	100,00	0,00	Sekretariat		
Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan (%)																85,71	21,74						
Predikat Kinerja Sub kegiatan																T	ST						
	Terlaksananya administrasi gaji, tunjangan dan pelaporan	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	100	%	2.874.086.584,00	100,00	%	368.165.969,00	100,00	%	667.070.810,00	25,00	%	25,00	%	62,50	%	2.018.897.010,00	62,50	70,24	Sekretariat	
			Persentase terlaksananya penyusunan laporan keuangan semesteran dan akhir tahun tepat waktu	100	%		50,00	Laporan		0,00	Laporan		50,00	Laporan		0,00		Laporan		50,00			Laporan
			Jumlah laporan keuangan semesteran dan akhir tahun	2	Laporan		1,00	Laporan		0,00	Laporan		1,00	Laporan		0,00		Laporan		2,00			Laporan
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Waktu penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12	bulan	2.870.066.584,00	3	bulan	366.155.969,00	3	bulan	667.070.810,00	3	bulan	981.650.231,00	3	bulan	-	12	bulan	2.014.877.010	100,00	70,20	Sekretariat
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Laporan	2.010.000,00	1	Laporan	2.010.000,00	0	Laporan	-	0	Laporan	-	0	Laporan	-	1	Laporan	2.010.000	100,00	100,00	Sekretariat
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan Semesteran SKPD	1	Laporan	2.010.000,00	0	Laporan	-	0	Laporan	-	1	Laporan	2.010.000,00	0	Laporan	-	1	Laporan	2.010.000	100,00	100,00	Sekretariat
Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan (%)																100,00	90,07						
Predikat Kinerja Sub kegiatan																T	T						
	Tersedianya jasa administrasi dan komunikasi perkantoran	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya penyediaan administrasi umum perangkat daerah	100	%	1.633.466.900	62,50	%	92.065.230,00	62,50	%	475.687.233,00	62,50	%	62,50	%	62,50	%	1.017.112.164,00	62,50	62,27	Sekretariat	
			Waktu penyediaan Alat Tulis Kantor	12	bulan		3,00	bulan		3,00	bulan		3,00	bulan		3,00		bulan		12,00			bulan
			Waktu penyediaan makanan dan minuman	12	bulan		3,00	bulan		3,00	bulan		3,00	bulan		3,00		bulan		12,00			bulan
			Waktu penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12	bulan		3,00	bulan		3,00	bulan		3,00	bulan		3,00		bulan		12,00			bulan

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten/kota Tahun Berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2022 yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (%)		Unit Penanggung Jawab				
						I		II		III		IV		11		12						13 = (12/7x100)			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	13 = (12/7x100)	16														
			Waktu pelaksanaan Tapin Expo 2022	1	kali	0,00	kali	0,00	kali	0,00	kali	1,00	kali	1,00	kali	100,00			Sekretariat						
			Waktu pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	12	bulan	3,00	bulan	3,00	bulan	3,00	bulan	3,00	bulan	12,00	bulan	100,00			Sekretariat						
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah dokumen laporan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	4	Dokumen	231.289.800,00	1	Dokumen	5.986.000,00	1	Dokumen	82.676.500,00	1	Dokumen	19.328.500,00	1	Dokumen	-	4	Dokumen	107.991.000	100,00	46,69	Sekretariat	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah sub unit kerja yang mendapatkan penyediaan barang logistik kantor	4	Sub unit kerja	150.136.700,00	4	Sub unit kerja	7.087.500,00	4	Sub unit kerja	29.871.500,00	4	Sub unit kerja	38.041.900,00	4	Sub unit kerja	-	4	Sub unit kerja	75.000.900	100,00	49,96	Sekretariat	
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah sub unit kerja yang mendapatkan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	4	Sub unit kerja	50.762.400,00	4	Sub unit kerja	215.000,00	4	Sub unit kerja	22.818.277,00	4	Sub unit kerja	11.008.112,00	4	Sub unit kerja	-	4	Sub unit kerja	34.041.389	100,00	67,06	Sekretariat	
		Penyediaan Bahan/Material	Jumlah dokumen laporan penyediaan bahan/material	4	Dokumen	13.435.000,00	1	Dokumen	-	1	Dokumen	-	1	Dokumen	-	1	Dokumen	-	4	Dokumen	-	100,00	0,00	Sekretariat	
		Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Dokumen laporan fasilitas kunjungan tamu	4	Dokumen	2.750.000,00	1	Dokumen	-	1	Dokumen	710.000,00	1	Dokumen	550.000,00	1	Dokumen	-	4	Dokumen	1.260.000	100,00	45,82	Sekretariat	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah sub unit kerja yang terfasilitasi penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi	4	Sub unit kerja	1.185.093.000,00	4	Sub unit kerja	78.776.730,00	4	Sub unit kerja	339.610.956,00	4	Sub unit kerja	380.431.189,00	4	Sub unit kerja	-	4	Sub unit kerja	798.818.875	100,00	67,41	Sekretariat	
Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan (%)																100,00	46,15								
Predikat Kinerja Sub Kegiatan																ST	SR								
		Tersedianya sumber daya, peralatan dan mesin perkantoran	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah (bulan)	100	%	55,00	%	55,00	%	55,00	%	55,00	%	100,00	%	100,00	%	100,00	%	169.455.234	42,75		Sekretariat	
				Waktu penyediaan jasa surat menyurat	12	bulan	3,00	bulan	3,00	bulan	3,00	bulan	3,00	bulan	12,00	bulan								Sekretariat	
				Waktu penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	12	bulan	3,00	bulan	3,00	bulan	3,00	bulan	3,00	bulan	12,00	bulan								Sekretariat	
				Waktu penyediaan jasa Pegawai Non PNS	12	bulan	3,00	bulan	3,00	bulan	3,00	bulan	3,00	bulan	12,00	bulan								Sekretariat	
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan)	Jumlah sub unit kerja yang mendapatkan penyediaan jasa surat menyurat	4	Sub unit kerja	46.400.000,00	4	Sub unit kerja	2.000.000,00	4	Sub unit kerja	1.000.000,00	4	Sub unit kerja	2.000.000,00	4	Sub unit kerja	-	4	Sub unit kerja	5.000.000	100,00	10,78	Sekretariat
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan)	Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	Bulan	85.098.000,00	3	Bulan	8.573.361,00	3	Bulan	16.682.988,00	3	Bulan	9.598.885,00	3	Bulan	-	12	Bulan	34.855.234	100,00	40,96	Sekretariat
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan)	Jumlah sub unit kerja yang mendapatkan penyediaan jasa pelayanan umum kantor	4	Sub unit kerja	264.854.199,00	4	Sub unit kerja	16.200.000,00	4	Sub unit kerja	64.800.000,00	4	Sub unit kerja	48.600.000,00	4	Sub unit kerja	-	4	Sub unit kerja	129.600.000	100,00	48,93	Sekretariat
Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan (%)																100,00	33,56								
Predikat Kinerja Sub Kegiatan																ST	SR								
		Tersedianya penunjang operasional dan pemeliharaan barang milik daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	%	10,89	%	10,89	%	109,95	%	10,89	%	109,95	%	109,95	%	109,95	%	109,95	336.261.820	58,88		Sekretariat
				Waktu penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	12	bulan	3,00	bulan	3,00	bulan	3,00	bulan	3,00	bulan	12,00	bulan								Sekretariat	
				Waktu pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	12	bulan	3,00	bulan	3,00	bulan	3,00	bulan	3,00	bulan	12,00	bulan								Sekretariat	
				Waktu pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	12	bulan	3,00	bulan	3,00	bulan	3,00	bulan	3,00	bulan	12,00	bulan								Sekretariat	
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan Dinas jabatan yang dipelihara (unit)	1	Unit	41.490.000,00	1	Unit	3.050.000,00	1	Unit	16.670.000,00	1	Unit	10.150.854,00	1	Unit	-	1	Unit	29.870.854	100,00	72,00	Sekretariat
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan Dinas operasional yang dipelihara (unit)	16	Unit	237.430.000,00	16	Unit	8.820.000,00	16	Unit	47.470.097,00	16	Unit	37.460.362,00	16	Unit	-	16	Unit	93.750.459	100,00	39,49	Sekretariat
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit yang dipelihara (unit)	37	Unit	42.739.500,00	37	Unit	1.410.000,00	37	Unit	9.260.790,00	37	Unit	8.341.029,00	37	Unit	-	37	Unit	19.011.819	100,00	44,48	Sekretariat
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah bangunan gedung kantor yang dipelihara (unit)	1	Unit	48.550.000,00	1	Unit	-	1	Unit	11.345.938,00	1	Unit	490.000,00	1	Unit	-	1	Unit	11.835.938	100,00	24,38	Sekretariat

No	Sasaran	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten/kota Tahun Berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2022 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (%)		Unit Penanggung Jawab				
						I		II		III		IV		11		12							13 = (12/7x100)			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	7		8		9		10		11		12		13 = (12/7x100)		16								
	Meningkatnya kawasan bebas kumuh	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase penurunan/ penanganan kawasan kumuh	1,1	%	477.810.000,00	0,75	%	183.700.000,00		%	64.835.000,00		%	32.600.000,00		%	0,75	%	281.135.000	68,18	58,84	Bidang PKP			
	Tersedianya dokumen rencana penanganan kumuh	Penaatan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan penanganan kawasan kumuh	100	%		0	%		0	%		100	%		0	%	100,00	%		100,00		31,00	Bidang PKP		
			Waktu Pendataan Rumah Tidak Layak Huni dan Backlog Perumahan	12	bulan	187.410.000,00	3	bulan	7.200.000,00	3	bulan	28.800.000,00	3	bulan	22.100.000,00	3	bulan	12,00	bulan	58.100.000	100,00			Bidang PKP		
			Jumlah laporan pelaksanaan pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu	1	laporan		0	laporan		0	laporan		0	laporan		1	laporan	1,00	laporan		100,00			Bidang PKP		
	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh (Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan)		Jumlah Dokumen Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	1	Dokumen	187.410.000,00	0	Dokumen	7.200.000,00	0	Dokumen	28.800.000,00	1	Dokumen	22.100.000,00	0	Dokumen	1	Dokumen	58.100.000	100,00	31,00	Bidang PKP			
Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan (%)																100,00	31,00									
Predikat Kinerja Sub Kegiatan																ST	SR									
	Tertakutnya penanganan kawasan kumuh	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	persentase luasan kumuh yang tertangani	1,10	%	290.400.000,00	0,75	%	176.500.000,00	0,35	%	36.035.000,00	1,1	%	10.500.000,00		%	1,10	%	223.035.000	100,00	76,80	Bidang PKP			
		Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan)	Jumlah Renovasi / Rehabilitasi RTLH di Permukiman Kumuh	10	Unit	254.600.000,00	10	Unit	176.500.000,00	0	Unit	36.035.000,00	0	Unit	10.500.000,00		Unit	10	Unit	223.035.000	100,00	87,60	Bidang PKP			
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh (Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan)	Tertakutnya Koordinasi dan Sinkronisasi Pokja PKP	9	Bulan	35.800.000,00	0	Bulan		0	Bulan		0	Bulan		0	Bulan		Bulan		0,00	0,00	Bidang PKP			
Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan (%)																50,00	43,80									
Predikat Kinerja Sub Kegiatan																SR	SR									
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)																100,00	53,90									
Predikat Kinerja Kegiatan																ST	R									
	Meningkatnya Prasarana Sarana dan Utilitas Perumahan dengan kondisi baik	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Cakupan sarana dan prasarana lingkungan kawasan dalam kondisi baik (%)	63,89	%		15,97	%		15,97	%		35,20	%			%	15,97	%		15,97		54,79	Bidang PSU		
			Persentase PSU perumahan yang ditangani dengan kondisi baik (%)	2,63	%	13.164.279.800,00	0,00	%	1.250.487.751,00	0,00	%	1.858.692.323,00	0,00	%	4.103.420.792,00	2,13	%	0,00	%	7.212.600.866	0,00			Bidang PSU		
	Terpeliharanya taman kota dan RTH		Cakupan RTH dan Taman yang dikelola (%)	100	%		100,00	%		100,00	%		100,00	%			%	100,00	%		100,00			Bidang PSU		
	Tertakutnya Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Persentase perumahan terfasilitasi kecukupan PSU dalam kondisi berfungsi baik	2,63	%		0,00	%		0	%		2,63	%			%	2,63	%		100,00			Bidang PSU		
			Persentase Developer Perumahan yang Menyerahkan Fasilitas Umum/Fasilitas Khusus.	14	%		0,00	%		0	%		14	%			%	14,00	%		100,00			Bidang PSU		
			Jumlah ruang terbuka hijau (RTH) publik yang terpelihara dengan baik	2	kawasan		2,00	kawasan		2	kawasan		2	kawasan		kawasan		kawasan	6,00	kawasan		300,00			Bidang PSU	
			Jumlah pembangunan/rehabilitasi drainase kawasan perumahan dan permukiman	0	kawasan	13.164.279.800,00	0,00	kawasan	1.250.487.751,00	0	kawasan	1.858.692.323,00	0	kawasan	4.103.420.792,00		kawasan	0,00	kawasan	7.212.600.866	0,00				54,79	Bidang PSU
			Waktu pemeliharaan penerangan jalan umum (PJU)	12	bulan		3,00	bulan		3	bulan		3	bulan		bulan		bulan	9,00	bulan		75,00			Bidang PSU	
			Terpenuhihny kenyamanan pengguna jalan umum pada malam hari	1	tahun		0,25	tahun		0,25	tahun		0,25	tahun		tahun		tahun	0,75	tahun		75,00			Bidang PSU	
			Waktu Pembangunan dan rehabilitasi penerangan jalan umum (PJU)	12	bulan		3,00	bulan		3	bulan		3	bulan		bulan		bulan	9,00	bulan		75,00			Bidang PSU	
	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan		Jumlah dokumen Detail Engineering Design (DED) PSU Perumahan	2	Dokumen	101.860.000,00	0	Dokumen		0	Dokumen		0	Dokumen		Dokumen	0,00	Dokumen		0,00	0,00		0,00	Bidang PSU		
			Persentase Rumah yang Dilayani Bantuan PSU Pada Perumahan	90	%		0	%		0	%		65	%			%	65,00	%		72,22			Bidang PSU		
		Penyediaan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Meningkatkan Fungsi Hunian	Persentase RTH Publik yang terpelihara dengan baik	100	%	13.011.489.800,00	100	%	1.250.487.751,00	100	%	1.858.692.323,00	100	%	4.103.420.792,00		%	300,00	%	7.212.600.866	300,00			55,43	Bidang PSU	
			Persentase pemeliharaan penerangan jalan	73	%		18,25	%		14,03	%		23	%			%	55,28	%		75,73			Bidang PSU		
		Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum Perumahan	Persentase Developer Perumahan yang Menyerahkan Fasilitas Umum/Fasilitas Khusus.	14	%	50.930.000,00	0	%		3,68	%		3,68	%			%	7,36	%		52,57		0,00	Bidang PSU		
Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan (%)																100,10	0,00									
Predikat Kinerja Sub Kegiatan																ST	T									
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)																100,00	54,79									
Predikat Kinerja Kegiatan																ST	R									
	Meningkatnya advokasi bidang pertanahan	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase advokasi pertanahan yang berhasil	100	%	230.375.000,00	100,00	%	1.800.000,00	100,00	%	31.545.000,00		%	43.579.000,00		%	100,00	%	76.924.000	100,00	33,39		Bidang Pertanahan		

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Tahun Berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2022 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (%)		Unit Penanggung Jawab					
						I		II		III		IV		12		13 = (12/7x100)											
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						K	Rp			
1	2	3	4	7		8		9		10		11		12		13 = (12/7x100)		16									
			Persentase laporan persoalan pertanahan yang difasilitasi	100	%			25	%			25	%			25	%	100,00	%	100,00			Bidang Pertanahan				
			Waktu fasilitasi penyelesaian konflik-konflik pertanahan	12	bulan	230.375.000,00		3	bulan	1.800.000,00		3	bulan	31.545.000,00		3	bulan	43.579.000,00		3	bulan	12,00	bulan	76.924.000	12,00	33,39	Bidang Pertanahan
			Jumlah penyuluhan hukum pertanahan	3	Kali			0	Kali			0	Kali			0	Kali			0	Kali	3,00	Kali		3,00	33,39	Bidang Pertanahan
		Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota (Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan)	Jumlah laporan penyelenggaraan fasilitasi persoalan/ sengketa tanah	1	Dokumen	230.375.000,00		0	Dokumen	1.800.000,00		0	Dokumen	31.545.000,00		0	Dokumen	43.579.000,00		1	Dokumen	1,00	Dokumen	76.924.000	100,00	33,39	Bidang Pertanahan
Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan (%)																100,00		33,39									
Predikat Kinerja Sub Kegiatan																ST		SR									
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)																100,00		33,39									
Predikat Kinerja Kegiatan																ST		SR									
		PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Persentase tanah yang dibebaskan sesuai kebutuhan lokasi (%)	100	%	58.945.584.693,00		0	%	3.000.000,00		0	%	12.233.000,00		0	%	28.065.000,00		100	%	0,00	%	43.298.000	0,00	0,07	Bidang Pertanahan
		Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase tanah yang dibebaskan sesuai kebutuhan luas	100	%	58.945.584.693,00		0	%	3.000.000,00		0	%	12.233.000,00		0	%	28.065.000,00			%	0,00	%	43.298.000	0,00	0,07	Bidang Pertanahan
		Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan ganti kerugian dan santunan tanah	1	Laporan	58.945.584.693,00		0	Laporan	3.000.000,00		0	Laporan	12.233.000,00		0	Laporan	28.065.000,00			Laporan	0,00	Laporan	43.298.000	0,00	0,07	Bidang Pertanahan
Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan (%)																0,00		0,07									
Predikat Kinerja Sub Kegiatan																SR		SR									
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)																0,00		0,07									
Predikat Kinerja Kegiatan																SR		SR									
		PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Persentase cakupan data penguasaan, pemilikan, penggunaan dan informasi pertanahan	18,18	%			18,18	%			0,00	%			0,00	%				%	18,18	%	100,00		10,47	Bidang Pertanahan
			Persentase penataan administrasi Tanah pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (%)	100	%	851.615.000,00		0,00	%	5.400.000,00		0,00	%	66.740.000,00		16,57	%				%	16,57	%	89.188.000		16,57	Bidang Pertanahan
		Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sistem informasi pertanahan yang dibuat	1	buah	851.615.000,00		0,00	buah	5.400.000,00		0,00	buah	66.740.000,00		1,00	buah				buah	1,00	buah	100,00		10,47	Bidang Pertanahan
			Jumlah dokumen survey dan pendataan petanahan	1	Dokumen			1,00	Dokumen			0,00	Dokumen			0,00	Dokumen				Dokumen	1,00	Dokumen	100,00			Bidang Pertanahan
			Jumlah sosialisasi sistem pendaftaran tanah	3	kali			0,00	kali			3,00	kali			0,00	kali				kali	3,00	kali	100,00			Bidang Pertanahan
		Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah (Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan)	Jumlah usulan sertifikasi aset tanah pemerintah daerah	175	bidang	743.550.000,00		0	bidang	5.400.000,00		0	bidang	43.500.000,00		29	bidang	16.200.000,00			bidang	29,00	bidang	65.100.000	16,57	8,76	Bidang Pertanahan
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	Jumlah sosialisasi pertanahan	3	kali	108.065.000,00		0	kali	-			kali	23.240.000,00		3	kali	848.000,00			kali	3,00	kali	24.088.000	100,00	22,29	Bidang Pertanahan
Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan (%)																90,91		70,02									
Predikat Kinerja Sub Kegiatan																T		S									
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)																95,56		71,37									
Predikat Kinerja Kegiatan																ST		S									

= Indikator Program Renstra
 = Indikator Kegiatan Renstra



Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Kabupaten Tapin

Yumanto, AP., MAP.
Penata Utama Muda (IV/c)
NIP. 19750328 199311 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

Jalan Jend. Sudirman (By Pass) Rantau (71111) Kalimantan Selatan (0511) 31291

Nomor : 650/ 064 -Set/Disperkimtan Rantau, 14 Maret 2022
Lampiran : -
Perihal : Rapat Koordinasi Monev Bulanan
Pelaksanaan Kegiatan Dinas
Perkimtan

Kepada Yth :
PNS dan PTT Disperkimtan

Di -
Tempat

Sehubungan dengan rencana diadakannya rapat koordinasi terkait Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan, maka dengan ini diharapkan kehadirannya pada :

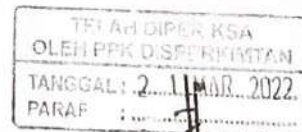
Hari / Tanggal : Selasa, 15 Maret 2022
Waktu : Pukul 08.30 Wita s.d Selesai
Tempat : Aula Kantor Disperkimtan

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.

An. Kepala Dinas.
Sekretaris,

H. HERMAN CAHYONO, S.Hut
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19670210 199703 1 003





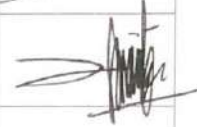




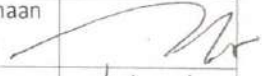
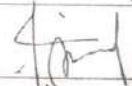



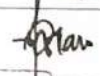
Tembusan Kepada Yth :
1. Kepala Dinas Perkimtan (Sebagai Laporan)




DAFTAR HADIR

Hari, Tanggal : Selasa, 15 Maret 2022

Acara : Rakoor Monitoring dan Evaluasi Bulanan Pelaksanaan Kegiatan Disperkimtan

No.	Nama	L	P	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Yumanto, AP, M.AP	✓		Kepala Dinas	
2.	H. Herman Cahyono, S.Hut	✓		Sekretaris	
3.	H. Isrok Antarikso, SKM, M.Kes	✓		Kepala Bidang Pertanahan	
4.	Zaul Rahman, S.Sos	✓		Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	
5.	Didik Sugito, S.Kom	✓		Kepala Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas	
6.	H. Marzuki, S.AP	✓		Jf. Analis Kebijakan	
7.	H. Maman, S.Sos	✓		Jf. Teknis Penyehatan Lingkungan	
8.	Supian Hadi, S.Sos	✓		Kasubbag Umum dan Kepegawaian	
9.	Erlis Akhsan Fuad, ST	✓		Jf. Teknik Tata Bangunan dan Perumahan	
10.	Abdurahman Fadilah, A.Md	✓		Jf. Penata Pertanahan / Jf. Analis Kebijakan	
11.	Yuliana Hayati, SH		✓	Jf. Analis Hukum / Jf. Analis Kebijakan	
12.	H. Irfan Rosandy, ST	✓		Jf. Perencana	
13.	Muhamad Jazuli Rahman, ST	✓		Kasubbag Perencanaan dan Keuangan	
14.	Isma Sari, SP, M.Ling		✓	Jf. Analis Kebijakan	
15.	Kumalasari, S.Ars		✓	Jf. Penata Pertanahan / Jf. Analis Kebijakan	
16.	Muhammad Rakhmad Rauzie	✓		Pengawas Fisik Perumahan	
17.	Krisna Darmawan, SE	✓		Bendahara Pengeluaran	
18.	Ikhsan Reza Fakhlevie, SE	✓		Pranata Barang dan Jasa	
19.	Rino Ardhy Justama, S.STP	✓		Staf	

TELAH DIPERIKSA
 OLEH PFK DISPERKIMTAN
 TANGGAL: 21 MAR 2022
 PARAF : 

20.	Rezza Ramadani, ST	✓		Staf	
21.	Hamnah, SM		✓	Staf	
22.	Fitriyah		✓	Staf	
23.	Misliani		✓	Staf	
24.	Rabiah, ST		✓	Staf	izin
25.	Ahmad Septian Prayogi, ST	✓		Staf	
26.	M. Aditya Warman, S. Kom	✓		Staf	
27.	M. Syahridha Firdaus, ST	✓		Staf	
28.	Hj. Putri Nabilla Galuh Randa, SH		✓	Staf	
29.	Meilena Sari, S.Tr.Kg		✓	Staf	
30.	Wa'isy Rahmatullah	✓		Staf	Wanda
31.	Noor Helda Mulyawati, SKM		✓	Staf	
32.	Ikhsan Firmawan, ST	✓		Staf	
33.	M. Erlangga Saputra, SH	✓		Staf	
34.	Ramadhan Harahap	✓		Staf	
35.	Syauqi Mubarak	✓		Staf	
36.	Suriansyah	✓		Staf	
37.	H. Ahmad Maulidi	✓		Staf	
38.	Istiqomah Dinarni, S.IP		✓	Staf	
39.	Muhammad Yuhdi, S. Kom	✓		Staf	
40.	Muhammad Junaidi, S. IP	✓		Staf	
41.	Salsabila Rahmah, ST		✓	Staf	
42.	Muriati Utami		✓	Staf	

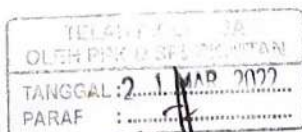
NOTULEN RAPAT

Hari/Tanggal : Selasa, 15 Maret 2022
Waktu : 08.30 Wita s.d Selesai
Tempat : Aula Dinas Perkimtan
Pimpinan Rapat : Kepala Dinas Perkimtan
Peserta : - Karyawan/ti PNS dan PTT Dispekimtan
Perihal : Rapat Koordinasi Monev Bulanan Pelaksanaan Kegiatan Dinas
Perkimtan

Hasil Rapat :

Beberapa arahan Kepala Dinas pada Rapat Koordinasi Kegiatan Disperkimtan, sebagai berikut :

- Kegiatan Kantor Disperkimtan pada hari Senin dimulai pukul 08.00 pagi untuk melaksanakan Upacara dan dilanjutkan tugas dan kegiatan masing-masing.
- Sekretariat melayani dan membantu urusan kegiatan baik di Sekretariat sendiri maupun bidang-bidang.
- Untuk berkas SPJ dibuat salinannya (fotocopy) sebanyak 3-4 kali untuk pengarsipan dan penyusunan GU.
- Terkait penginputan Data RTLH pada bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman targetkan selesai pada bulan April dengan bantuan 1 (satu) buah laptop untuk menunjang pekerjaan yang dianggarkan di APBD Perubahan.
- Untuk bidang Prasarana Sarana dan Utilitas (PSU) buat data perumahan yang ada di Kabupaten Tapin dan selesaikan urusan terkait Aset Fasilitas Umum Fasilitas Sosial, kemudian mengadakan pertemuan untuk penyerahan Aset Fasum dan Fasos dengan developer maupun pihak terkait.
- Terkait Penerangan Jalan Umum (PJU) harap dikontrol baik terkait pembayaran bulanan, pemasangan PJU ataupun perbaikannya.
- Untuk bidang Pertanahan terkait Aset Tanah harap disinkronkan dengan aplikasi dan lakukan koordinasi dengan BKAD dan melaporkan data kemudian data yang sudah mendapat hasil harap dikonfirmasi dengan SKPD terkait mengenai data aset tanah tersebut apakah sudah selesai atau belum.
- Tugas bidang Pertanahan sendiri hanya memfasilitasi aset tanah untuk tanah pemerintah yang belum melakukan sertifikasi.
- Kegiatan sosialisasi terkait aset tanah segera selesaikan di bulan Maret.
- Untuk Rapat selanjutnya diagendakan sebelum puasa pada Jum'at, 1 April 2022.



Notulis,


Misliani

DOKUMENTASI



TELAP...
OLEH PERUSAHAAN...
TANGGAL: 21 MAREK 2022
PARAF :



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

Jalan Jend. Sudirman (By Pass) Rantau (71111) Kalimantan Selatan (0511) 31291

Nomor : 650/ 135 -Set/Disperkimtan
Lampiran : -
Perihal : Rapat Koordinasi Monev Bulanan
Pelaksanaan Kegiatan Dinas
Perkimtan

Rantau, 06 Juni 2022

Kepada Yth :

1. Karyawan/ti PNS Dinas
Perkimtan
2. Karyawan/ti PTT Dinas
Perkimtan

Di -
Tempat

Sehubungan dengan rencana diadakannya rapat koordinasi terkait Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan, maka dengan ini diharapkan kehadirannya pada :

Hari / Tanggal : Selasa, 07 Juni 2022

Waktu : Pukul 13.30 Wita s.d Selesai

Tempat : Aula Kantor Disperkimtan

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.

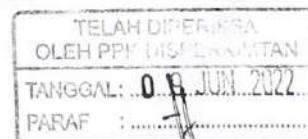
An. Kepala Dinas.
Sekretaris



H. HERMAN CAHYONO, S.Hut
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19670210 199703 1 003

Tembusan Kepada Yth :

1. Kepala Dinas Perkimtan (Sebagai Laporan)





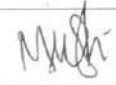




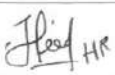










DAFTAR HADIR


Hari/Tanggal : Selasa, 07 Juni 2022

Acara : Rakoor Monev Bulanan Pelaksanaan Kegiatan Dinas Perkimtan

No.	Nama	L	P	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Yumanto, AP, M.AP	✓		Kepala Dinas	
2.	H. Herman Cahyono, S.Hut	✓		Sekretaris	
3.	H. Isrok Antarikso, SKM, M.Kes	✓		Kepala Bidang Pertanahan	
4.	Zaul Rahman, S.Sos	✓		Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	
5.	A. Zainul Muttaqin, ST, MT	✓		Kepala Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas	
6.	H. Marzuki, S.AP	✓		Jf. Analis Kebijakan	
7.	H. Maman, S.Sos	✓		Jf. Teknis Penyehatan Lingkungan	
8.	Supian Hadi, S.Sos	✓		Kasubbag Umum dan Kepegawaian	
9.	Erlis Akhsan Fuad, ST	✓		Jf. Teknik Tata Bangunan dan Perumahan	
10.	Abdurahman Fadilah, A.Md	✓		Jf. Penata Pertanahan / Jf. Analis Kebijakan	
11.	Yuliana Hayati, SH		✓	Jf. Analis Hukum / Jf. Analis Kebijakan	
12.	H. Irfan Rosandy, ST	✓		Jf. Perencana	
13.	Muhamad Jazuli Rahman, ST	✓		Kasubbag Perencanaan dan Keuangan	
14.	Isma Sari, SP, M.Ling		✓	Jf. Analis Kebijakan	
15.	Kumalasari, S.Ars		✓	Jf. Penata Pertanahan / Jf. Analis Kebijakan	
16.	Muhammad Rakhmad Rauzie	✓		Pengawas Fisik Perumahan	
17.	Krisna Darmawan, SE	✓		Bendahara Pengeluaran	
18.	Ikhsan Reza Fakhlevie, SE	✓		Pranata Barang dan Jasa	
19.	Rino Ardhy Justama, S.STP	✓		Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	

20.	Rezza Ramadani, ST	✓		Staf	
21.	Hamnah, SM		✓	Staf	
22.	Meilena Sari, S.Tr.Kg		✓	Staf	
23.	Fitriyah		✓	Staf	
24.	Misliani		✓	Staf	
25.	Rabiah, ST		✓	Staf	
26.	Ahmad Septian Prayogi, ST	✓		Staf	
27.	M. Aditya Warman, S.Kom	✓		Staf	
28.	M. Syahridha Firdaus, ST	✓		Staf	
29.	Hj. Putri Nabilla Galuh Randa, SH		✓	Staf	
30.	Wa'isy Rahmatullah	✓		Staf	
31.	Noor Helda Mulyawati, SKM		✓	Staf	
32.	Ikhsan Firmawan, ST	✓		Staf	
33.	Syauqi Mubarak	✓		Staf	
34.	Ramadhan Harahap	✓		Staf	
35.	H. Ahmad Maulidi	✓		Staf	
36.	Istiqomah Dinarni, S.IP		✓	Staf	
37.	M. Yuhdi, S.Kom	✓		Staf	
38.	M. Junaidi, S.IP	✓		Staf	
39.	Salsabila Rahmah, ST		✓	Staf	

40.	Muriati Utami		✓	Staf	
41.	M. Erlangga Saputra, SH	✓		Staf	
42.	Suriansyah	✓		Staf	
43.	Fitriyani Sari, ST		✓	Staf	

TELAH DIPERIKSA
 OLEH PPK DISTRIK ...
 TANGGAL: 09 JUN 2022
 PARAF: 

perumahan yang ada, kemudian pada perjalanan dinas ke setiap perumahan
buatkan video dokumenternya.

- Kegiatan Bidang Perkim yaitu kegiatan pembangunan WC komunal diberikan waktu selama 2 minggu terhitung sampai 24 Juni 2022 untuk menyelesaikan kegiatan dan pemberkasan sampai dengan laporan pekerjaannya.
- Pada bidang Pertanahan, untuk tanah yang sudah ada sertifikatnya, tanah yang sudah dibayarkan SPS juga yang sudah terkumpul datanya, sudah dapat dilakukan pemasangan patok.

Demikian rapat berjalan dengan tertib dan lancar.

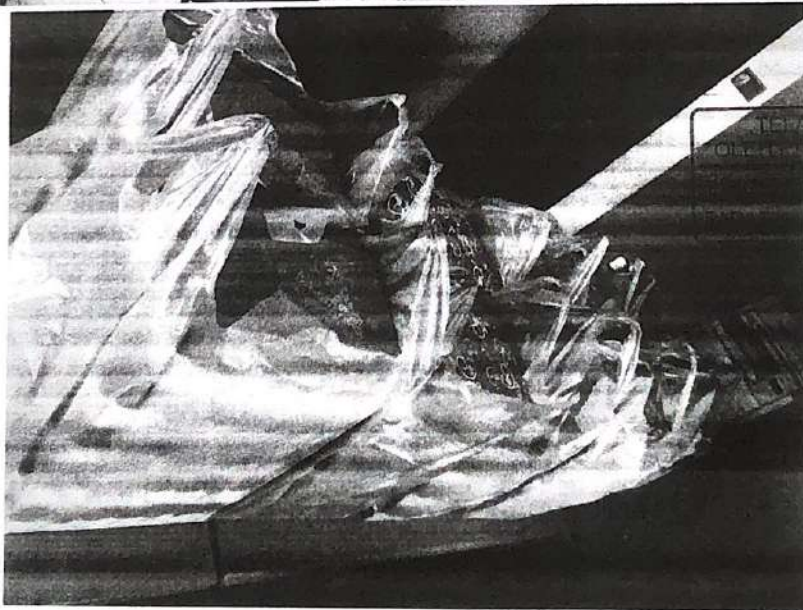
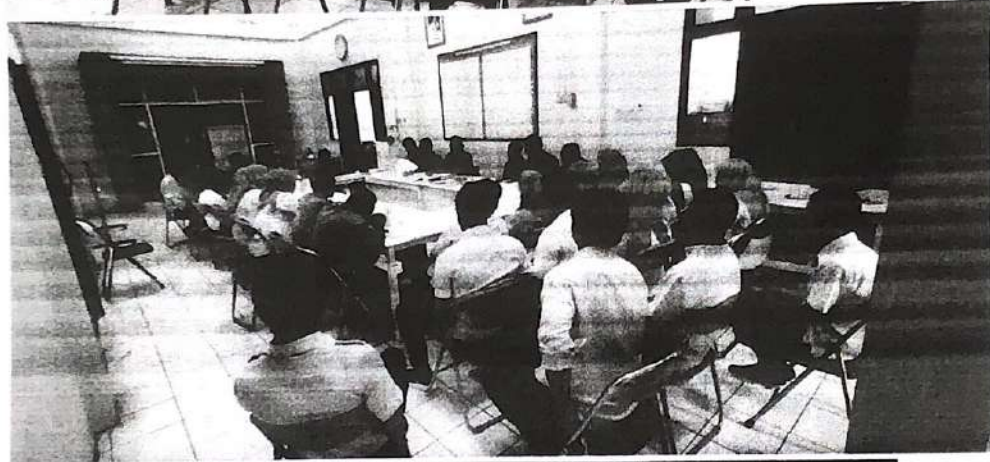
Notulis,



Rabiah, ST



DOKUMENTASI



IKSA
RKIN TAN
09 JUN 2022



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

Jalan Jend. Sudirman (By Pass) Rantau (71111) Kalimantan Selatan (0511) 31291

Nomor : 650/ 275 -Set/Disperkimtan
Lampiran : -
Perihal : Rapat Evaluasi Staf

Rantau, 15 September 2022

Kepada Yth :

1. Karyawan/ti PNS Dinas Perkimtan
2. Karyawan/ti PTT Dinas Perkimtan

Di -
Tempat

Sehubungan dengan rencana diadakannya rapat evaluasi terkait pembahasan kegiatan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, maka dengan ini diharapkan kehadirannya pada :

Hari / Tanggal : Jum'at, 16 September 2022
Waktu : Pukul 08.00 Wita s.d Selesai
Tempat : Aula Kantor Disperkimtan

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.

An. Kepala Dinas.
Sekretaris,








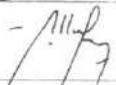
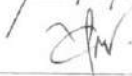



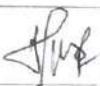






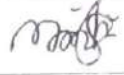












H. HERMAN CAHYONO, S.Hut
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19670210 199703 1 003

Tembusan Kepada Yth :

1. Kepala Dinas Perkimtan (Sebagai Laporan)

DAFTAR HADIR

No.	Nama	L	P	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Yumanto, AP, M.AP	✓		Kepala Dinas	
2.	H. Herman Cahyono, S.Hut	✓		Sekretaris	
3.	H. Isrok Antarikso, SKM, M.Kes	✓		Kepala Bidang Pertanahan	
4.	Zaul Rahman, S.Sos	✓		Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	
5.	A. Zainul Muttaqin, ST, MT	✓		Kepala Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas	
6.	H. Marzuki, S.AP	✓		Jf. Analis Kebijakan Muda	-
7.	H. Maman, S.Sos	✓		Jf. Teknis Penyehatan Lingkungan Muda	
8.	Supian Hadi, S.Sos	✓		Kasubbag Umum dan Kepegawaian	
9.	Erlis Akhsan Fuad, ST	✓		Jf. Teknik Tata Bangunan dan Perumahan	
10.	Abdurahman Fadilah, A.Md	✓		Jf. Penata Ruang Muda	
11.	Yuliana Hayati, SH		✓	Jf. Analis Kebijakan Muda	
12.	H. Irfan Rosandy, ST	✓		Jf. Perencana	-
13.	Muhamad Jazuli Rahman, ST	✓		Kasubbag Perencanaan dan Keuangan	
14.	Isma Sari, SP, M.Ling		✓	Jf. Teknik Penyehatan Lingkungan Muda	
15.	Kumalasari, S.Ars		✓	Jf. Penata Ruang Muda	
16.	Muhammad Rakhmad Rauzie	✓		Pengawas Fisik Perumahan	
17.	Krisna Darmawan, SE	✓		Bendahara Pengeluaran	
18.	Ikhsan Reza Fakhlevie, SE	✓		Pranata Barang dan Jasa	

19.	Rezza Ramadani, ST	✓		Staf	
20.	Hamnah, SM		✓	Staf	
21.	Fitriyah		✓	Staf	
22.	Misliani		✓	Staf	
23.	Rabiah, ST		✓	Staf	
24.	Ahmad Septian Prayogi, ST	✓		Staf	
25.	M. Aditya Warman, S. Kom	✓		Staf	
26.	M. Syahridha Firdaus, ST	✓		Staf	
27.	Hj. Putri Nabilla Galuh Randa, SH		✓	Staf	
28.	Meilena Sari, S.Tr.Kg		✓	Staf	
29.	Wa'isy Rahmatullah	✓		Staf	
30.	Noor Helda Mulyawati, SKM		✓	Staf	
31.	Ikhsan Firmawan, ST	✓		Staf	
32.	M. Erlangga Saputra, SH	✓		Staf	
33.	Ramadhan Harahap	✓		Staf	
34.	Syauqi Mubarak	✓		Staf	
35.	Suriansyah	✓		Staf	
36.	H. Ahmad Maulidi	✓		Staf	
37.	Istiqomah Dinarni, S.IP		✓	Staf	
38.	Muhammad Yuhdi, S. Kom	✓		Staf	
39.	Salsabila Rahmah, ST		✓	Staf	

40.	Fitriyani Sari, ST		✓	Staf	
41.	Muriati Utami		✓	Staf	
42.	Rahmadi	✓		Staf	-
43.	Akli	✓		Staf	-
44.	Akhmad Jamili	✓		Staf	-
45.	Gunawan Hirmantu	✓		Staf	-

27 SEP 2022

NOTULEN RAPAT

Hari/Tanggal : Jum'at, 16 September 2022
Waktu : 08.00 Wita s.d Selesai
Tempat : Aula Dinas Perkimtan
Pimpinan Rapat : Kepala Dinas Perkimtan
Peserta : - Karyawan/ti PNS Dispekimtan
 - Karyawan/ti PTT Disperkimtan
Perihal : Rapat Evaluasi Staf

Hasil Rapat :

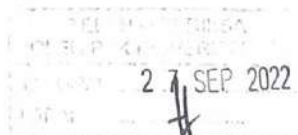
Beberapa arahan Kepala Dinas pada Rapat Koordinasi, sebagai berikut :

- Terkait APBD perubahan, dari masing-masing bidang dan sekretariat agar koordinasi kembali untuk memfinalkan kegiatan-kegiatan yang perlu mengalami perubahan.
 - Pada bidang pertanahan, untuk koordinasi dan komunikasikan kembali mengenai pelaksanaan dan kepastian nilai dana yang akan digunakan.
 - Pada bidang Perkim, terkait penambahan dana akan difokuskan pada kegiatan RTLH dan pembangunan infrastruktur yaitu fasilitas paving blok agar mempersiapkan adminitrasi dan segala sesuatunya dengan matang.
 - Pada bidang PSU, terkait penanaman pohon tabebuya dan pemasangan gorong-gorong supaya dikontrol agar tanamannya tidak mati atau layu dengan mengefisienkan dana dan waktu.
 - Untuk kegiatan dan sub kegiatan yang realisasi kinerja dan anggaran belum maksimal harap dikoordinasikan untuk dimaksimalkan.
- Demikian rapat berjalan dengan tertib dan lancar.

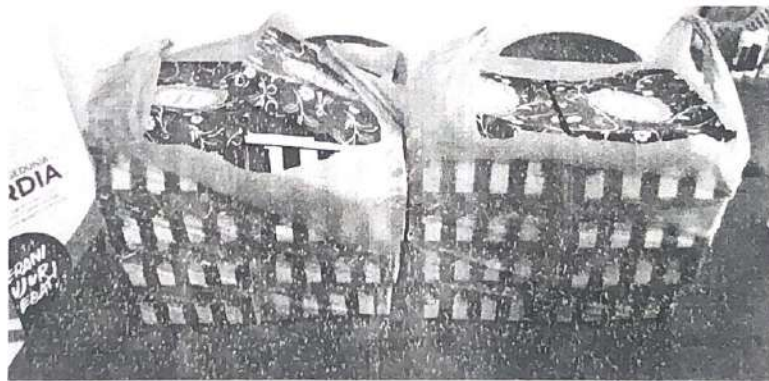
Notulis,



Rabiah, ST



DOKUMENTASI



27 SEP 2022



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

Jalan Jend. Sudirman (By Pass) Rantau (71111) Kalimantan Selatan (0511) 31291

Nomor : 650/ 578 -Set/Disperkimtan
Lampiran : -
Perihal : Undangan Rapat

Rantau, 02 Desember 2022

Kepada Yth :

1. Karyawan/ti PNS Dinas Perkimtan
2. Karyawan/ti PTT Dinas Perkimtan

di -

Tempat

Sehubungan dengan rencana diadakannya Rapat Koordinasi Monitoring Realisasi Kegiatan Dinas Perkimtan TA. 2022 dan Rencana Kegiatan Dinas Perkimtan TA. 2023, maka dengan ini diharapkan kehadirannya pada :

Hari / Tanggal : Senin, 05 Desember 2022

Waktu : Pukul 08.00 Wita s.d Selesai

Tempat : Aula Kantor Dinas Perkimtan

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.

An. Kepala Dinas.
Sekretaris,



H. HERMAN CAHYONO, S.Hut
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19670210 199703 1 003








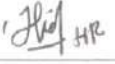


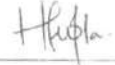
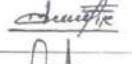








Tembusan Kepada Yth :

1. Kepala Dinas Perkimtan (Sebagai Laporan)

07 DEC 2022

DAFTAR HADIR

No.	Nama	L	P	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Yumanto, AP, M.AP	✓		Kepala Dinas	
2.	H. Herman Cahyono, S.Hut	✓		Sekretaris	
3.	H. Isrok Antarikso, SKM, M.Kes	✓		Kepala Bidang Pertanahan	
4.	Zaul Rahman, S.Sos	✓		Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	
5.	A. Zainul Muttaqin, ST, MT	✓		Kepala Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas	
6.	H. Marzuki, S.AP	✓		Jf. Analis Kebijakan Muda	-
7.	H. Maman, S.Sos	✓		Jf. Teknis Penyehatan Lingkungan Muda	
8.	Supian Hadi, S.Sos	✓		Kasubbag Umum dan Kepegawaian	
9.	Erlis Akhsan Fuad, ST	✓		Jf. Teknik Tata Bangunan dan Perumahan	
10.	Abdurahman Fadilah, A.Md	✓		Jf. Penata Ruang Muda	
11.	Yuliana Hayati, SH		✓	Jf. Analis Kebijakan Muda	
12.	H. Irfan Rosandy, ST	✓		Jf. Perencana	-
13.	Muhamad Jazuli Rahman, ST	✓		Kasubbag Perencanaan dan Keuangan	
14.	Isma Sari, SP, M.Ling		✓	Jf. Teknik Penyehatan Lingkungan Muda	-
15.	Kumalasari, S.Ars		✓	Jf. Penata Ruang Muda	
16.	Muhammad Rakhmad Rauzie	✓		Pengawas Fisik Perumahan	-
17.	Krisna Darmawan, SE	✓		Bendahara Pengeluaran	
18.	Ikhsan Reza Fakhlevie, SE	✓		Pranata Barang dan Jasa	
19.	M. Ryanda Faza Fadhila, S.Tr.IP	✓		Pengadministrasi Kepegawaian	

20.	Rezza Ramadani, ST	✓		Staf	
21.	Hamnah, SM		✓	Staf	
22.	Fitriyah		✓	Staf	
23.	Misliani		✓	Staf	
24.	Rabiah, ST		✓	Staf	
25.	Ahmad Septian Prayogi, ST	✓		Staf	
26.	M. Aditya Warman, S. Kom	✓		Staf	
27.	M. Syahridha Firdaus, ST	✓		Staf	-
28.	Hj. Putri Nabilla Galuh Randa, SH		✓	Staf	
29.	Meilena Sari, S.Tr.Kg		✓	Staf	
30.	Wa'isy Rahmatullah	✓		Staf	
31.	Noor Helda Mulyawati, SKM		✓	Staf	
32.	Ikhsan Firmawan, ST	✓		Staf	
33.	M. Erlangga Saputra, SH	✓		Staf	
34.	Ramadhan Harahap	✓		Staf	
35.	Syauqi Mubarak	✓		Staf	
36.	Suriansyah	✓		Staf	
37.	H. Ahmad Maulidi	✓		Staf	
38.	Istiqomah Dinarni, S.IP		✓	Staf	
39.	Muhammad Yuhdi, S. Kom	✓		Staf	
40.	Salsabila Rahmah, ST		✓	Staf	

41.	Fitriyani Sari, ST		✓	Staf	
42.	Muriati Utami		✓	Staf	
43.	M. Fajar Ansari Akbar	✓		Staf	
44.	Rahmadi	✓		Staf	-
45.	Akli	✓		Staf	-
46.	Akhmad Jamili	✓		Staf	-
47.	Gunawan Hirmantu	✓		Staf	-

REVISI
DIEKSPRESIKAN
07 DEC 2022


NOTULEN RAPAT

Hari/Tanggal : Senin, 05 Desember 2022
Waktu : 08.00 Wita s.d Selesai
Tempat : Aula Kantor Dinas Perkimtan
Pimpinan Rapat : Kepala Dinas Perkimtan
Peserta : - Karyawan/ti PNS Dinas Perkimtan
 - Karyawan/ti PTT Dinas Perkimtan
Perihal : Rapat Koordinasi Monitoring Realisasi Kegiatan Dinas
 Perkimtan TA. 2022 dan Rencana Kegiatan Dinas Perkimtan
 TA. 2023

Hasil Rapat :

- Untuk pelaksanaan kegiatan Dinas Perkimtan 2022 yang sedang dikerjakan agar diselesaikan administrasi dan pemberkasannya.
- Untuk kegiatan dan sub kegiatan yang realisasi kinerja dan anggaran belum maksimal harap dikoordinasikan untuk dimaksimalkan pada masing-masing bidang juga sekretariat.
- Untuk kegiatan Dinas Perkimtan tahun 2023, agar disiapkan kegiatan apa yang mau dilaksanakan dan koordinasikan pada masing-masing bidang juga sekretariat.
- Semua kegiatan masing-masing bidang dan sekretariat yang sudah selesai harap rapikan dan selesaikan laporannya kemudian dijilid rapi dengan jilid cover.

Demikian rapat berjalan dengan tertib dan lancar.

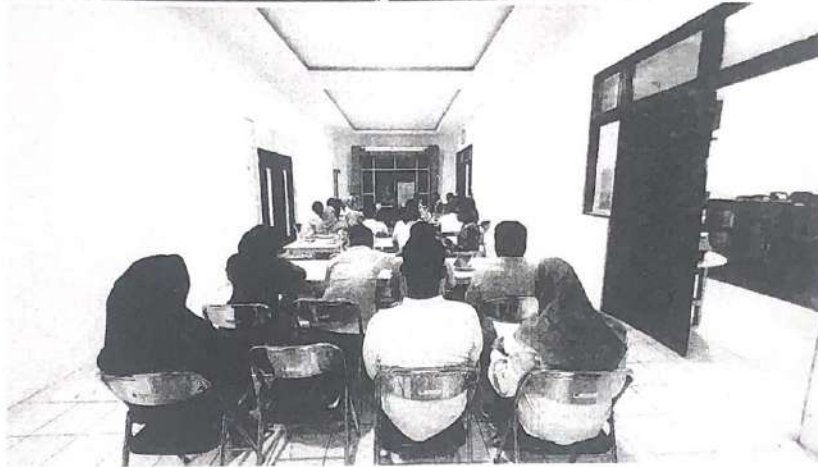
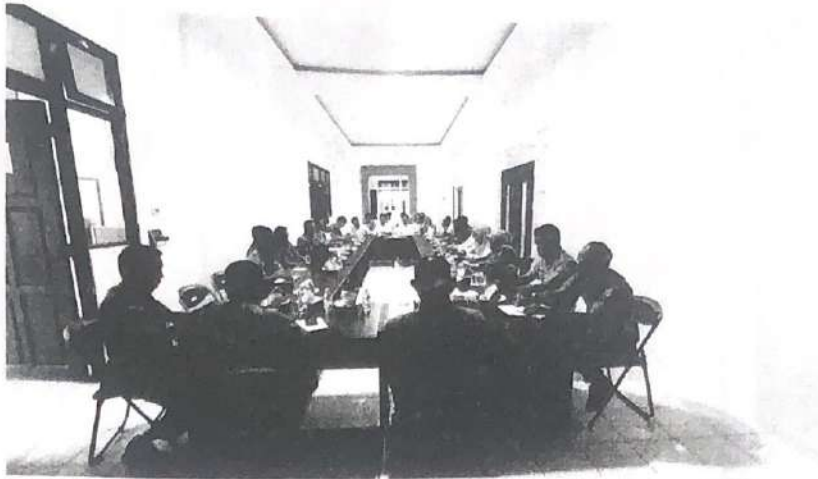
Notulis,



Rabiah, ST

07 DEC 2022

DOKUMENTASI



07 DEC 2022



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN

INSPEKTORAT

Jalan Brigjend. H. Hasan Basri Nomor 22 Telepon/Facsimile 0517-31601
RANTAU

LAPORAN HASIL EVALUASI

SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)

TAHUN 2020

Nomor : 700/11/LHE.AKIP WIL.I/2021
Tanggal 26 Juli 2021

O B R I K :

DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

KABUPATEN TAPIN



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN

INSPEKTORAT

Jalan Brigjend. H. Hasan Basry Nomor 22 Telpon (0517) 31601

R A N T A U

Kode Pos 71111

Nomor : 700/11/LHE.AKIP WIL.I/2021
Lampiran : Kertas Kerja Evaluasi
Hal : Laporan Hasil Evaluasi atas
Implementasi Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah
(Sistem AKIP) Tahun 2020.

Rantau, 26 Juli 2021

Kepada Yth.
Kepala Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan Kabupaten Tapin
Di-

Rantau.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Kami telah melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Tapin. Pelaksanaan evaluasi ini berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Tujuan evaluasi ini adalah untuk menilai tingkat akuntabilitas atas kinerja atau atau hasil kerja (*outcome*) dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang berorientasi pada hasil dan berbudaya pada kinerja.

Hasil evaluasi menunjukkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan **Sangat Baik (BB)** dengan nilai **75,37**.

Penilaian tersebut menunjukkan tingkat akuntabilitas kinerja, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan orientasi penyelenggaraan pemerintahan pada hasil, serta efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya di Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Tapin dengan rincian penilaian sebagai berikut:

Komponen yang Dinilai	Bobot	Nilai 2019	Nilai 2020
a. Perencanaan Kinerja	30	24,46	24,67
b. Pengukuran Kinerja	25	17,81	19,06
c. Pelaporan Kinerja	15	10,42	12,04
d. Evaluasi Internal	10	6,92	8,35
e. Capaian Kinerja	20	11,88	11,25
Nilai Hasil Evaluasi	100	71,49	75,37
Tingkat Akuntabilitas Kinerja		BB	BB

Berdasarkan uraian diatas, dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan manajemen kinerja dan mewujudkan budaya kinerja, kami merekomendasikan kepada Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Tapin dan jajarannya untuk menindaklanjuti hal hal sebagai berikut:

1. Melakukan reuiu secara berkala terhadap Dokumen Renstra, menyesuaikan target dan indikator untuk mencapai tujuan dan sasaran.
2. Membuatkan mekanisme pengumpulan data kinerja, dan melakukan monitoring secara berkala terhadap rencana aksi yang telah dibuat.
3. Menerapkan pemberian *reward & punishment* terhadap hasil pengukuran (capaian) kinerja mulai dari setingkat eselon IV keatas.
4. Mempertajam penyajian informasi tentang analisis efisiensi penggunaan sumber daya dalam Laporan Kinerja.

Demikian hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah disampaikan, dengan beberapa simpulan tersebut di atas untuk ditindaklanjuti.

Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Inspektur Kabupaten,

Unda Absori, SH.,MH
Pembina Tingkat I
NIP.19700722 200501 1 013

Catatan:

Data penilaian terlampir.

**KERTAS KERJA EVALUASI
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTAAHANAN KABUPATEN TAPIN**

NO	KOMPONEN/SUB KOMPONEN		SKPD	
			Y/T	NILAI
1	2		3	4
A. PERENCANAAN KINERJA (30%)		30,00	82,23%	24,67
I. PERENCANAAN STRATEGIS (10%)		10,00	85,69%	8,57
a. PEMENUHAN RENSTRA (2%)		2,00	97,22%	1,94
1	Renstra SKPD telah disusun		Y	1,00
2	Renstra telah memuat tujuan		Y	1,00
3	Tujuan yang ditetapkan telah dilengkapi dengan ukuran keberhasilan (indikator)		A	1,00
4	Tujuan telah disertai target keberhasilannya		A	1,00
5	Dokumen Renstra telah memuat sasaran		Y	1,00
6	Dokumen Renstra telah memuat indikator kinerja sasaran		A	1,00
7	Dokumen Renstra telah memuat target tahunan		A	1,00
8	Renstra telah menyajikan IKU		B	0,75
9	Renstra telah dipublikasikan		Y	1,00
b. KUALITAS RENSTRA (5%)		5,00	87,50%	4,38
10	Tujuan telah berorientasi hasil		A	1,00
11	ukuran keberhasilan (indikator) tujuan (outcome) telah memenuhi kriteria ukuran keberhasilan yang baik		A	1,00
12	Sasaran telah <i>berorientasi hasil</i>		A	1,00
13	Indikator kinerja sasaran (outcome dan output) telah memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik		B	0,75
14	Target kinerja ditetapkan dengan baik		A	1,00
15	Program/kegiatan merupakan cara untuk mencapai tujuan/sasaran/hasil program/hasil kegiatan		B	0,75
16	Dokumen Renstra telah selaras dengan Dokumen RPJMD		B	0,75
17	Dokumen Renstra telah menetapkan hal-hal yang seharusnya ditetapkan		B	0,75
c. IMPLEMENTASI RENSTRA (3%)		3,00	75,00%	2,25
18	Dokumen Renstra digunakan sebagai acuan penyusunan Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran		B	0,75
19	Target jangka menengah dalam Renstra telah dimonitor pencapaiannya sampai dengan tahun berjalan		B	0,75
20	Dokumen Renstra telah direviu secara berkala		B	0,75
II. PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (20%)		20,00	80,50%	16,10
a. PEMENUHAN PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (4%)		4,00	100,00%	4,00
1	Dokumen perencanaan kinerja tahunan telah disusun		Y	1,00
2	Perjanjian Kinerja (PK) telah disusun		Y	1,00
3	PK telah menyajikan IKU		A	1,00
4	PK telah dipublikasikan		Y	1,00
b. KUALITAS PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (10%)		10,00	85,00%	8,50
5	Sasaran telah <i>berorientasi hasil</i>		A	1,00
6	Indikator kinerja sasaran dan hasil program (outcome) telah memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik		B	0,75
7	Target kinerja ditetapkan dengan baik		B	0,75
8	Kegiatan merupakan cara untuk mencapai sasaran		B	0,75
9	Kegiatan dalam rangka mencapai sasaran telah didukung oleh anggaran yang memadai		B	0,75

10	Dokumen PK telah selaras dengan RPJMD/Renstra		B	0,75
11	Dokumen PK telah menetapkan hal-hal yang seharusnya ditetapkan (dalam kontrak kinerja/tugas fungsi)		B	0,75
12	Rencana Aksi atas Kinerja sudah ada		Y	1,00
13	Rencana Aksi atas Kinerja telah mencantumkan target secara periodik atas kinerja		A	1,00
14	Rencana Aksi atas kinerja telah mencantumkan sub kegiatan/komponen rinci setiap periode yang akan dilakukan dalam rangka mencapai kinerja		Y	1,00
	c. IMPLEMENTASI PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (6%)	6,00	60,00%	3,60
15	Rencana kinerja tahunan dimanfaatkan dalam penyusunan anggaran		T	-
16	Target kinerja yang diperjanjikan telah digunakan untuk mengukur keberhasilan		B	0,75
17	Rencana Aksi atas Kinerja telah dimonitor pencapaiannya secara berkala		B	0,75
18	Rencana Aksi telah dimanfaatkan dalam pengarahannya dan pengorganisasian kegiatan		B	0,75
19	Perjanjian Kinerja telah dimanfaatkan untuk penyusunan (identifikasi) kinerja sampai kepada tingkat eselon III dan IV		B	0,75
	B. PENGUKURAN KINERJA (25%)	25,00	76,25%	19,06
	I. PEMENUHAN PENGUKURAN (5%)	5,00	100,00%	5,00
1	Telah terdapat indikator kinerja utama (IKU) sebagai ukuran kinerja secara formal		Y	1,00
2	Telah terdapat ukuran kinerja tingkat eselon III dan IV sebagai turunan kinerja atasannya		A	1,00
3	Terdapat mekanisme pengumpulan data kinerja		A	1,00
4	Indikator Kinerja Utama telah dipublikasikan		Y	1,00
	II. KUALITAS PENGUKURAN (12,5%)	12,50	75,00%	9,38
5	IKU telah memenuhi kriteria indikator yang baik		A	1,00
6	IKU telah <i>cukup untuk mengukur</i> kinerja		B	0,75
7	IKU unit kerja telah selaras dengan IKU IP		B	0,75
8	Ukuran (Indikator) kinerja eselon III dan IV telah memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik		B	0,75
9	Indikator kinerja eselon III dan IV telah selaras dengan indikator kinerja atasannya		A	1,00
10	Sudah terdapat ukuran (indikator) kinerja individu yang mengacu pada IKU unit kerja organisasi/atasannya		B	0,75
11	Pengukuran kinerja sudah dilakukan secara berjenjang		B	0,75
12	Pengumpulan data kinerja dapat diandalkan		B	0,75
13	Pengumpulan data kinerja atas Rencana Aksi dilakukan secara berkala (bulanan/triwulanan/semester)		Y	1,00
14	Pengukuran kinerja sudah dikembangkan menggunakan teknologi informasi		T	-
	III. IMPLEMENTASI PENGUKURAN (7,5%)	7,50	62,50%	4,69
15	IKU telah dimanfaatkan dalam dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran		B	0,75
16	IKU telah dimanfaatkan untuk penilaian kinerja		B	0,50
17	Target kinerja eselon III dan IV telah dimonitor pencapaiannya		B	0,50
18	Hasil pengukuran (capaian) kinerja mulai dari setingkat eselon IV keatas telah dikaitkan dengan (dimanfaatkan sebagai dasar pemberian) <i>reward & punishment</i>		B	0,75
19	IKU telah <i>direviu secara berkala</i>		B	0,75

20	Pengukuran kinerja atas Rencana Aksi digunakan untuk pengendalian dan pemantauan kinerja secara berkala		B	0,50
C. PELAPORAN KINERJA (15%)		15,00	80,25%	12,04
I. PEMENUHAN PELAPORAN (3%)		3,00	93,75%	2,81
1	Laporan Kinerja telah disusun		Y	1,00
2	Laporan Kinerja telah disampaikan tepat waktu		Y	1,00
3	Laporan Kinerja telah di upload kedalam website		Y	1,00
4	Laporan Kinerja menyajikan informasi mengenai pencapaian IKU		B	0,75
II. PENYAJIAN INFORMASI KINERJA (7,5%)		7,50	75,00%	5,63
5	Laporan Kinerja menyajikan informasi pencapaian sasaran yang berorientasi outcome		B	0,75
6	Laporan Kinerja menyajikan informasi mengenai kinerja yang telah diperjanjikan		B	0,75
7	Laporan Kinerja menyajikan evaluasi dan analisis mengenai capaian kinerja		B	0,75
8	Laporan Kinerja menyajikan perbandingan data kinerja yang memadai antara realisasi tahun ini dengan realisasi tahun sebelumnya dan perbandingan lain yang diperlukan		B	0,75
9	Laporan Kinerja menyajikan informasi tentang analisis efisiensi penggunaan sumber daya		B	0,75
10	Laporan Kinerja menyajikan informasi keuangan yang terkait dengan pencapaian sasaran kinerja instansi		B	0,75
11	Informasi kinerja dalam Laporan Kinerja dapat diandalkan dan dapat diverifikasi		B	0,75
III. PEMANFAATAN INFORMASI KINERJA (4,5%)		4,50	80,00%	3,60
12	Informasi kinerja telah digunakan dalam pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja		Y	1,00
13	Informasi yang disajikan <i>telah digunakan dalam perbaikan perencanaan</i>		B	0,75
14	Informasi yang disajikan telah <i>digunakan untuk menilai dan memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan organisasi</i>		B	0,75
15	Informasi yang disajikan <i>telah digunakan untuk peningkatan kinerja</i>		B	0,75
16	Informasi yang disajikan telah digunakan untuk penilaian kinerja		B	0,75
D. EVALUASI INTERNAL (10%)		10,00	83,50%	8,35
I. PEMENUHAN EVALUASI (2%)		2,00	100,00%	2,00
1	<i>Terdapat pemantauan mengenai kemajuan pencapaian kinerja beserta hambatannya</i>		Y	1,00
2	<i>Evaluasi program</i> telah dilakukan		Y	1,00
3	Evaluasi atas pelaksanaan Rencana Aksi telah dilakukan		A	1,00
II. KUALITAS EVALUASI (5%)		5,00	82,00%	4,10
5	Evaluasi <u>program</u> dilaksanakan dalam rangka menilai keberhasilan program		B	0,75
6	Evaluasi <u>program</u> telah memberikan rekomendasi-rekomendasi perbaikan perencanaan kinerja yang dapat dilaksanakan		B	0,75
7	Evaluasi <u>program</u> telah memberikan rekomendasi-rekomendasi peningkatan kinerja yang dapat dilaksanakan		B	0,75
8	Pemantauan <u>Rencana Aksi</u> dilaksanakan dalam rangka mengendalikan kinerja		A	1,00
9	Pemantauan <u>Rencana Aksi</u> telah memberikan alternatif perbaikan yang dapat dilaksanakan		A	1,00

10	Hasil evaluasi Rencana Aksi telah menunjukkan perbaikan setiap periode		B	0,67
III. PEMANFAATAN EVALUASI (3%)		3,00	75,00%	2,25
11	Hasil evaluasi program telah ditindaklanjuti untuk perbaikan pelaksanaan program di masa yang akan datang		B	0,75
12	Hasil evaluasi Rencana Aksi telah ditindaklanjuti dalam bentuk langkah-langkah nyata		B	0,75
E. PENCAPAIAN SASARAN/KINERJA ORGANISASI (20%)		20,00	56,25%	11,25
KINERJA YANG DILAPORKAN (OUTPUT) (7,5%)		7,50	66,67%	5,00
1	Target dapat dicapai		B	2,00
2	Capaian kinerja lebih baik dari tahun sebelumnya		B	1,00
3	Informasi mengenai kinerja dapat diandalkan		B	2,00
KINERJA YANG DILAPORKAN (OUTCOME) (12,5%)		12,50	156,25%	6,25
4	Target dapat dicapai			0,50
5	Capaian kinerja lebih baik dari tahun sebelumnya			1,50
6	Analisis capaian kinerja telah memadai			1,75
7	Informasi mengenai kinerja dapat diandalkan			2,50
HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA (100%)		100,00	75,37%	75,37